



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

LAPORAN KINERJA 2025

[//diktisaintek.kemdiktisaintek.go.id](http://diktisaintek.kemdiktisaintek.go.id)

Jalan Taebenu, RT. 007/RW. 003, Kelurahan
Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja (LAKN) Komite Layanan Pendidikan Tinggi (LLDPT) Wilayah XV Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja LLDPT Wilayah XV yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akan melaksanakan tugas dan fungsi LLDPT Wilayah XV selama satu tahun anggaran. Dokumen ini juga menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Laporan ini menyajikan gambaran umum mengenai capaian kinerja secara nasional, regional, serta berbagai upaya strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas dari layanan pendidikan tinggi. Khususnya pembahasan, analisis, dan pengamatan terhadap Program Kerja Satuan di wilayah kerja LLDPT Wilayah XV.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih terdapat tantangan dan kendala yang perlu terus diperbaiki di tahun mendatang. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan dasar pertimbangan ke depan serta perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Jika kita bisa menyandingkan aspek-aspek dari semua aspek kepada seluruh perguruan tinggi, baik internal maupun eksternal, dan dukungan dari kita semua yang telah diberikan dalam pelaksanaan tugas LLDPT Wilayah XV. Semoga LAKN ini dapat membantu informasi yang bermanfaat dan menjadi rujukan dalam meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab pada peningkatan mutu kekinifan.

Kapung, 28 Januari 2025
Kepala LLDPT Wilayah XV

Adhiana Andhika

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Ikhtisar Eksekutif	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	6
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
D. Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi	12
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	12
C. Tujuan Strategis	13
D. Perjanjian Kinerja Awal, Akhir dan Matriks Kinerja	14
E. Program Prioritas	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja	20
B. Capaian Kinerja Organisasi	22
C. Realisasi Anggaran dan Efisiensi Anggaran	98
D. Inovasi, Penghargaan dan Program Crosscutting	105

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN	131
A. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir	134
B. Pengukuran Kinerja TW I, TW II, TW III dan TW IV	136
C. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah di Reviu	180
D. SK Tim Penyusun LAKIN	182
E. SK Tim Reviu LAKIN Tahun 2025	185
F. SK Tim SPI	188

DAFTAR GAMBAR

Iktisar Eksklusif

Gambar 1. Capaian IKK Tahun 2025	viii
Gambar 2. Pencapaian Indikator Kinerja	ix
Gambar 1.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	x

BAB 1

Gambar 1.1 . Peta Persebaran PTS di Wilayah LLDikti XV Tahun 2025	2
Gambar 1.2 Struktur Organisasi LLDikti (Permediktisaintek Nomor 01 Tahun 2024) .	8
Gambar 1.3 Struktur organisasi LLDikti Wilayah XV	9

BAB II

BAB III

Gambar 3.1 Persentase Capaian IK 1.1 dan IK 1.2	29
Gambar 3.2 Barcode Pengisian Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025	31
Gambar 3.3 Inpasing Pangkat dan Jabatan Fungsional Tahun 2025	33
Gambar 3.4 Layanan PDDIKTI Tahun	34
Gambar 3.5 Ratio Jumlah Dosen PTS di LLDIKTI XV	34
Gambar 3.6 Tampilan Kanal Media LLDikti Wilayah XV	36
Gambar 3.7 Laman Website LLDikti Wilayah XV	37
Gambar 3.8 Laman Website LAPOR!	38
Gambar 3.9 Laman Website PPID	38
Gambar 3.10 Tampilan Aplikasi SIKOMODO	39
Gambar 3.11 Peta Sebaran	44
Gambar 3.12 Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi Tahun 2025	44
Gambar 3.13 Layanan Rekomendasi	46
Gambar 3.14 10 kategori PTS dengan jumlah PS terbanyak dan status akreditasi	46
Gambar 3.15 Kegiatan Penjamin Mutu Tahun 2025	47
Gambar 3.16 Persentase Capaian IK 2.1, IK 2.2 dan IK 2.3	50
Gambar 3.17 Pembekalan Peserta KKN Tematik GENTASKIN Tahun 2025	53
Gambar 3.18 Evaluasi Gentaskin dan Konsolidasi KPT Kosabangsa	54
Gambar 3.19 Sosialisasi Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2025 Bagi PTS LLDikti XV ...	55
Gambar 3.20 Bantuan Pendidikan pada Mahasiswa di PTS Lingkup LLDikti XV	56
Gambar 3.21 Bimtek Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha	61
Gambar 3.22. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wilayah ...	62
Gambar 3.23. Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT pada PTS.....	69
Gambar 3.24. Monev SATGAS PPKPT pada STIKOM dan UNADRI	69
Gambar 3.25. PTS Yang Melaporkan	70
Gambar 3.26. Nama PTS Sudah Membentuk Satgas dan Belum Membentuk Satgas .	72
Gambar 3.27. Persentase Capaian IKK 3.1 dan IKK 3.2	75
Gambar 3.28. Penandatanganan Kontrak, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat	79
Gambar 3.29. Rapat Teknis Fungsi, Penyamaan Persepsi Kolaborasi, Riset Bersama	81
Gambar 3.30. BIMTEK Proposal Penelitian Pengabdian Hibah BIMA Tahun 2026 ...	82
Gambar 3.31. Jumlah Dana Penelitian dan Pengabdian (PPM) Tahun 2025	83
Gambar 3.32. Delapan Skema PPM 2025	83
Gambar 3.33. Kegiatan Rembug Bersama	88
Gambar 3.34. Konsorsium Trilateral Indonesia Timur Tahun 2025	89
Gambar 3.35. Data Jumlah Dana Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025	90
Gambar 3.36. Perbandingan Anggaran Hibah Penelitian dan Pengabdian	92
Gambar 3.37. Persentase Capaian IKK 4.1. dan 4.2	96
Gambar 3.38. Rapat Rutin dengan Pimpinan	99

Gambar 3.39. Rapat TW I, TW II, TW III dan IV	99
Gambar 3.40. Komponen Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran	102
Gambar 3.41. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025	103
Gambar 3.42. Anggaran dan Realisasi Per Indikator Kegiatan Tahun 2025	108
Gambar 3.43. Alokasi Efisiensi Anggaran	110
Gambar 3.44. Rekomposisi Efisiensi Anggaran	111
Gambar 3.45. Relaksasi Efisiensi Anggaran	112
Gambar 3.46. Penyampaian Alokasi Tunjangan Kinerja Dosen	112
Gambar 3.47. Penyampaian Tambahan Alokasi Belanja Pegawai BA BUN	112
Gambar 3.48. Kegiatan KKN Tematik Kabupaten Sumba Barat Daya	115
Gambar 3.49. Kegiatan KKN Tematik Manggarai Timur	117
Gambar 3.50. Kegiatan KKN Tematik Kabupaten Timor Tengah Selatan	121
Gambar 3.51. Presensi Online Dosen DPK	122
Gambar 3.52. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi NTT	122
Gambar 3.53. Talent Scoting	124
Gambar 3.54. Kegiatan Rembug Bersama, Implementasi Nota Kesepakatan	125
Gambar 3.55. Konsorsium Trilateral Indonesia Timur Tahun 2025	127
Gambar 3.56. Kegiatan FGD Usulan Jafung Dosen LLDikti XV Tahun 2025	129
Gambar 3.57. FGD Verifikasi dan Validasi Laporan BKD Genap 2025/2026	130



LLDIKTI WILAYAH XV

DAFTAR TABEL

BAB 1

Tabel 1.1 Perkembangan PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XV Tahun 2025.....	2
Tabel 1.2 Jumlah PTS di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025	3
Tabel 1.3 Daftar PTN di Lingkungan LLDikti Wilayah XV Tahun 2025.....	3
Tabel 1.4 Sebaran dan Jumlah Dosen PNS Tahun 2025	3
Tabel 1.5 Sebaran Jumlah Dosen Non PNS Tahun 2025	4
Tabel 1.6 Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik Tahun 2025	4
Tabel 1.7 Sebaran dan Jumlah Mahasiswa Tahun 2025	5
Tabel 1.8 Jumlah dan Golongan Tenaga ASN Tahun 2025	5
Tabel 1.9 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	5
Tabel 1.10 Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	6
Tabel 1.11 Jumlah Pegawai <i>Outsourcing</i> Tahun 2025	6

BAB II

Tabel 2.1 Tujuan LLDikti Wilayah XV pada tahun 2025 – 2029	13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025	14
Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Tahun 2025	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Akhir/Revisi Tahun 2025	15
Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Tahun 2025	16
Tabel 2.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Draft Renstra Periode 2025	16
Tabel 2.7 Program prioritas Tahun 2025	17
Tabel 2.8 Rencana Kerja Tahun 2025	18

BAB III

Tabel 3.1 Capaian Kinerja LLDIKTI XV Tahun 2025	21
Tabel 3.2 Kolaborasi Pencapaian IKU Tahun 2025	23
Tabel 3.3 Capaian IK 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti	30
Tabel 3.4 Capaian IK 1.1 Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Utama LLDikti	31
Tabel 3.5 Capaian IK 1.2 Persentase penggabungan dengan PTS lain	42
Tabel 3.6 Capaian IK 1.2 Persentase penggabungan dengan PTS lain	42
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Fasilitas Peningkatan Mutu Kelembagaan	45
Tabel 3.8 Daftar Kegiatan Program Penjaminan Mutu	47
Tabel 3.9 Presentase PTS Pembelajaran di Luar Program Studi tahun 2025	52
Tabel 3.10 Presentase PTS Pembelajaran di Luar Program Studi tahun 2025	52
Tabel 3.11 Penerima KIPK Berdasarkan Jabatan Akademik Tahun 2025	56
Tabel 3.12. Capaian IK 2.2. Persentase mahasiswa program studi atau meraih prestasi 60	
Tabel 3.13. Capaian IK 2.2. Persentase mahasiswa program studi atau meraih prestasi 60	
Tabel 3.14. Jumlah Mahasiswa Berprestasi Pada Seleksi Pilmapres Tahun 2025	63
Tabel 3.15. Jumlah Mahasiswa Olimpiade MIPA Tahun 2025	63
Tabel 3.16. Capaian IK 2.3 kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual	67
Tabel 3.17. Capaian IK 2.3 kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual	68
Tabel 3.18. Capaian IK 3.1 Jumlah dosen berkegiatan tridharma di luar kampus	77
Tabel 3.19. Capaian IK 3.1 Jumlah dosen berkegiatan tridharma di luar kampus	78
Tabel 3.20. Capaian IK. 3.2 bekerja sama dengan mitra Tahun 2025	86
Tabel 3.21. Capaian IK. 3.2 bekerja sama dengan mitra Tahun 2025	87
Tabel 3.22. PTS Yang Melaporkan Kerjasama Dengan Mitra	93
Tabel 3.23. Kriteria Penilaian	97
Tabel 3.24. Gambaran Tingkat AKIP	97
Tabel 3.25. IKK 4.1 Predikat SAKIP Tahun 2025	98
Tabel 3.26. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	98

Tabel 3.27. Komponen Penilaian EKA	102
Tabel 3.28. Capaian IK 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	103
Tabel 3.29. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja	105
Tabel 3.30. Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan/KRO/RO	106
Tabel 3.31. Jumlah Peserta KKN Tematik Kabupaten Sumba Barat Daya	113
Tabel 3.32. Jumlah Dosen Pendamping Kabupaten Sumba Barat Daya	113
Tabel 3.33. Jumlah Peserta KKN Tematik Kabupaten Manggarai Timur	115
Tabel 3.34. Jumlah Dosen Pendamping Kabupaten Manggarai Timur	115
Tabel 3.35. Jumlah Peserta KKN Tematik Kabupaten Timor Tengah Selatan	117
Tabel 3.36. Jumlah Dosen Pendamping Kabupaten Timor Tengah Selatan	118



LEDIKTIWILAYAH XV

DAFTAR GRAFIK

Iktisar Eksklusif

Grafik 1. Realisasi Anggaran Tahun 2025	iv
Grafik 3.1. Nilai Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025	30
Grafik 3.2. Data Satgas PPKPT	71
Grafik 3.3. Survey SATGAS PPKPT	71
Grafik 3.4 Jumlah Kerjasama (MOU, MOA dan IA)	95



LEDIKTIVILAYAH XV

IKTISAR EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV Tahun 2025 menyajikan capaian pelaksanaan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tanggal 25 Juli Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

Penjelasan lebih rinci mengenai indikator kinerja yang telah tercapai maupun yang belum mencapai target disampaikan secara komprehensif pada Bab III. Secara keseluruhan, kinerja LLDIKTI Wilayah XV Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran strategis lembaga, terdapat 6 (Enam) indikator kinerja kegiatan (IKK) yang realisasinya melampaui target yang ditetapkan, sedangkan 4 (Empat) IKK lainnya belum memenuhi target. Capaian tersebut disajikan secara visual dalam grafik pendukung.

Dari sisi capaian kinerja dan realisasi anggaran LLDIKTI Wilayah XV Tahun 2025, di mana dari total 9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung pencapaian sasaran strategis, terdapat 7 IKK yang realisasinya melampaui target lebih dari 100%, sementara 3 IKK lainnya belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram capaian kinerja, sedangkan dari sisi pengelolaan anggaran terlihat bahwa realisasi anggaran mencapai Rp52.520.218.000. dari total pagu sebesar Rp 49.224.995.617 atau setara dengan tingkat penyerapan sebesar 93,73%, yang menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik.



Sumber Data : Tim Perencanaan (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 1. Capaian IKK Tahun 2025

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

IKK 1.1. Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Utama LLDikti Target : 98 Realisasi : 98,1 Capaian : 100,10	IKK 1.2. Persentase PTS yang Terakreditasi Atau Meningkatkan Mutu Dengan Cara Penggabungan Dengan PTS Lain Target : 94,73 Realisasi : 96,49 Capaian : 101,85
IKK 2.1. Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi Target : 26 % Realisasi : 31,57 % Capaian : 121,42 %	IKK 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menafakan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi Target : 4,60 % Realisasi : 4,44 % Capaian : 96,57 %
IKK 2.3. Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi Target : 51 % Realisasi : 61,40 % Capaian : 120,39 %	
IKK 3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus Target : 43,26 % Realisasi : 56,14 % Capaian : 129,95 %	IKK 3.2. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra Target : 51 % Realisasi : 63,16 % Capaian : 123,84 %
IK 4.1. Predikat SAKIP Target : 88 Realisasi : 73,35 Capaian : Tercapai	IK 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Target : 92,50 % Realisasi : 99,05 % Capaian : 107,08 %

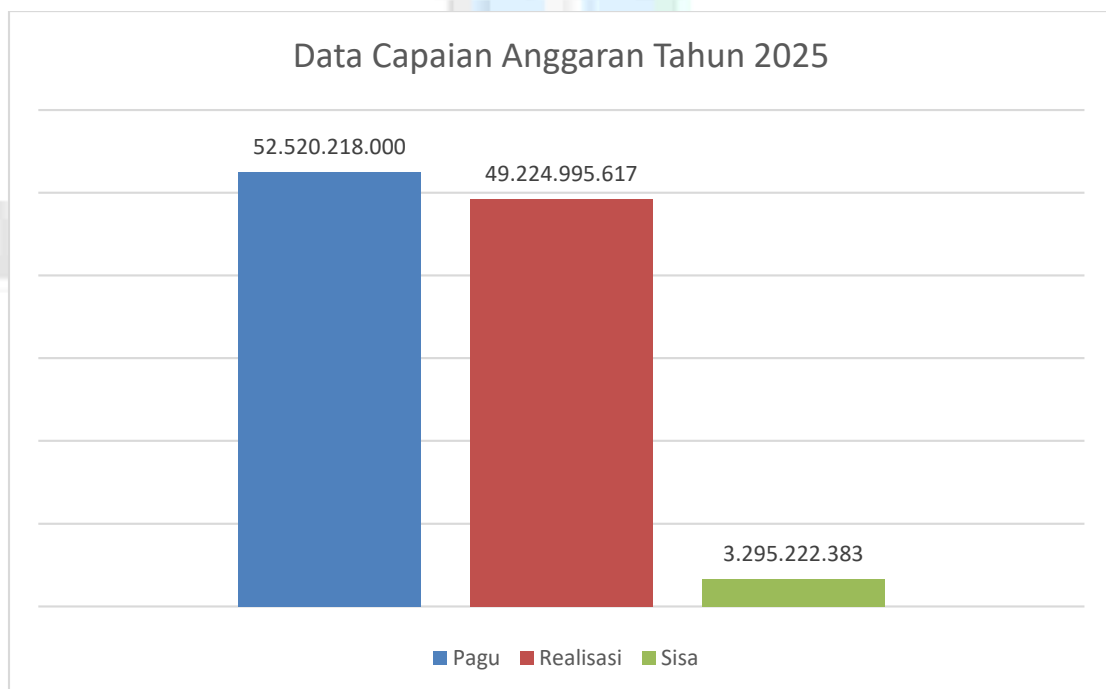
Sumber Data : Tim Perencanaan (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 2. Pencapaian Indikator Kinerja



Sumber Data : SAKTI : Tim Kerja Keuangan (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3. Realisasi Anggaran Tahun 202



Sumber Data : SAKTI : Tim Kerja Keuangan (Data Per 31 Desember 2025)

Grafik 1. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran selama tahun 2025 mengalami peningkatan, hal tersebut seiring dengan peningkatan target/sasaran program prioritas Kemdiktisaintek.

Permasalahan Umum

1. Kendala Layanan Eksternal Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai, Adanya ketidaksesuaian data dan Sistem aplikasi belum terintegrasi.
2. Masalah teknis yaitu koneksi jaringan sering kali menyebabkan akses masuk ke aplikasi SINDE, e-SKP dan aplikasi terkait layanan.
3. Kendala teknis dimana akses lambat atau server sering mengalami overload, terutama pada masa open tipe periode 1 dan 2 karena tingginya jumlah pengguna secara bersamaan, error sistem atau bug aplikasi dan gangguan koneksi internet
4. Sumber Daya Manusia di perguruan tinggi swasta yang kurang mumpuni.
5. Kemampuan keuangan PTS yang kurang memadai untuk kesiapan Akreditasi ke LAM.
6. Kurangnya koordinasi antar program studi atau perguruan tinggi
7. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur digital
8. Kurangnya motivasi dan pemahaman mahasiswa/ tenaga kependidikan
9. Kurangnya pemahaman dan informasi
10. Masalah manajemen waktu
11. Keterbatasan biaya dan dukungan fasilitas
12. Rendahnya kepercayaan diri
13. Minimnya pemahaman dan kesadaran di beberapa Perguruan Tinggi tentang pentingnya pencegahan kekerasan pada Perguruan Tinggi.
14. belum memperoleh pendanaan atau belum dapat meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian & pengabdian di luar kampus.
15. PTS belum memahami dan memiliki akun LAPORKERMA
16. Perguruan tinggi belum sepenuhnya memahami bahwa data yang digunakan untuk capaian indikator kegiatan dosen berkegiatan diluar kampus berasal dari laporan kegiatan penelitian, laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan riwayat pekerjaan yang tercatat pada laman SISTER.
17. Pengisian data terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di laman SINTA, serta riwayat pekerjaan di laman SISTER belum lengkap dan perlu dilengkapi agar memenuhi ketentuan yang berlaku.
18. Banyak Pegawai LLDIKTI yang belum memahami pekerjaan yang mendukung IKU LLDIKTI XV.
19. Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, karena sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga memerlukan percepatan realisasi.
20. Penyesuaian jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sebagai dampak dari dinamika kebijakan dan kondisi lapangan.
21. Proses administrasi keuangan yang lebih intensif, khususnya pada tahap akhir tahun anggaran, sehingga memerlukan koordinasi dan ketelitian lebih tinggi.

Langkah Antisipatif

1. Penguatan kualitas pelayanan, peningkatan komunikasi dan pendampingan serta komitmen perbaikan yang berkelanjutan untuk tahun berikutnya, LLDIKTI XV berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan publik yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan pengguna, sehingga mampu mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan memuaskan bagi seluruh perguruan tinggi di wilayah binaan.
2. Penguatan pendampingan teknis dan bimbingan berkala dari LLDIKTI XV kepada operator PTS, optimalisasi infrastruktur server dan bandwidth sistem PDDIKTI untuk mengantisipasi lonjakan akses dan peningkatan koordinasi antara LLDIKTI XV, PTS dan Operator PDDIKTI untuk mempercepat penyelesaian kendala teknis.
3. Membangun koordinasi dengan Tim Kerja lain yang bertindak sebagai support sistem terhadap kerja Tim Kelembagaan.

4. Pendampingan dan Evaluasi kinerja Perguruan Tinggi yang berkelanjutan.
5. Melakukan pertemuan secara daring dengan beberapa PTS yang memiliki prodi berpotensi menuju unggul.
6. Penguatan infrastruktur digital
7. Peningkatan partisipasi mahasiswa dan kapasitas tendik
8. Sosialisasi dan pendampingan insentif
9. Manajemen waktu dan beban studi
10. Dukungan finansial dan fasilitas
11. Penguatan mental dan motivasi
12. Setiap minggu akan dilakukan pendampingan didalam grup untuk progress pembentukan Satgas PPKPT.
13. melakukan Pendampingan dan Asistensi Teknis (Capacity Building) melalui program yang disarankan yaitu Workshop Penyusunan Proposal Penelitian & PkM sesuai panduan DRTPM, Mentoring intensif (coaching clinic) oleh reviewer nasional, Bimbingan penulisan luaran (HKI, artikel, produk, modul, policy brief).
14. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat SAKIP Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan.
15. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknik Penggunaan Aplikasi LAPORKERMA dan melakukan verifikasi PTS yang belum memiliki akun LAPORKERMA.
16. LLDikti Wilayah XV menginformasikan kepada perguruan tinggi melalui surat resmi mengenai pemukathiran data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada laman SINTA dan pengisian riwayat Pendidikan pada laman SISTER.
17. LLDikti Wilayah XV memberikan dukungan teknis secara langsung kepada perguruan tinggi yang mengalami kendala dalam pengisian data. Layanan bantuan ini mencakup asistensi terkait masalah teknis di laman SINTA dan SISTER serta perbaikan data yang kurang akurat atau tidak lengkap.
18. Menghimbau para pimpinan perguruan tinggi untuk lebih proaktif sehingga dapat memotivasi dosen untuk meningkatkan Tridharma di luar kampus.
19. Menerapkan pemberian Reward dan Punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja baik secara perorangan maupun tim kerja
20. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, penyesuaian jadwal secara fleksibel, serta monitoring realisasi anggaran secara intensif.
21. Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal serta melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran secara cepat dan tepat.
22. Penguatan koordinasi antar tim kerja, penjadwalan penyelesaian administrasi lebih awal, serta peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi dokumen keuangan
23. Berikan apresiasi khusus kepada Tim/Kegiatan yang realisasinya tepat waktu dan outputnya berkualitas.
24. Upaya LLDIKTI XV dalam menghadapi kendala ini termasuk evaluasi kinerja anggaran secara berkala, koordinasi dengan KPPN Kupang, dan penyesuaian perencanaan anggaran agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat di tahun 2025.



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

BAB I

Pendahuluan

Gambaran Umum

Dasar Hukum

Tugas, Fungsi dan
Struktur Organisasi

Isu - Isu Strategis dan Peran
Strategis Organisasi



DIKLAT SAINSTEK
BERDAMPAK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Perkembangan Koordinasi Perguruan Tinggi yang kini dikenal dengan nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968. Melalui keputusan tersebut dibentuk Koordinator Perguruan Tinggi (KOPERTI) yang berfungsi sebagai aparatur konsultatif bagi Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan di daerah. Seiring meningkatnya jumlah pendirian perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975 yang memperjelas ruang lingkup tugas Koordinator Perguruan Tinggi untuk lebih berfokus pada pelayanan kepada perguruan tinggi swasta. Atas dasar keputusan tersebut, KOPERTI berubah menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS).

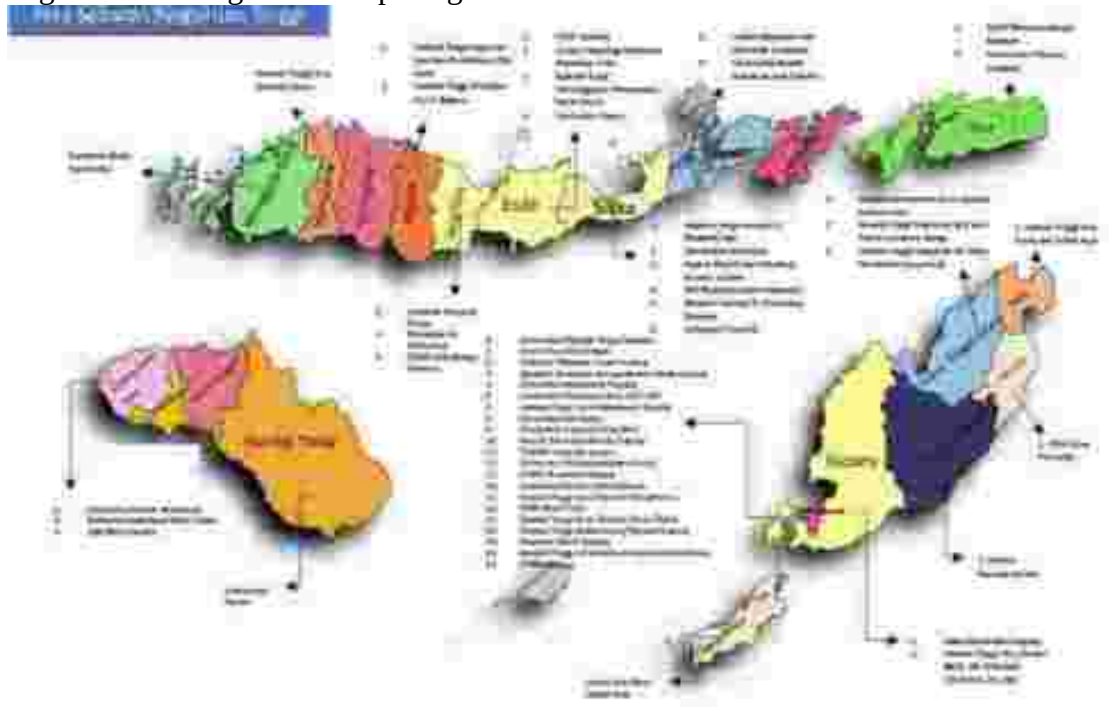
Dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika pengelolaan perguruan tinggi swasta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 062/O/1982 dan Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990 mengenai Organisasi dan Tata Kerja KOPERTIS. Keputusan ini tidak hanya mengatur struktur organisasi dan tata kerja KOPERTIS, tetapi juga menetapkan pembagian wilayah kerja menjadi 12 wilayah, yakni: Wilayah I (Medan), Wilayah II (Palembang), Wilayah III (Jakarta), Wilayah IV (Bandung), Wilayah V (Yogyakarta), Wilayah VI (Semarang), Wilayah VII (Surabaya), Wilayah VIII (Bali), Wilayah IX (Ujung Pandang), Wilayah X (Padang), Wilayah XI (Banjarmasin), dan Wilayah XII (Ambon).

Seiring terus berkembangnya jumlah dan kebutuhan perguruan tinggi swasta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 42 Tahun 2013 yang kembali menata wilayah kerja KOPERTIS menjadi 14 wilayah, dengan penambahan Wilayah XIII (Aceh) dan Wilayah XIV (Papua).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI), nama KOPERTIS secara resmi diubah menjadi LLDIKTI, serta jumlah wilayah kerja bertambah menjadi 15 wilayah. yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah layanan LLDIKTI Wilayah VIII. Perubahan bentuk menjadi LLDikti mengakibatkan bertambahnya kewenangan yang dimiliki. Sebelumnya LLDikti hanya berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi Swasta, saat ini juga berkoordinasi juga dengan Perguruan Tinggi Negeri. Selain itu, ada beberapa kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Vokasi yang diserahkan kepada LLDikti. Hal ini membuat tantangan yang dihadapi LLDikti ke depan makin besar. Pada tahun 2021 terbit Permenristekdikti Nomor 35 Tahun 2021, pembinaan LLDikti secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jendral Pendidikan Vokasi dan secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam penyelenggaraan pendidikantinggi.

LLDIKTI Wilayah XV berkedudukan di Kota Kupang tepatnya Jalan Taebenu, RT. 007/RW. 003, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dan mencakup wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari satu Gedung utama dengan 2 lantai sebagai unit layanan terpadu (ULT), ruang pimpinan, ruang kerja, ruang rapat, musola selain itu juga terdapat satu Gedung tambahan dengan dua lantai sebagai tempat pertemuan, saat ini LLDikti

Wilayah XV di pimpin oleh Prof. Dr. Adrianus Amheka, ST., M.Eng. Pada Akhir tahun 2023 LLDikti Wilayah XV memiliki mitra PTS sebanyak 57 Perguruan Tinggi yang terdiri dari berbagai bentuk dengan rincian pada gambar 1.1 dan tabel 1.1:



Sumber Data : Tim Kerja Kelembagaan (data per 31 Desember 2025)

Gambar 1.1. Peta Persebaran PTS di Wilayah LLDikti XV Tahun 2025

Tabel 1.1. Perkembangan PTS di Lingkungan LLDikti Wilayah XV Tahun 2025

No	Bentuk PT	Jumlah	
		Tahun 2024	Tahun 2025
1	<u>Universitas</u>	17	17
2	Institut	6	6
3	Sekolah Tinggi	23	23
4	Akademik	7	7
5	Politeknik	4	4
Jumlah		57	57

Sumber Data : Tim Kerja Kelembagaan (data per 31 Desember 2025)

Perguruan Tinggi yang menjadi mitra LLDikti Wilayah XV tahun 2025 sebanyak 57 PTS tersebar pada beberapa zona di wilayah Nusa Tenggara Timur (Zona Timor, Zona Flores, Zona Sumba, Zona Rote dan Zona Alor) dengan rincian pada tabel 1.2:

Tabel 1.2. Jumlah PTS di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025

No	Bentuk PT	Jumlah PT (Nusa Tenggara Timur)				
		Zona Timor	Zona Flores	Zona Sumba	Zona Alor	Zona Rote
1	Universitas	8	4	3	1	1
2	Institut	2	4	-	-	-
3	Sekolah Tinggi	16	7	-	1	-
4	Akademik	5	1	-	-	-
5	Politeknik	-	3	1	-	-
Jumlah		31	19	4	2	1

Sumber Data : Tim Kerja Kelembagaan (data per 31 Desember 2025)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebaran PTS paling tinggi di zona Timor sedangkan paling rendah di zona Rote.

Sedangkan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang merupakan mitra LLDikti Wilayah XV pada tahun 2025 terdiri dari 6 PT dengan rincian pada tabel 1.3:

Tabel 1.3. Daftar PTN di Lingkungan LLDikti Wilayah XV Tahun 2025

No	Nama PTN
1	Universitas Nusa Cendana
2	Politeknik Negeri Kupang
3	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
4	Politeknik Kesehatan Kupang
5	Universitas Timor
6	Institut Agama Kristen Negeri Kupang
7	Universitas Pertahanan
8	Sekolah Tinggi Perikanan

Sumber Data : LLDikti XV (data per 31 Desember 2025)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, LLDikti Wilayah XV didukung sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen) dengan status PNS yang ditugaskan pada Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LLDikti Wilayah XV dengan rincian pada tabel 1.4:

Tabel 1.4. Sebaran dan Jumlah Dosen PNS Tahun 2025

No	Bentuk PT	Jumlah
1	Universitas	12
2	Akademik	2
Total		14

Sumber Data : Tim Kerja Sumber Daya (data per 31 Desember 2025)

Selain dosen PNS, di lingkungan LLDikti Wilayah XV juga terdapat dosen Non PNS dengan jumlah yang besar, rincian pada tabel 1.5:

Tabel 1.5. Sebaran Jumlah Dosen Non PNS Tahun 2025

No	Bentuk PT	2025
1	<u>Universitas</u>	2238
2	Institut	224
3	Sekolah Tinggi	516
4	Akademik	71
5	Politeknik	109
Total		3158

Sumber Data : Tim Kerja Sumber Daya (data per 31 Desember 2025)

Selama tahun 2024/2025 jumlah Dosen Non PNS LLDikti Wilayah XV mengalami Kenaikan. Hal ini disebabkan karena program studi baru atau yang sudah berjalan wajib memiliki jumlah dosen tetap minimum (paling sedikit 5 orang, dengan minimal 3 dosen tetap dari perguruan tinggi pengusul) untuk memenuhi syarat akreditasi dari BAN-PT dan perguruan tinggi sering mengandalkan dosen tidak tetap atau dosen tambahan karena alasan fleksibilitas finansial dan operasional, yang secara keseluruhan turut menambah jumlah total tenaga pendidik, meskipun statusnya berbeda dari dosen tetap.

Dosen sebagai salah satu motor penggerak tridharma perguruan tinggi memainkan peran yang sangat penting. Dosen selalu didorong untuk memiliki jenjang jabatan akademik. Jenjang jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. Jenjang jabatan akademik merupakan jabatan keahlian dengan jenjang tingkatan dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, serta Guru Besar. Sebaran dan jumlah jenjang jabatan akademik yang dimiliki dosen di lingkungan LLDikti Wilayah XV dengan rincian pada tabel 1.6

Tabel 1.6. Sebaran dan Jumlah Dosen Berdasarkan Jenjang Jabatan Akademik Tahun 2025

No	Jenis PT	Jumlah				
		GB	LK	L	AA	TP
1	<u>Universitas</u>	11	51	839	839	636
2	Institut	-	2	42	82	98
3	Sekolah Tinggi	-	9	101	158	248
4	Akademik	-	-	4	24	43
5	Politeknik	-	-	6	26	77
Total		11	62	992	991	1102

Sumber Data : Tim Kerja Sumber Daya (data per 31 Desember 2025)

Jabatan Akademik didapatkan bagi dosen yang sudah berstatus tetap. Semua dosen baik PNS maupun Non PNS didorong untuk memiliki jabatan akademik yang mendukung karirnya. Jumlah dosen dengan status tenaga pengajar pada tahun 2025 sebesar 3.156 orang, jumlah ini naik sebesar 17,8% dibandingkan jumlah tahun 2024.

Jumlah mahasiswa yang berada di lingkungan LLDikti Wilayah XV juga cukup besar. Sebaran dan jumlahnya dengan rincian pada tabel 1.7:

Tabel 1.7. Sebaran dan Jumlah Mahasiswa Tahun 2025

No	Jenis PT	Jumlah
1	<u>Universitas</u>	64.859
2	Institut	4.244
3	Sekolah Tinggi	14.750
4	Akademik	1.413
5	Politeknik	2.886
Total		88.152

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan (data per 31 Desember 2025)

Selain dosen, LLDikti Wilayah XV juga memiliki tenaga administrasi yang bestatus PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu, yang seluruh penempatannya di bawah kantor LLDikti XV, dengan rincian pada tabel 1.8:

Tabel 1.8. Jumlah dan Golongan Tenaga ASN Tahun 2025

No	Golongan	Tahun 2025
1	II	4
2	III	20
3	IV	10
4	PPPK	25
5	PPPK Paruh Waktu	3
6	PPNPN	-
Total		62

Sumber Data : Tim Kerja Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana (data per 31 Desember 2025)

Tenaga Administrasi di lingkungan LLDikti XV memiliki tingkat Pendidikan yang beragam setiap tahunnya tenaga administrasi selalu didorong untuk meningkatkan kompetensi dengan rincian pada tabel 1.9 dan 1.10.

Tabel 1.9. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang	Tahun 2025
1	S3	2
2	S2	14
3	S1	13
4	DIII	1
5	SMA	4
Total		34

Sumber Data : Tim Kerja Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana (data per 31 Desember 2025)

Tabel 1.10. Jumlah PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Jenjang	Tahun 2025
1	S3	-
2	S2	-
3	S1	18
4	DIV	1
5	DIII	1
	SMA	5
Total		25

Sumber Data : Tim Kerja Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana (data per 31 Desember 2025)

Untuk mendukung aktifitas di lingkungan LLDikti Wilayah XV Pada tahun 2025, serta menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan pegawai yang bekerja dan stakeholder yang berkunjung ke kantor LLDikti XV terdapat juga pegawai *outsourcing* yang berada di bawah naungan perusahaan yang berkerjasama dengan LLDikti XV, dengan rincian pada tabel 1.11.

Tabel 1.11. Jumlah Pegawai *Outsourcing* Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	3
2	Driver	1
3	Security	2
4	Cleaning Service	5
Total		11

Sumber Data : Tim Kerja Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana XV (Data Per 31 Desember 2025)

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi dasar acuan pembuatan laporan kinerja antara lain:

1. Pasal 57 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, jo. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 412/P/2022 tentang Rincian Tugas Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
12. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nomor 3567/LL15/PR.07.04/2025 tanggal 13 Desember 2024 Tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja (lakin) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun Anggaran 2025;.
13. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Nomor 0145/LL15/PR.07.04/2026 tanggal 21 Januari 2026 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Tim Reviu Laporan Kinerja (lakin) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun Anggaran 2025.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas

Sesuai Permendikdisaintek Nomor 01 Tahun 2024 LLDikti Wilayah XV mempunyai tugas Melaksanakan Fasilitas, Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi pada PTS di wilayah kerja provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

2. Fungsi

LLDikti Wilayah XV Mempunyai fungsi sesuai Permendikdisaintek Nomor 01 Tahun 2024 sebagai berikut:

- Fasilitas peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi
- Pembinaan kelembagaan dan tata kelola perguruan tinggi
- Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi
- Fasilitas dan pembinaan sumber daya manusia Pendidikan tinggi
- Fasilitas penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- Pengelolaan dan pemanfaatan data Pendidikan tinggi
- Fasilitas implementasi kebijakan nasional Pendidikan tinggi
- Pelaksanaan administrasi dan tata kelola internal

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LLDikti Wilayah XV telah ditetapkan berdasarkan Permendiktisaintek Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi terdiri atas Kepala, Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4:



Sumber Data : Permediktisaintek Nomor 01 Tahun 2024

Gambar 1.2. Struktur Organisasi LLDikti sesuai Permediktisaintek Nomor 01 Tahun 2024

Dalam menghadapi dinamika tantangan organisasi dan upaya optimalisasi efektivitas tata kelola, dilakukan harmonisasi struktur organisasi pada awal tahun 2025, dengan ekspektasi mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada, meliputi:



Gambar 1.3. Struktur organisasi LLDikti Wilayah XV

D. Isu – Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu – Isu Strategis/Permasalahan

Berbagai isu strategis yang diidentifikasi di tahun 2024, antara lain:

- Terdapat perubahan peraturan yang berkaitan dengan Satgas PPKS yang telah terbentuk, dimana awalnya berpedoman kepada Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, menjadi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Perguruan Tinggi yang telah rilis pada bulan Oktober tahun 2024, sehingga membutuhkan penyesuaian kembali sesuai dengan peraturan terbaru pada tahun 2025 nantinya;
- Masih Terdapat kesenjangan mutu antar perguruan tinggi, khususnya pada capaian akreditasi, kualitas pembelajaran dan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah.
- Belum optimalnya tata kelola kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemanfaatan data (PDDIKTI, SISTER) sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Keterbatasan jumlah dan kualitas dosen, khususnya pada jabatan fungsional tinggi, sertifikasi dosen, serta kompetensi dosen di bidang riset dan inovasi.
- Riset dan inovasi di perguruan tinggi belum optimal dalam mendukung penyelesaian masalah nyata dan pembangunan berbasis potensi daerah.
- Belum maksimalnya kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan daerah, terutama melalui pengabdian kepada masyarakat dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta dunia usaha.

- Masih terdapat keterbatasan akses Pendidikan tinggi yang bermutu, serta adanya perguruan tinggi yang tidak berkelanjutan secara kelembagaan dan akademik.
- Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, tata kelola dan layanan pendidikan tinggi belum optimal dan belum terintegrasi secara menyeluruh.

2. Peran Strategis

Peran strategis sebagaimana diuraikan di atas dijabarkan menjadi sasaran strategis yang perlu dicapai di tahun 2025. Sasaran strategis tersebut adalah:

- Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi Berkualitas.
- Peningkatan Pencapaian Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi.
- Peningkatan Kapasitas Talenta Riset, Sains dan Teknologi.
- Peningkatan Produktivitas Kelembagaan IPTEK dan Inovasi.
- Peningkatan Kualitas Kebijakan Nasional Bidang Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Berbasis Riset.
- Peningkatan Tata Kelola Kementerian yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- Peningkatan akreditasi perguruan tinggi.
- Peningkatan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Penganggaran berbasis kinerja.



LLDIKTIWILAYAH XV



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

BAB II

Perencanaan Kinerja

Visi dan Misi

Rencana Strategis Jangka
Menengah

Tujuan Strategis

Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

Program Prioritas



DIKLAT SAITEK
BERDAMPAK

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Dan Misi

1. Visi

LLDIKTI Wilayah XV merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Eselon II di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang memiliki visi pelayanan mengacu pada Visi Kemendiktisaintek 2025-2029, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2025-2029, serta Visi Indonesia 2045, yakni : **Terwujudnya Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia emas 2045.** Untuk secara aktif melibatkan dan mengakomodasi keberagaman individu, kelompok, dan perspektif, dengan memastikan kesetaraan akses, kesempatan dan partisipasi bermakna bagi semua pihak tanpa diskriminasi.

2. Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kemendiktisaintek sesuai tugas dan kewenangan, kemendiktisaintek menetapkan 3 misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pemerataan akses Pendidikan Tinggi berkualitas.
- Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat.
- Mewujudkan tata kelola Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang berintegritas.

Untuk mewujudkan tercapainya misi tersebut, maka LLDikti Wilayah XV melaksanakan berbagai program/kegiatan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

- Melakukan pemetaan mutu pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
- Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
- Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur.
- Melaksanakan fasilitasi kesiapan perguruan tinggi dalam penjaminan mutu eksternal di Nusa Tenggara Timur.
- Melakukan pengelolaan data dan informasi di bidang mutu pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur.
- Melaksanakan administrasi LLDIKTI secara akuntabel.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

1. Landasan Penyusunan rencana kinerja jangka menengah LLDikti XV tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LLDikti XV dalam memfasilitasi, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan tinggi swasta di provinsi nusa tenggara timur. Rencana kinerja jangka menengah ini diselaraskan dengan arah kebijakan nasional ditetapkan dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang arah kebijakan dan rencana kinerja kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
2. Arah kebijakan rencana kinerja jangka menengah LLDikti XV mengacu pada kepmen 210/M/2023, arah kebijakan rencana kinerja jangka menengah LLDikti XV difokuskan pada :
 - Peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan tinggi.
 - Penguatan tata kelola dan akuntabilitas perguruan tinggi.

- Penguatan sumber daya manusia Pendidikan tinggi.
 - Peningkatan kualitas riset dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Pemerataan akses dan keberlanjutan perguruan tinggi.
 - Transformasi digital dan penguatan sistem berbasis data.
3. Tujuan Jangka Menengah : Mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi swasta di wilayah provinsi nusa tenggara timur yang bermutu, relevan, akuntabel, berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, sejalan dengan visi kemdiktisaintek.
4. Sasaran Strategis Jangka Menengah
- Meningkatnya mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi
 - Menguatnya tata kelola dan kepatuhan regulasi PTS
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pendidikan tinggi
 - Meningkatnya kontribusi penelitian dan pengabdian
 - Terwujudnya keberlanjutan dan pemerataan akses pendidikan tinggi
 - Terwujudnya tata kelola berbasis digital dan data

C. Tujuan Strategis

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam mencapai Tujuan Strategis Kemdiktisaintek, LLDIKTI Wilayah XV sebagai Unit Pelaksana Teknis Eselon II di bawah Kemdiktisaintek yang mengemban tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, memiliki tujuan, yakni :

Tabel 2.1. Tujuan LLDikti Wilayah XV pada tahun 2025 – 2029

No.	Tujuan
1.	Meningkatnya Perluasan Akses Pendidikan Tinggi Yang Bermutu
2.	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Lulusan Pendidikan Tinggi
3.	Meningkatnya Kontribusi Sains, Teknologi Dan Inovasi Yang Berdampak Dan Berdaya Saing
4.	Menguatnya Tata Kelola Pendidikan Tinggi, Sains Dan Teknologi Yang Parsipatif, Transparan Dan Akuntabel

Renstra LLDikti XV menyacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan dalam bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. LLDikti XV sendiri mulai menyusun draft renstra pada bulan oktober dan pada tahun 2025 IKU LLDikti sendiri masi mengikuti sesuai dengan Kepmendikbud Ristek Nomor 210 Tahun 2023, berdasarkan draft renstra terget jangka menengah LLDikti Wilayah XV, dengan rincian pada tabel 2.2:

D. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

1. Perjanjian Kinerja Awal

Pada tahun 2025 masi menggunakan perjanjian kinerja sesuai dengan Kepmendikbudrisitek Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU), perjanjian kinerja LLDikti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	98
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,73
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	26
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,6
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	51
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43,2
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	51
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,5

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	139.03.DK	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 38.358.416.000,-
2	139.03.WA	Pengelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 14.161.802.000,-
Total Jumlah Pagu			Rp. 52.520.218.000,-

Setelah ditetapkan DIPA dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun anggaran 2025, terjadi berbagai dinamika yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap anggaran LLDikti Wilayah XV yaitu pada:

- b. Program Pendidikan Tinggi
 - Terdapat kelebihan anggaran pada komponen Tunjangan Profesi dan Kehormatan Dosen Non PNS sebesar Rp 4.000.000.000 (*empat miliar*).
 - Penghematan belanja perjalanan dinas Kementerian/Lembaga TA 2025 sesuai instruksi presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dan pelaksanaan ABN dan ABD tahun 2025. Langkah - Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2025 sehingga pagu anggaran diblokir sebanyak Rp 2.572.442.000 (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ratus Ribu)
- c. Program dukungan manajemen
 - Terdapat penambahan anggaran pada komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.163.181.000 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu).

2. Perjanjian Kinerja Akhir/Revisi

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Akhir/Revisi Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	98
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,73
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	26
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,6
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	51
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43,2
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	51

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,5

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Tahun 2025

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	139.03.DK	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi	Rp. 38.358.416.000,-
2	139.03.WA	Pengelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	Rp. 14.161.802.000,-
Total Jumlah Pagu			Rp. 52.520.218.000,-

Pada awal tahun 2025 LLDikti Wilayah XV mendapatkan total pagu sebesar Rp. 53.333.851.000 dan mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp 3.389.085.000 sehingga total pagu akhir sebesar Rp. 49,944,766,000.

3. Matriks Kinerja

Renstra LLDikti XV menyacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan dalam bidang pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang hendak dicapai pada periode 2025-2029. LLDikti XV sendiri mulai menyusun draft renstra pada bulan oktober dan pada tahun 2025 IKU LLDikti sendiri masi mengikuti sesuai dengan Kepmendikbud Ristek Nomor 210 Tahun 2023, berdasarkan draft renstra target jangka menengah LLDikti Wilayah XV, dengan rincian pada tabel 2.6:

Tabel 2.6. Sasaran dan Indikator Kinerja Draft Renstra Periode 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	98
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,73
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	26
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,6
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	51
	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan	43,2

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	51
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,5

Draft Renstra ini telah menjabarkan tujuan dan sasaran LLDikti Wilayah XV beserta visi dan misi Kemendikbudristek dan sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi. Oleh karena itu, Renstra LLDikti Wilayah XV menggambarkan secara jelas keterkaitan antara tujuan dan sasaran LLDikti Wilayah XV, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra LLDikti Wilayah XV digunakan sebagai pedoman dan arah dalam proses peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hendak dicapai pada periode 2025 – 2029 baik bagi unit kerja di lingkup LLDikti Wilayah XV, ataupun sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

E. Program Prioritas

Dalam mendukung program prioritas Kemdiktisaintek, maka LLDikti XV melalui program KKN TEMATIK. Adapun program prioritas yang dilakukan oleh LLDikti Wilayah XV, dengan rincian pada tabel 2.8 :

Tabel 2.7. Program prioritas Tahun 2025

No	Nama Program Prioritas	Target 2025	Realisasi 2025	Alokasi Anggaran 2025
1	Rapat Koordinasi Konsorsium Pendidikan Tinggi Kosabangsa dan Pelaksanaan Program KKN Tematik	18 PTS	18 PTS	179.781.000
2	Program KKN Tematik: Penanggulangan Stunting dan Penurunan Kemiskinan Ekstrem	25 Desa	25 Desa	805.154.000

- a. Rencana Kerja dan Anggaran
Sebagai pengguna anggaran LLDikti XV, menyusun rencana kerja pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.8. Rencana Kerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025	Program Kegiatan	Anggaran
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	98	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi	456.277.000
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,73	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi/	227.349.000
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	26	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi	743.623.000
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,6	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi	77.850.000
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	51	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi	40.300.000
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43,2	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi	50.821.000
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja	51	139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi	130.832.000

	dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra			
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	- 139.03.DK Program Pendidikan Tinggi 139.03.WA Program Dukungan Manajemen/6392 Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	149.700.000
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,5	- 139.03.DK - Program Pendidikan Tinggi 139.03.WA - Program Dukungan Manajemen/6392 Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi	49.944.776.000



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Inovasi, Penghargaan, dan Program
crosscutting/Collaborative



DIKTI SAINTEK
BERDAMPAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai Permendikbudristek Nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) salah satu bagian penting dalam kinerja instansi pemerintah adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran dalam arah pencapaian visi dan misi unit kerja di atasnya. Dalam mengukur kinerja, diperlukan sebuah indikator kinerja yang berorientasi pada hasil.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah disusun Indikator Kinerja pada LLDikti yang tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja utama PTN dan LLDikti. LLDikti Wilayah XV telah menetapkan target kinerja dan realisasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja di tahun 2025, dengan menetapkan 4 Sasaran Strategis (SS) dan 9 indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja LLDIKTI XV Tahun 2025

Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi	Capaian
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	98	98,1	100,10
	[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94,73	96,49	101,85
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	26	31,57	121,42
	[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,6	4,44	96,57
	[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	51	61,40	120,39

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	43,2	56,14	129,95
	[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	51	63,16	123,84
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	BB	BB	BB
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,50	99,05	107,08

Sumber Data : LLDikti XV



LLDIKTI WILAYAH XV

Tabel 3.2 Kolaborasi Pencapaian IKU Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Data Dukung yang Perlu Disiapkan	Penanggung Jawab
1	[S.1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	[1.1] Kepuasan pengguna layanan terhadap layanan utama LLDIKTI	%	98	1. Verifikasi dan Validasi Ijazah 2. Usul penggantian personil PDP 3. Usul pembatalan PIN 4. Usulan akun verifikator Sinta PT 5. Usulan perubahan afiliasi dosen di Sinta 6. Pelaporan Wisuda 7. Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS (Inpasing pertama) 8. Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS Golongan III 9. Layanan Penetapan inpasing pangkat dosen Non PNS dengan pangkat PNS Golongan IV. 10. Izin belajar bagi dosen Dipekerjakan (DPK) 11. Kenaikan Pangkat/Golongan Dosen PNS (DPK) 12. Tugas belajar Dosen PNS DPK 13. Konsultasi 14. Pengaduan Pelayanan Publik, 15. Alih kelola PTS	• Tim kerja Peningkatan Mutu Kelembagaan • Tim kerja Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan • Tim kerja Fasilitasi Peningkatan Mutu SDM, Penelitian dan PKM • Penanggungjawab HKTL-Humas • Penanggungjawab PPA-EPL, Sistem Informasi • Penanggungjawab Keuangan dan Perbendaharaan • Penanggungjawab RTPK-BMN

					16. Perubahan nama Badan penyelenggara PTS 17. Pendirian PTS 18. Perubahan bentuk PTS 19. Pembukaan Program Studi baru 20. Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen 21. Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana PT 22. Pendataan Saprasi PT 23. Rekomendasi Saprasi 24. Penerbitan surat rekomendasi migrasi data program studi pada PDDIKTI 25. Validasi pembukaan periode pelaporan pada PDDIKTI 26. Validasi perubahan data dosen pada PDDIKTI 27. Validasi Pindah Homepage pada PDDIKTI 28. Pengaktifan kembali studi lanjut 29. Pengusulan jabatan fungsional akademik dosen asisten ahli dan lektor. 30. Pengusulan jabatan fungsional akademik dosen Lektor dan Profesor	
--	--	--	--	--	--	--

		[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	%	94,73	• Data Persebaran PTS di Nusa Tenggara Timur • Data PTS Berdasarkan Bentuk • Data PTS Berdasarkan Akreditasi • Data PTS unggul, Baik Sekali, dan Baik untuk Akreditasi yang dilakukan dengan IAPS 4.0 dan IAPT 3.0. • Data Kriteria konsolidasi antar PTS dapat dilakukan melalui penggabungan dan penyatuan alih kelola serta memperhitungkan pula kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan antar perguruan tinggi. • Data Jumlah Mahasiswa per PTS di NTT • Data Kerjasama (untuk akreditasi dan implementasi MBKM)	• Tim kerja Peningkatan Mutu Kelembagaan • Tim kerja Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan • Penanggungjawab PPA-EPL, Sistem Informasi
2	[S.2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi	[2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	26	• Data Jumlah Mahasiswa per PTS di NTT • Data Kurikulum yang digunakan pada seluruh PTS di wilayah XV (KKNi dan MBKM) • Prestasi Berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional • Data Jumlah PTS yang	• Tim kerja Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan

					menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	
		[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	4.60	• Data Jumlah Mahasiswa per PTS di NTT yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi > 20 SKS • Data Jumlah Mahasiswa per PTS di NTT yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi > 10 SKS • Data Tracer Study seluruh PTS di NTT • Jumlah Mahasiswa Berprestasi Nasional • Jumlah Mahasiswa Berprestasi Provinsi • Data Mahasiswa dari PTS di NTT yang mengikuti Kompetisi Tingkat Nasional (PUSPRESNAS) • jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria • Data total jumlah mahasiswa di wilayah kerja NTT • Data RPL mahasiswa PTS lingkup LLDIKTI XV • Data SIMKATMAWA PTS Lingkup LLDIKTI XV	• Tim kerja Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan

		[2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	%	51	Jumlah PTS yang memiliki kebijakan anti 3 Dosa, Anti Korupsi dan Anti Narkoba	Penanggungjawab HKTL-Humas
3	[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	[3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	%	43.20	- Jumlah PTS yang lebih dari 20% Dosen berkegiatan di luar kampus dan membimbing mahasiswa serta praktisi. - Data Jumlah Dosen per PTS Di NTT - Jumlah Dosen berdasarkan Bentuk PTS - Jumlah Dosen berdasarkan Jabatan Fungsional - Data Dosen berdasarkan Kualifikasi Akademis	- Tim kerja Fasilitasi Peningkatan Mutu SDM, Penelitian dan PKM - Tim kerja kerjasama
		[3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	%	51	- Jumlah PTS yang lebih dari 30 % dari Program Studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra - Data jumlah PTS yang melaksanakan Kerjasama (untuk akreditasi dan implementasi MBKM)	- Tim kerja Peningkatan Mutu Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Tim kerja Kerjasama
4	[SK.4] Meningkatnya tata kelola Lembaga	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	BB	Data Pelaporan Kinerja pada Aplikasi SPASIKITA per Triwulan	Penanggungjawab PPA-EPL

	Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)					
		[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	92.50	Data Nilai Kinerja Anggaran (NKA), Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) per Triwulan	Penanggungjawab Keuangan dan Perbendaharaan



LLDIKTI WILAYAH XV

B. Capaian Kinerja Organisasi

Penjelasan terkait pencapaian kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

1. Sasaran 1 “Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Pendidikan Tinggi”

IKU 1.1 diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan Lembaga layanan Pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan, khususnya perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan dilaksanakan secara sistematis melalui penerapan standar pelayanan, penguatan tata kelola layanan, serta evaluasi kepuasan pengguna layanan secara berkala.

Sesuai Permendikbudristek Nomor 01 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja LLDikti, telah mengintegrasikan peningkatan kualitas layanan kedalam perencanaan kinerja, pengelolaan proses bisnis dan penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan prima. Dukungan kebijakan Kepmendikbudristek Nomor 412/0/2022 tentang rincian tugas LLDikti, tugas LLDikti adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Sesuai peraturan tersebut LLDikti didorong untuk memberikan layanan secara cepat, inovatif, fleksibel dan akuntabel baik secara teknis dan administratif sebagai jembatan dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Capaian IKU 1.1 ditunjukan melalui peningkatan nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilaksanakan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

“Meningkatnya Kualitas Layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)” menjadi sasaran LLDikti yang memiliki dua indikator kegiatan (IK) yaitu 1.1. Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti dan 1.2. Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain, dengan persentase capaian dari target sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Pendidikan Tinggi			
IKK 1.1. Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Utama LLDikti		IKK 1.2. Persentase PTS Yang Terakreditasi Atau Meningkatkan Mutu Dengan Cara Penggabungan Dengan PTS Lain	
TARGET	98	TARGET	94,73
REALISASI	98,1	REALISASI	90,49
CAPAIAN	100,10	CAPAIAN	101,85

Sumber Data : LLDikti XV

Gambar 3.1. Persentase Capaian IK 1.1 dan IK 1.2

a. Indikator Kegiatan (IK) 1.1. Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti

1. Definisi Operasional

Kepuasan pengguna merupakan indikator dalam pelayanan yang diberikan oleh LLDIKTI XV dalam hal seberapa puas seorang pelanggan terhadap pelayanan / produk yang mereka terima. Kepuasan terjadi ketika harapan pelanggan setara dengan layanan yang diberikan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kepuasana pelanggan maka dilakukan survei kepada pelanggan .

disamping itu LLDIKTI XV juga menyediakan kotak/saluran pengaduan untuk menyampaikan saran dan pendapat dari pelanggan. Layanan utama LLDIKTI yang dimaksud adalah layanan yang keunggulannya diukur dalam kategori yakni :

- Layanan akademik.
- Layanan Kelembagaan.
- Layanan PDDIKTI.
- Layanan terkait dosen dan tenaga kependidikan.
- Layanan terkait administrasi.

2. Cara perhitungan Indikator Kinerja

Tingkat kepuasan pengguna layanan berdasarkan hasil survey

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Keterangan :

n = Respon pengguna layanan LLDIKTI yang puas terhadap hasil layanan LLDIKTI.

t = total jumlah responden pengguna layanan LLDIKTI.

Instrument yang digunakan dalam indikator kegiatan ini adalah survei pelanggan sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

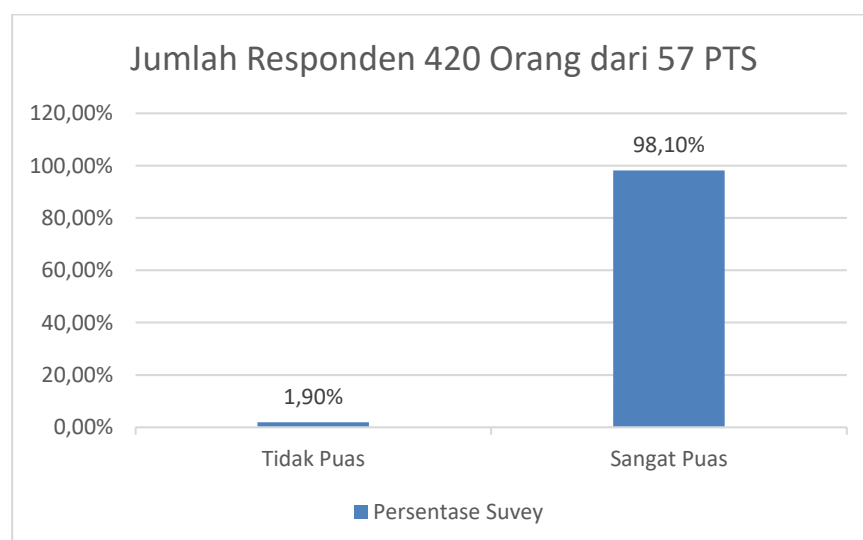
3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kinerja berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023.

Tabel 3.3. Capaian IK 1.1 Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).	Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti	98,1

Sumber Data : LLDikti XV



Sumber Data : Tim Kerja Humas (Data Per 31 Desember 2025)

Grafik 3.1. Nilai Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2025 survey kepuasan layanan mencapai 98,1 % , yang diperoleh dari 420 responden hal ini menunjukkan LLDikti Wilayah XV telah melewati target yang telah ditentukan sebelumnya. Survey kepuasan Layanan disebarkan dan dilekatkan melalui website LLDikti Wilayah XV (<https://lldikti15.kemdiktisaintek.go.id/>) yang diberikan dan disebarkan pada saat pelayanan tamu, Hotline whatsapp dan pada setiap kegiatan yang mengundang pemangku kepentingan LLDikti Wilayah XV sehingga unit dapat memperoleh keberagaman responden. Agar dapat memudahkan penyebaran survey tersebut, unit kerja membuat link singkat serta kode respon cepat yang mengarahkan pada laman. Link yang digunakan sebagai berikut <https://forms.gle/vnR9Wd6VadtWYzNQA> dan dipermudah dengan tampilan barcode.



Sumber Gambar : Tim Kerja Humas

Gambar 3.2. Barcode Pengisian Survey Kepuasan Layanan Tahun 2025

4. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 – 2025

Capaian indikator kegiatan pada tahun 2025 sebesar 98,1 % melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 98 %. Profil responden dapat dilihat pada gambar di bawah.

Tabel 3.4. Capaian IK 1.1 Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Utama LLDikti

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti	94	98	104,25%	98	98,1	100,10

Sumber Data : LLDikti XV

Capaian Indikator kegiatan pada tahun 2024 sebesar 98 % melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2024 sebesar 94 % dengan persentase capaian 104,25 % sedangkan di Tahun 2025 terdapat peningkatan yang cukup baik dan melampaui target sebesar 98,1 % yang dimana target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 98 % dengan persentase capaian 100,10 %. Capaian Indikator kegiatan tahun 2025 melebihi target akhir Renstra. Seperti yang terlihat sebagai berikut.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDikti dapat dicapai karena didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Standar pelayanan (SP) dan Prosedur Operasional Standar (POS)

Pada tahun 2025 LLDikti XV memiliki 9 SP dan POS 191 yang telah didigitalisasi, sehingga mudah dipahami dan diakses oleh stakeholder. Berdasarkan panduan SP yang dimiliki Oleh LLDikti Wilayah XV, layanan secara umum meliputi:

- Bagian Umum (Perencanaan, Keuangan, HKTLU dan BMN).
- Penjaminan mutu internal dan eksternal.
- Kerjasama.
- Peningkatan mutu pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Peningkatan Mutu Kelembagaan Pendidikan Tinggi.
- Peningkatan mutu Sumber Daya dan riset.
- Humas.
- Layanan PDDIKTI

b. Layanan Kepegawaian

Dalam Menjalan tugas dan fungsi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV tidak terlepas dari layanan kepegawaian. Layanan kepegawaian terdapat dua layanan yaitu layanan eksternal dan layanan internal.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara disebutkan bahwa setiap aparatur sipil negara (ASN) berhak untuk mendapat pelatihan kompetensi dalam rangka peningkatan kapabilitas dan profesionalitas ASN. Oleh karena itu LLDikti Wilayah XV menugaskan pegawai dalam rangka peningkata kompetensi pegawai, baik pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat Pendidikan dan pelatihan pegawai kementerian Pendidikan tinggi, sains dan teknologi serta melakukan pelatihan kompetensi secara mandiri. Berikut pelatihan yang diikuti oleh pegawai LLDikti Wilayah XV Bimtek penyusunan SKP, Webinar Pemetaan Jabatan Pelaksana dan Jabatan fungsional dan Pengembangan Kapasitas SDM. Melalui berbagai pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme pegawai, mendukung pencapaian kinerja organisasi, menyesuaikan kemampuan pegawai dengan perkembangan regulasi dan teknologi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempersiapkan pengembangan karier dan jenjang jabatan, meningkatkan disiplin, etika dan integritas aparatur serta mendorong adaptasi terhadap perubahan organisasi. Semuanya akan berdampak baik pada pelayanan LLDikti Wilayah XV.

Salah satu kegiatan yang mendukung layanan kepegawaian adalah Workshop Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada LLDikti Wilayah XV.

- Layanan Eksternal

1. Penerbitan SK Jabfung.
2. Penerbitan inpasing awal dan Pangkat.
3. Penerbitan Rekomendasi Tugas/Izin Belajar.



Sumber Data : Tim Kerja HKTL (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.3. Inpasing Pangkat dan Jabatan Fungsional Tahun 2025

- **Layanan Internal**

1. Proses penerbitan surat cuti pegawai berjumlah 6.
2. Kenaikan gaji berkala PNS berjumlah 12 orang PNS.
3. Penerbitan surat tugas.
4. Proses penarikan rekap uang makan dilakukan pada tanggal 01 di setiap bulannya.
5. Penarikan dan rekapun tunjangan kinerja yang bersumber dari penilaian SKP dan juga rekapun daftar kehadiran setiap tanggal 01 setiap bulannya.

c. **Layanan PDDIKTI**

Layanan PDDIKTI pada tahun 2025 berada di bawa naungan tim kerja perencanaan yang dimana melakukan beberapa layanan antara lain:

- Permohonan Akun PDDikti.
- Permohonan Kode Perguruan Tinggi.
- Pemrosesan Perubahan Data Mahasiswa Aktif.
- Pemrosesan Perubahan Data Mahasiswa Status Keluar/Alumni.
- Pengajuan Perubahan Data / Open Periode Tipe 2.
- Pengajuan Perubahan Data / Open Periode Tipe 1.
- Migrasi Data.
- Pelaporan Chek Point periode ganjil dan genap.

Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa layanan yang sudah dilakukan pada tahun 2025, rincian pada tabel 3.4:



Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.4. Layanan PDDIKTI Tahun 2025

d. Layanan Jabatan Fungsional Dosen

Berdasarkan Peraturan Menteri, perbandingan jumlah ideal dosen dengan mahasiswanya di perguruan tinggi swasta adalah satu banding 30 (1:30) untuk mata kuliah eksakta dan satu banding 45 (1 : 45) untuk sosial, dan Rasio dosen / mahasiswa yang ideal menurut Instrumen Akreditasi Institusi BAN-PT adalah 1 : 20 s/d 1 : 30. Adapun Rasio dosen dan mahasiswa harus ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan lembaga.



Sumber Data : SISTER : Tim Kerja Sumber Daya (Data Sister Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.5. Ratio Jumlah Dosen PTS di LLDIKTI XV

Jumlah dosen aktif tercatat sebanyak 3.158 orang, dengan 2.883 di antaranya merupakan dosen tetap, serta 1.188 dosen telah memiliki Sertifikasi Pendidik dan hanya 11 dosen yang berkualifikasi Profesor. Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagian besar dosen berpendidikan S2 sebanyak 2.719 orang, disusul oleh 297 dosen berpendidikan S3, sementara dosen berpendidikan S1 berjumlah 111 orang dan masih terdapat 15 dosen tanpa jenjang pendidikan yang memerlukan penataan lebih lanjut. Komposisi jabatan fungsional menunjukkan bahwa 1.102 dosen belum memiliki jabatan fungsional, 991 berada pada jenjang Asisten Ahli, 992 pada jenjang Lektor, 62 pada jenjang Lektor Kepala, dan 11 pada jenjang Profesor, sehingga menggambarkan struktur jabatan yang belum proporsional. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pemenuhan kualifikasi minimal dosen telah tercapai, institusi masih perlu melakukan upaya strategis untuk meningkatkan jumlah dosen berpendidikan S3, mempercepat proses kenaikan jabatan fungsional, serta memperluas kepemilikan Sertifikasi Pendidik guna memenuhi standar mutu akademik dan persyaratan akreditasi. Implementasi Program LLDIKTI XV juga mencakup proses akademik bagi tenaga kependidikan di perguruan tinggi untuk bisa mencapai jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping terus mendorong tenaga kependidikan memperoleh Sertifikasi Dosen sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan kesejahteraan dosen serta mendorong dosen untuk terus meningkatkan profesionalitasnya.

e. Pengelola Unit Layanan Terpadu

Dalam menjalankan komitmen untuk meningkatkan mutu Unit Layanan Terpadu (ULT), LLDikti Wilayah XV mengimplementasikan berbagai inovasi dan strategi. Penguatan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas dalam memberikan pelayanan menjadi fokus utama. Melalui pelayanan langsung atau daring, ULT LLDikti Wilayah XV senantiasa berusaha memberikan respon yang cepat dan akurat terhadap setiap kebutuhan dan pertanyaan dari perguruan tinggi. Cakupan layanan berupa layanan langsung yang diberikan pada tamu atau pemangku kepentingan secara tatap muka di ULT LLDikti Wilayah XV. Sedangkan layanan tidak langsung, merupakan layanan daring melalui layanan pesan dan telepon Hotline Whatsapp, layanan email persuratan, layanan pada LAPOR!, dan pesan personal pada sosial media.

Dengan menyampaikan informasi secara jelas dan tepat waktu, LLDikti Wilayah XV dapat memberikan arahan yang memadai kepada perguruan tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terbaru. Meskipun hasil SKM sangat positif, ada beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan ULT lebih lanjut:

1. Pengembangan sumber daya manusia, Terus melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk menjaga standar tinggi dalam pelayanan dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang layanan.
2. Peningkatan komunikasi, Meningkatkan komunikasi dengan pelanggan melalui berbagai saluran seperti email, media sosial, dan situs web untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat.
3. Monitoring dan evaluasi berkala, Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja dan kepuasan pelanggan untuk memastikan pelayanan yang terus ditingkatkan.

Layanan secara langsung di ULT LLDikti Wilayah XV pada tahun 2025 ditingkatkan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih representatif.

f. Pengelolaan Kanal Media

Pada tahun 2025 LLDikti XV telah memanfaatkan berbagai kanal media sosial, saat ini LLDikti XV menggunakan beberapa platform sebagai media publikasi informasi dan memberikan nilai tambah kepada penikmat kontennya.



Sumber Data : LLDikti XV

Gambar 3.6. Tampilan Kanal Media LLDikti Wilayah XV

Dengan memberikan nilai edukasi melalui konten yang disajikan, LLDikti Wilayah XV dapat lebih efektif dalam membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap layanan pendidikan tinggi yang diselenggarakan. Upaya untuk terus memperbarui konten dan menjaga kreativitas perlu dilanjutkan untuk mempertahankan pertumbuhan positif ini. Evaluasi yang rutin dapat membantu dalam mengukur dampak strategi komunikasi yang telah diimplementasikan.

Upaya untuk terus memperbarui konten dan menjaga kreativitas perlu dilanjutkan untuk mempertahankan pertumbuhan positif ini. Evaluasi yang rutin dapat membantu dalam mengukur dampak strategi komunikasi yang telah diimplementasikan.

g. Pengelolaan Website (<https://lldikti15.kemdiktisaintek.go.id/>)

Data yang disajikan merupakan hasil dari integrasi berbagai sumber data, diantaranya: PDDikti, SISTER, dan SPMI yang telah diolah sehingga menghasilkan data yang akurat serta sesuai kebutuhan dan kepentingan perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah XV.

1. **Tujuan :** untuk menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk siswa, orang tua, guru, dan masyarakat umum.
2. **Target view :** Mahasiswa, Dosen, Perguruan Tinggi, Orang Tua Mahasiswa, serta Masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, Kebijakan dan perkembangan terbaru di LLDikti Wilayah XV.
3. **Pesan :** penyampaian informasi yang aktual, faktual, dan terpercaya untuk menjaga masyarakat tetap terinformasi terkait Pendidikan Tinggi dan membuka wawasan mereka.
4. **Konten Planing :**
 - Berita dan pembaruan terkait Pendidikan tinggi di Wilayah XV.
 - Informasi tentang program beasiswa, Buku Panduan bagi mahasiswa dan informasi tentang proyek penelitian.
 - Informasi jumlah data perguruan tinggi swasta di lingkup LLDikti XV.
 - Pemberitaan tentang prestasi dan inovasi di perguruan tinggi.
 - Pemberitahuan tentang kebijakan dan peraturan terbaru di dunia pendidikan tinggi.

5. Jumlah Peristiwa :

- Jumlah Pengunjung Website : 704.254
- Jumlah Postingan Website : 272
- Maintenance : 12

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan serta membuat penyesuaian agar kinerja, program, atau kegiatan tetap berada di jalur yang tepat. Apabila terdapat kendala atau perbedaan pada saat evaluasi maka langkah – langkah perbaikan akan diambil.



Sumber Gambar : LLDikti XV (<https://lldikti15.kemdiktisaintek.go.id/>)

Gambar 3.7. Laman Website LLDikti Wilayah XV

h. Pengelolaan Laporan

Layanan Pelaporan menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Arsiparis dan Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) telah menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara efisien. LAPOR! secara resmi ditetapkan sebagai website layanan pelaporan yang digunakan oleh LLDikti Wilayah XV. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. Tujuan Utama SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan “*no wrong door policy*” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.



Sumber Data : LLDikti XV

Gambar 3.8. Laman Website LAPOR!

i. Website PPID (<https://ppid.lldikti15.or.id/>)

Merupakan laman yang menyajikan portal digital untuk penyediaan, pelayanan, dan penyebarluasan Informasi Publik dari badan publik secara cepat, tepat, sederhana, dan mudah diakses oleh masyarakat, sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Website ini berfungsi untuk pengelolaan data, dokumentasi, pengklasifikasian informasi (wajib berkala, tersedia setiap saat, dikecualikan), serta menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi publik dari warga negara.



Sumber Data : LLDikti XV (<https://ppid.lldikti15.or.id/>)

Gambar 3.9. Laman Website PPID

j. Aplikasi SIKOMODO (<https://sikomodo15.lldikti15.or.id/>)

Aplikasi SIKOMODO merupakan website yang menyajikan pengusulan jabatan fungsional dosen, persuratan, pengiriman surat masuk dan keluar, unit layanan terpadu (ult), data kepegawaian, data dosen dan data PTS yang disajikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkup LLDikti Wilayah XV.



Sumber Data : LLDikti XV (<https://sikomodo15.lldikti15.or.id/>)

Gambar 3.10. Tampilan Aplikasi SIKOMODO

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 1.1

Indikator kinerja utama (IKU) 1.1 mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI Wilayah XV, yang mencerminkan sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan khususnya Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kerja. LLDIKTI XV berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan baik dalam aspek kecepatan, ketepatan, kemudahan akses, transparansi, maupun profesional sumber daya manusia. Upaya ini dilakukan melalui penerapan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kompetensi pegawai, serta perbaikan mekanisme evaluasi kepuasan pengguna yang bersifat periodik dan berbasis data. Dengan demikian capaian IKU 1.1 pada Triwulan IV ini LLDIKTI XV telah memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Upaya yang telah dilakukan oleh LLDIKTI XV dalam upaya peningkatan IKU 1.1.

7. Kendala/Permasalahan

Kendala Layanan Eksternal

- Dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai.
- Adanya ketidaksesuaian data.
- Sistem aplikasi belum terintegrasi.
- Pecahnya kementerian menyebabkan usulan KP tertunda dan tidak memiliki kepastian link usul.

Kendala Layanan Internal

- Sebagian data PNS pada Aplikasi Satya Lencana tidak terbaca atau belum tersinkron dengan data BKN.
- Masalah teknis yaitu koneksi jaringan sering kali menyebabkan akses masuk ke aplikasi SINDE, e-SKP dan aplikasi terkait layanan.
- Memiliki kendala khusus pada pengurusan inpasing pangkat, dimana beberapa dosen yang mengajukan berkas kenaikan pangkat yang belum mempunyai serdos dan beberapa usulan untuk layanan lainnya yang terkendala karena kurangnya berkas lampiran disetiap usulan.
- Jumlah dosen tanpa akun SISTER sebanyak 283 orang sehingga menjadi kontribusi terhadap total dosen tidak mengisi laporan BKD periode Genap 2024/2025, jumlah dosen yang memiliki kualifikasi Pendidikan S3 sebanyak 286 dosen dari total 2.846 dosen tetap, PTS belum mengajukan usulan Jabfung sama sekali dan Dosen belum melakukan pemadanan data.
- Kendala teknis dimana akses lambat atau server sering mengalami overload, terutama pada masa open periode tipe 1 dan 2 karena tingginya jumlah pengguna secara bersamaan, permasalahan sistem/bug aplikasi serta gangguan koneksi internet.
- Kendala dalam proses pemuktahiran sata PPID dan permintaan data terbaru untuk tahun 2025. Transisi pembentukan/pemisahan Kementerian yang baru sehingga pengajuan PSP dilakukan ulang.

8. Langkah Antisipasi

Berbagai langkah antisipasi dan upaya perbaikan yang dilakukan dalam menghadapi hambatan atau permasalahan antara lain

- Penguatan standar pelayanan publik dengan melakukan reviu dan pemuktahiran standar pelayanan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 1 tahun 2024 serta pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat (PermenPANRB nomor 14) agar layanan memiliki kepastian prosedur, waktu dan kualitas.
- Antisipasi resiko penurunan kepuasan layanan.
- Penguatan monitoring layanan secara berkala dengan melaksanakan pemantauan rutin terhadap pelaksanaan layanan melalui rekap pengaduan, dan evaluasi hasil survey kepuasan masyarakat perperiode.
- Optimalisasi sistem layanan digital.
- Mengantisipasi penurunan kualitas layanan dengan pembinaan petugas *front office* dan *back office* agar memahami standar layanan, etika pelayanan publik, dan penyelesaian masalah secara profesional.

9. Upaya Perbaikan

- Tindak lanjut hasil survey kepuasan layanan dengan menyusun dan melaksanakan rencana aksi perbaikan berdasarkan unsur survey kepuasan layanan yang bernilai rendah, terutama pada aspek waktu layanan, kejelasan informasi dan aksesibilitas.
- LLDikti Wilayah XV akan meningkatkan kualitas konten pada laman dan kanal media informasi, serta terus menjalin hubungan baik dengan pers.
- LLDikti Wilayah XV terus berkomitmen dalam meningkatkan mutu layanan di ULT baik secara luring maupun daring.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Kinerja IKU 1.1 (meningkatnya kualitas layanan LLDikti Wilayah XV) pada tahun 2025 berhasil memenuhi target yang ditetapkan, yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai indeks

kepuasan masyarakat (IKM) layanan dan meningkatnya ketepatan waktu serta kualitas layanan kepada PTS binaan.

Keberhasilan ini didukung oleh penerpan standar layanan yang jelas, pemanfaatan sistem layanan berbasis digital, serta penyederhanaan alur pelayanan.

Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan secara berkala serta tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pengguna layanan mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Pendekatan layanan yang lebih responsif dan akuntabel tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja dan mendukung kenaikan nilai SAKIP LLDikti Wilayah XV dari kategori B menjadi BB pada tahun 2025.

b. Indikator Kegiatan (IK) 1.2. Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain.

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional indikator ini mengukur persentase PTS binaan LLDikti Wilayah XV yang memiliki status terakreditasi atau menunjukkan peningkatan mutu kelembagaan melalui proses penggabungan (merger atau konsolidasi) dengan PTS lain sesuai peraturan perundang – undangan, dampak 46 bagi perguruan tinggi sebagai stakeholder utama LLDikti Wilayah XV adalah mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi dapat meningkat. Indikator kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan strategi pendidikan tinggi Kemendikbudristek yang bercita-cita menghadirkan pendidikan tinggi yang bermutu. Terdapat beberapa strategi yang dilakukan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas yaitu mengakselerasi perguruan tinggi mencapai akreditasi serta merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*) serta meningkatkan kesehatan dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi bermutu melalui penggabungan/penguatan kapasitas. Peningkatan mutu melalui penggabungan dengan PTS lain menjadi strategi perguruan tinggi untuk memperluas cakupan, menggabungkan sumber daya, atau meningkatkan kualitas pendidikan. Akselerasi peningkatan mutu PTS yang didorong lewat program penyatuan atau penggabungan (*merger*).

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan sebagai berikut;

$$\frac{a + b}{t} \times 100$$

Keterangan :

a = jumlah PTS yang terakreditasi

b = jumlah PTS yang melakukan penyatuan atau penggabungan

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kegiatan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 pada rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5. Capaian IK 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025
Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).	Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	96,49

Sumber Data : LLDikti XV

Pada Tahun 2025 capaian IK 1.2 96,49 % yang dimana melampaui target 94,73 % sesuai Perjanjian Kinerja.

4. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 sebesar 96,49 % melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 94,73 %.

Tabel 3.6. Capaian IK 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	51	94,73	185,74	94,73	96,49	101,85

Sumber Data : LLDikti XV

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 51 PTS, realisasi di tahun 2024 94,73 % dan capaian di tahun 2024 185,74% sedangkan Capaian Indikator kegiatan pada tahun 2025 sebesar 96,49 % melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 94,73 % dengan persentase capaian 101,85 %.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Ketercapaian realisasi target kinerja IK 1.2 tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal dengan diterbitkannya permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 adalah peraturan Menteri yang menggantikan ketentuan sebelumnya dan menjadi acuan baru dalam penyelenggaraan penjaminan mutu Pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan ini menekankan penjaminan mutu yang komprehensif, berkelanjutan dan terintegrasi antara sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) melalui akreditasi dan kolaborasi dengan lembaga akreditasi yang berwenang oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Sedangkan faktor internal yang mendukung adalah adanya perubahan strategi dan proses bisnis terkait fasilitasi penjaminan mutu di LLDikti XV. Hal ini juga diatur pada Peraturan BAN-PT terbaru tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN Dikti) adalah Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, yang ditetapkan bersama beberapa peraturan lain seperti Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi, yang menjadi landasan baru sistem akreditasi pasca-transformasi dengan adanya Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Sedangkan faktor internal yang mendukung ada pada tim kerja kelembagaan yang dimana terdapat beberapa layanan antar lain:

a. Layanan Pembukaan/Penutupan Program Studi Dan Perguruan Tinggi

- Pendampingan Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Pendampingan Akreditasi Program Studi.
- Layanan Perubahan Bentuk PTS.
- Evaluasi Tata Kelola PTS.
- Rekomendasi Pembukaan Psdku Vokasi Pada PTN
- Rekomendasi Perubahan/Penyesuaian Nama Badan Penyelenggara studi Dan Perguruan Tinggi
- Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Program Studi
- SPMI
- Peta Data Zona PTS

b. Dukungan LLDikti XV dalam program percepatan APT

Untuk pelaksanaan program percepatan akreditasi perguruan tinggi (APT) tahun 2025 LLDikti Wilayah XV memiliki peran sebagai Lembaga yang merekomendasi perguruan tinggi untuk ikut dalam program tersebut, khususnya yang terkait dengan pemenuhan syarat perlu terakreditasi.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pada calon peserta memenuhi kriteria wajib atau dasar yang dipersyaratkan dalam mekanisme akreditasi perguruan tinggi sehingga diharapkan selanjutnya memiliki potensi yang lebih besar untuk dapat terakreditasi

Aspek yang dipantau mencakup hal sebagai berikut :

- Perguruan tinggi wajib memiliki ijin pendirian dan operasional yang sah dan berstatus aktif dan terdaftar di PDDIKTI dalam 2 tahun terakhir.
- Memiliki organisasi tata kelola (pimpinan, senat, unit penjaminan mutu)
- Penilaian kecukupan dosen perguruan tinggi yaitu rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 2.0 .
- Penilaian dosen tidak tetap, yaitu persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah dosen $\geq 2,0$.
- Memiliki dokumen SPMI lengkap, melaksanakan siklus penetapan – pelaksanaan – evaluasi – pengendalian – peningkatan (PPEPP).
- Aspek legalitas, untuk melihat pemenuhan syarat formal badan penyelenggara dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Pelaksanaan Pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, luaran tridarma terdokumentasi dan terukur.
- Pembentukan TIM Kerja penjaminan mutu dan pola pembinaan

c. Data Sebaran dan data akreditasi Perguruan Tinggi LLDikti Wilayah XV Tahun 2025

Terlihat bahwa potensi pengembangan Perguruan Tinggi sangat terbuka apalagi daya dukung PTN yang dimiliki saat ini seakan menjadi barometer pendidikan di LLDIKTI XV. Daya dukung dimaksud yaitu keberadaan Perguruan Tinggi Negeri yang bisa bersaing dalam dan Luar negeri seperti, Universitas Nusa Cendana, Politeknik Negeri Kupang, Politeknik Pertanian, Universitas Timor. Dilain sisi, jumlah Perguruan Tinggi Swasta yang ada, saat awal berdirinya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XV mencapai 58 PTS namun setelah terjadinya perubahan bentuk PTS dan penggabungan akhirnya menjadi 57 PTS yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. LLDikti Wilayah XV sendiri berada dalam wilayah kepulauan sehingga dibagi mejadi 5 ZONA (Zona Timor 31 PTS, Zona Flores 19 PTS, Zona Sumba 4 PTS, Zona Alor 2 PTS dan Zona Rote 1 PTS).

d. Capaian Kinerja Fasilitas Peningkatan Mutu kelembagaan

Capaian Kinerja Fasilitas Peningkatan Mutu kelembagaan dapat dilihat pada tabel 3.6:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Fasilitas Peningkatan Mutu Kelembagaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Kinerja Triwulan IV		Persentase (%)
				Target	Realisasi	
1	Melaksanakan pemetaan mutu kelembagaan	a. Jh PTS yang memenuhi standar mutu sesuai permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	PTS	57	55	96.49%
		b. PTS yang melaksanakan SPMI	PTS	57	55	96.49%
2	Melaksanakan Fasilitas dan Bimbingan Teknis Peningkatan Tata Kelola PTS	Jumlah PTS yang tata kelola berkualitas	PTS	55	52	94,54
3	Melaksanakan fasilitas penyelesaian Perguruan Tinggi	berkurangnya PTS yang bersengketa	PTS	0	0	100,00
4	Melaksanakan penilaian usulan pendirian, perubahan dan pembubaran/pencabutan izin PTS serta pembukaan dan penutupan PS	Pemberian Rekomendasi tepat waktu	PTS	14	19	107,14
5	Melaksanakan fasilitas pendampingan akreditasi	a. Jlh. PTS yang memiliki akreditasi PT	PTS	57	55	96.49%
		b. Jlh. PTS yang memiliki akreditasi PS	PTS	300	328	109,33%
6	melaksanakan fasilitas resizing PT	Jumlah PTS yang berhasil digabungkan/disatukan	PTS	4	0	0,00

Sumber data: Tim Kerja Kelembagaan (Data Per 31 Desember 2025)

e. Pelaksanaan Program Kegiatan Fasilitas Peningkatan Mutu Kelembagaan

Pada bagian ini akan diuraikan lebih rinci berbagai layanan, fasilitas dan kegiatan pada tahun 2025:

Terdapat beberapa layanan rekomendasi pada tahun 2025 antara lain :



Sumber Data : Tim Kerja Kelembagaan (Data Per 31 Desember)

Gambar 3.13. Layanan Rekomendasi

- PTS Dalam Kategori Akreditasi dan Program Studi

PTS (Perguruan Tinggi Swasta) dinilai akreditasinya oleh BAN-PT berdasarkan standar mutu dan kinerja program studi (Prodi) serta institusi (PT) secara keseluruhan, dengan kategori baru Unggul, Baik Sekali, dan Baik, menggantikan sistem lama A, B, C. Pada LLDikti Wilayah XV terdapat 57 PTS 343 prodi yang dimana akreditasi prodi sebanyak 326 prodi. Berikut adalah gambaran 10 besar kategori PTS dengan jumlah PS terbanyak dan status akreditasi:



Sumber data : Tim Kerja Kelembagaan (Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.14. 10 besar kategori PTS dengan jumlah PS terbanyak dan status akreditasi

Kegiatan Program Kegiatan Penjamin Mutu Tahun 2025

Tabel 3.8. Daftar Kegiatan Program Penjaminan Mutu

No	Nama Kegiatan
1	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen SPMI pada PTS Unggul
2	FGD Perumusan Peta Jalan (Road Map) Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah XV
3	Sosialisasi Permendikristek Nomor 39 Tahun 2025, IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 BAN-PT Lingkup LLDIKTI XV
4	Workshop Akreditasi Program Studi Unggul Tahun 2026
5	Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi
6	Bimtek Pendampingan dan Penyusunan LED dan LKPT Akselerasi Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) bagi PTS Lingkup LLDIKTI Wilayah XV
7	Sharing Session Proses Akreditasi di BAN PT LLDIKTI Wilayah XV TA 2025 (Rayon Timor)
8	Kegiatan Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi
9	Sharing Session Proyeksi Perguruan Tinggi Menuju Unggul

Sumber data: Tim Kerja Kelembagaan (Data Per 31 Desember 2025)



Sumber Gambar: Tim Kerja Kelembagaan

Gambar 3.15. Kegiatan Penjamin Mutu Tahun 2025

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 1.2

Keberhasilan pencapaian IKU 1.2 (Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu melalui penggabungan) pada tahun 2025 dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal, serta didukung oleh implementasi permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 tentang sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi.

- Faktor Internal

Faktor internal meliputi penguatan peran LLDikti XV dalam pembinaan dan pendampingan PTS, khususnya melalui pemetaan status akreditasi, penetapan PTS prioritas, serta pendampingan teknis penyusunan dokumen akreditasi dan penggabungan PTS. Sedangkan faktor internal yang mendukung adalah perubahan strategi dan proses bisnis terkait fasilitasi penjaminan mutu di LLDikti Wilayah XV.

Implementasi SPMI sesuai permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 mendorong PTS untuk menjalankan siklus PPEPP secara konsisten, sehingga kesiapan mutu kelembagaan dan akreditasi meningkat. Selain itu, monitoring dan evaluasi berbasis data PDDIKTI meningkatkan ketepatan sasaran intervensi percepatan akreditasi.

- Faktor Eksternal

Faktor Eksternal mencakup meningkatnya komitmen pimpinan dan badan penyelenggara PTS dalam memenuhi standar akreditasi dan melakukan penataan kelembagaan melalui penggabungan PTS sebagai strategi peningkatan mutu. Dukungan kebijakan penjaminan mutu Pendidikan tinggi, khususnya penerapan SPMI dan keterkaitannya dengan SPME (akreditasi) sebagaimana diatur dalam permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025 mendorong PTS untuk mempercepat pemenuhan standar mutu. Selain itu peran BAN-PT/LAM serta ketersediaan mekanisme akreditasi turut mendukung target IKU 1.2. secara keseluruhan keberhasilan pencapaian target IKU 1.2 tahun 2025 merupakan hasil dari penguatan tata kelola mutu internal PTS, pendampingan LLDikti Wilayah XV yang terarah, serta dukungan kebijakan sistem penjaminan mutu Pendidikan tinggi yang terintegrasi antara SPMI dan SPME.

7. Kendala/Permasalahan

Dalam upaya mencapai target IKU 1.2 pada tahun 2025, LLDikti Wilayah XV menghadapi sejumlah hambatan dan permasalahan khususnya yang terkait penjaminan mutu, terdapat beberapa hambatan dan kendala yang sering muncul meliputi:

- Keterbatasan Sumber Daya pembinaan menjadi salah satu tantangan utama. Jumlah dan kapasitas sumber daya pendamping yang terbatas menyebabkan intensitas pendampingan belum dapat menjangkau seluruh PTS secara merata kondisi ini berdampak pada belum optimalnya implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara menyeluruh sesuai dengan prinsip dan siklus penetapan – pelaksanaan – evaluasi – pengendalian – peningkatan (PPEPP).
- Tingkat pemahaman dan komitmen badan penyelenggara dan pimpinan perguruan tinggi terhadap budaya mutu yaitu :
 - a. Kurangnya komitmen: Sebagian pimpinan perguruan tinggi belum memandang penjaminan mutu sebagai prioritas utama;
 - b. Rendahnya pemahaman: Pemahaman tentang pentingnya SPMI belum merata ditingkat pengambil kebijakan;
 - c. Sumber daya anggaran: Belum seluruh perguruan tinggi mengalokasikan secara optimal anggaran untuk implementasi SPMI dan akreditasi;
 - d. Budaya Mutu yang Belum Mengakar dan Berorientasi Formalitas: Sebagian perguruan tinggi cenderung memandang penjaminan mutu sebagai formalitas untuk memenuhi

- persyaratan akreditasi, bukan sebagai kebutuhan internal;
- e. Kurangnya Kesadaran Kolektif: Budaya mutu belum menjadi bagian dari keseharian seluruh elemen perguruan tinggi.
 - Dari aspek teknis, ketidak sesuaian dan keterlambatan pelaporan data di PDDIKTI masiiah menjadi permasalahan yang mempengaruhi penilaian kesiapan akreditasi. Data yang belum lengkap dan belum mutakhir menyulitkan PTS dalam menyusun laporan evaluasi diri dan dokumen kinerja perguruan tinggi yang valid dan konsisten dengan kondisi rill.
 - Kompleksitas Regulasi
 - a. Perubahan Kebijakan: Kebijakan penjaminan mutu sering diperbarui, sehingga memerlukan adaptasi yang cepat dari perguruan tinggi.
 - b. Kerancuan Interpretasi: Beberapa regulasi penjaminan mutu tidak diinterpretasikan dengan cara yang sama oleh semua pihak.

8. Langkah Antisipasi

- Dalam rangka mengatasi hambatan permasalahan pada pencapaian IKU 1.2 tahun 2025, LLDikti Wilayah XV telah melakukan serangkaian upaya mitigasi yang terencana, terukur dan berkelanjutan pada tahun yang mendatang.
- Mengembangkan pola pemantauan dan evaluasi yang berbasis pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, termasuk pemantauan aspek anggaran pada penjaminan mutu.
- Penguatan strategi pembinaan berbasis pemetaan resiko dan prioritas. LLDikti Wilayah XV melakukan pemetaan kondisi akreditasi dan kesiapan mutu PTS secara berkala dengan memanfaatkan data PDDIKTI, hasil monitoring, serta laporan hasil implementasi SPMI.
- Optimalisasi pendampingan teknis penjaminan mutu dan akreditasi baik itu secara konsultasi daring/luring.
- Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga terkait, antara lain BAN-PT dan LAM, khususnya terkait akses data dan sosialisasi instrumen baru.
- Penguatan kapasitas sumber daya manusia baik di lingkungan LLDikti maupun PTS. Upaya ini dilakukan melaui pelatihan, workshop, dan peningkatan kompetensi tim penjaminan mutu serta pengelola akreditasi, sehingga proses peningkatan mutu dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

9. Upaya Perbaikan

- Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi pencapaian IKU 1.2 tahun 2025 LLDikti Wilayah XV melakukan upaya perbaikan yang di fokuskan pada penguatan tata kelola mutu dan percepatan akreditasi PTS secara berkelanjutan. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kualitas pembinaan berbasis Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai dengan siklus PPEPP sebagaimana diatur dalam permendiktisaintek nomor 39 tahun 2025.
- Mempersiapkan dan merealisasikan pendampingan secara mandiri dengan perguruan tinggi.
- Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan antar pemangku kepentingan pendidikan tinggi, seperti perguruan tinggi, lembaga akreditasi, dan lembaga penjaminan mutu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang digulirkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- Perbaikan pada aspek tata kelola data dan kepatuhan pelaporan SPMI spmi.kemdiktisaintek.go.id.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

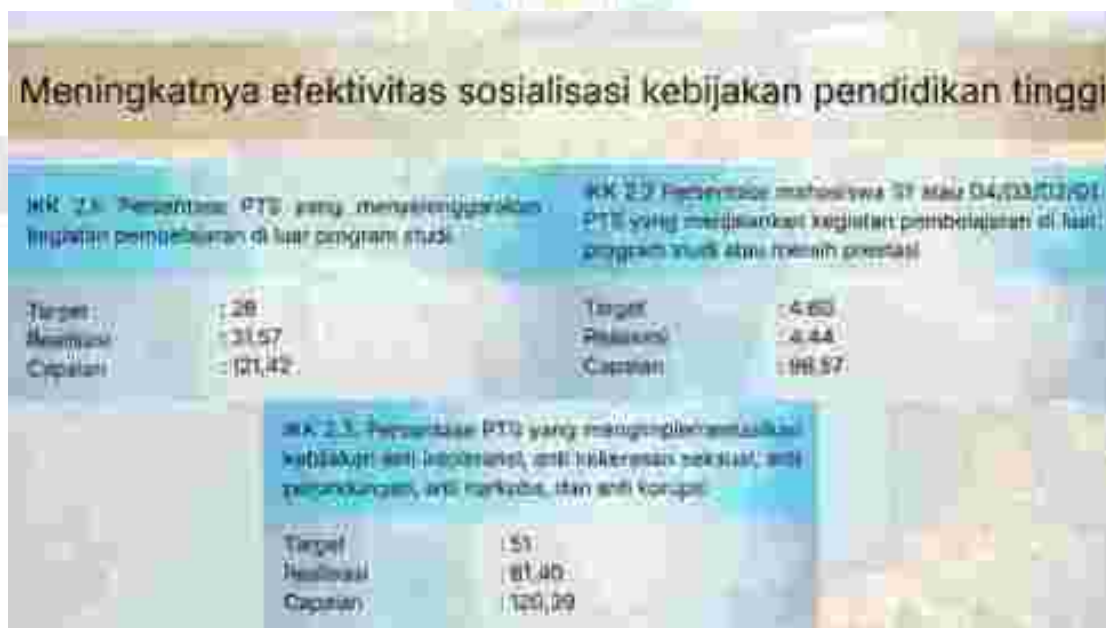
Keberhasilan capaian kinerja IKU 1.2 tahun 2025 tercermin dari meningkatnya persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu melalui penggabungan, sebagai hasil pembinaan

dan pendampingan LLDikti Wilayah XV yang lebih terarah berbasis pemetaan data PDDikti. Implementasi SPMI melalui siklus PPEPP sesuai Permendikisaintek Nomor 39 Tahun 2025 mendorong perbaikan tata kelola dan pemenuhan standar mutu PTS, didukung oleh meningkatnya komitmen pimpinan dan badan penyelenggara. Sinergi kebijakan pembinaan, kepatuhan pelaporan data, dan dukungan regulasi penjaminan mutu berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target IKU 1.2 tahun 2025.

2. Sasaran 2 “Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi”

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan agar linear dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. *Link and match* tidak saja dengan dunia usaha dan dunia industri, tetapi juga dengan arah perkembangan zaman yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan.

“Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi” menjadi sasaran LLDikti yang memiliki tiga indikator kinerja (IK) yaitu 2.1. Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi 2.2. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi, dan IK 2.3. Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi dengan persentase capaian dari target sebagai berikut:



Sumber Data : LLDikti XV

Gambar 3.16. Persentase Capaian IK 2.1, IK 2.2 dan IK 2.3

a. Indikator Kinerja (IK) 2.1. Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai kriteria indikator kinerja utama perguruan tinggi (IKU PT) nomor 2. Sesuai dengan Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama

Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi, kriteria penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran sesuai kriteria indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi nomor 2. Kriteria yang terdapat pada IKU perguruan tinggi nomor 2 antara lain:

- a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang terkonversi setara 20 (dua puluh) sistem kredit semester (SKS) per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) SKS untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) SKS untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:
 - Magang atau praktik kerja
Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (*startup company*).
 - Proyek di Desa
Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.
 - Mengajar di Sekolah
Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.
 - Pertukaran mahasiswa
Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi/prodi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran mahasiswa juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa *inbound* yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
 - Penelitian atau riset
Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
 - Kegiatan wirausaha
Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
 - Studi atau proyek independen
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
 - Proyek kemanusiaan
Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, *peace corps*, dll).
- b. Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional, atau tingkat provinsi/regional.
 - Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat.
 - Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Keterangan

n = jumlah PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

t = total jumlah PTS di wilayah kerja LLDIKTI.

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kinerja berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 pada tabel 3.8:

Tabel 3.9. Presentase PTS Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	2025
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi	Presentase PTS Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi	31,57

Sumber Data : LLDikti XV

Pada tahun 2025 IK 2.1 target yang telah ditetapkan 26%, LLDIKTI XV telah berupaya mendorong PTS agar meningkatkan kapasitas dosen dan pendampingan intensif kepada mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di luar program studi sehingga Realisasi Kinerja IK 2.1 mencapai 31,57%, dengan jumlah PTS sebanyak 18 yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

4. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.10. Capaian IK 2.1 Presentase PTS Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Presentase PTS Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi	26	91,22	350,84	26	31,57	121,42

Sumber Data : LLDikti XV

Pada tahun 2024 Target IK 2.1 adalah 26% dengan realisasi sebesar 91,22 % dan capaian 350,84 %. Capaian ini ditunjukkan dengan 52 PTS yang menyelenggarakan kegiatan MBKM dalam bentuk kegiatan yang bervariasi (Kampus Mengajar, KKN Tematik, Proyek Kemanusiaan, dll). Sedangkan pada tahun 2025 capaian kinerja IKK 2.1 melampaui target dengan realisasi 31,57% dan capaian 121,42%. Jumlah PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi sebanyak 18 Perguruan Tinggi.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Program yang mendukung IK 2.1 berada pada tim kerja Belmawa yang dimana selama menjalankan fungsinya sudah melakukan beberapa layanan dan program – programnya.

a. Bimbingan Teknis dan Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN Tematik GENTASKIN Tahun 2025

KKN Tematik GENTASKIN (Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan) merupakan program strategis LLDIKTI Wilayah XV yang dilaksanakan dalam rangka mendukung percepatan penurunan angka stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTT. Program ini menjadi bagian integral dari Rencana Aksi Konsorsium KPT Kosabangsa dilaksanakan pada 25 desa sasaran di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Barat Daya (SBD), dan Manggarai Timur. Kegiatan KKN ini dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama studi melalui kolaborasi interdisipliner, pendekatan partisipatif, dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Program ini juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024, khususnya agenda pembangunan sumber daya manusia, penguatan reformasi perlindungan sosial, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Di tingkat daerah, program ini mendukung prioritas Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting Terintegrasi. Keterlibatan mahasiswa dan dosen pendamping dari berbagai disiplin ilmu merupakan bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah NTT.

Sebagai bagian penting dari persiapan pelaksanaan KKN Tematik, mahasiswa dan dosen pendamping perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai konteks program, pendekatan intervensi, keterampilan teknis lapangan, dan etika pelaksanaan program. Untuk itu, LLDIKTI Wilayah XV menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pembekalan selama dua hari secara hybrid, melibatkan narasumber dari perguruan tinggi, dinas teknis provinsi dan kabupaten, serta praktisi pembangunan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis dan Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN Tematik GENTASKIN LLDIKTI Wilayah XV berlangsung baik dan sukses. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dan dosen pendamping memiliki pemahaman yang selaras terhadap tujuan program, strategi intervensi yang kontekstual, serta pola kerja yang kolaboratif lintas sektor. Melalui pendekatan *hybrid*, kegiatan ini juga membuka akses yang lebih luas bagi mahasiswa dari seluruh wilayah kerja LLDIKTI XV untuk mengikuti pembekalan secara optimal. Komitmen bersama antara LLDIKTI, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keberhasilan Program KKN Tematik GENTASKIN.





Sumber Gambar : Tim Kerja Belmawa

Gambar 3.17. Bimtek dan Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN Tematik GENTASKIN Tahun 2025

b. Forum Sinergi LLDikti XV Berdampak Melalui Evaluasi Gentaskin dan Konsolidasi KPT Kosabangsa

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah dan nasional melalui pelaksanaan tridarma, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Salah satu wujud nyata kontribusi tersebut adalah Program KKN Tematik GENTASKIN (Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan) yang telah dilaksanakan LLDIKTI Wilayah XV bersama berbagai perguruan tinggi di wilayah binaan. Program ini berperan penting dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Nusa Tenggara Timur melalui kolaborasi lintas disiplin dan pendekatan berbasis masyarakat.

Setelah pelaksanaan GENTASKIN tahun 2025, diperlukan forum untuk mengevaluasi hasil, mendiseminasikan praktik baik, dan menyusun langkah penguatan keberlanjutan program. Pada saat yang sama, Konsorsium Perguruan Tinggi Kolaborasi Sosial Membangun Bangsa (KPT Kosabangsa) juga perlu dikonsolidasikan untuk memperkuat sinergi antarperguruan tinggi dalam menghasilkan kegiatan riset dan pengabdian yang mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting di NTT.

Melalui kegiatan konsolidasi KPT Kosabangsa ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antarperguruan tinggi dalam pelaksanaan program pengabdian dan riset berbasis dampak nyata, serta tercapai penyamaan persepsi terkait mekanisme pengukuran dampak kegiatan yang berkelanjutan. Untuk itu, LLDIKTI Wilayah XV menyelenggarakan kegiatan Forum Sinergi LLDIKTI XV Berdampak melalui Evaluasi GENTASKIN dan Konsolidasi KPT Kosabangsa, sebagai ruang bersama refleksi, penguatan, dan kolaborasi dalam mendorong dampak tridarma perguruan tinggi bagi masyarakat NTT.

Program dinilai berdampak, diterima masyarakat dan layak diperluas. Program dinilai berdampak, diterima masyarakat, untuk keterlanjutan, perlu diperbaiki: data, teknologi, koordinasi, dan pendanaan. Untuk masa depan, disepakati perluasan skala (10.000 mahasiswa) serta penguatan riset dan pengukuran dampak.





Sumber Gambar : Tim Kerja Belmawa

Gambar 3. 18. Forum Sinergi LLDikti XV Berdampak Melalui Evaluasi Gentaskin dan Konsolidasi KPT Kosabangsa

c. Sosialisasi Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2025 Bagi PTS LLDikti XV

Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah meluncurkan berbagai program guna mendukung akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, salah satunya adalah Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Program KIPK bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu namun memiliki potensi akademik yang baik.

Seiring dengan implementasi program KIPK, peran pengelola dan operator KIPK di perguruan tinggi menjadi sangat vital. Mereka adalah ujung tombak dalam proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan KIPK kepada mahasiswa yang berhak menerima. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai prosedur, kebijakan, dan teknis pelaksanaan program ini sangat penting bagi operator.

Kegiatan sosialisasi program KIPK ini dirancang untuk memberikan informasi yang mendalam dan pengalaman praktis kepada semua pimpinan dan pengelola KIPK perguruan tinggi swasta agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif serta dapat menjalankan program sesuai ketentuan.

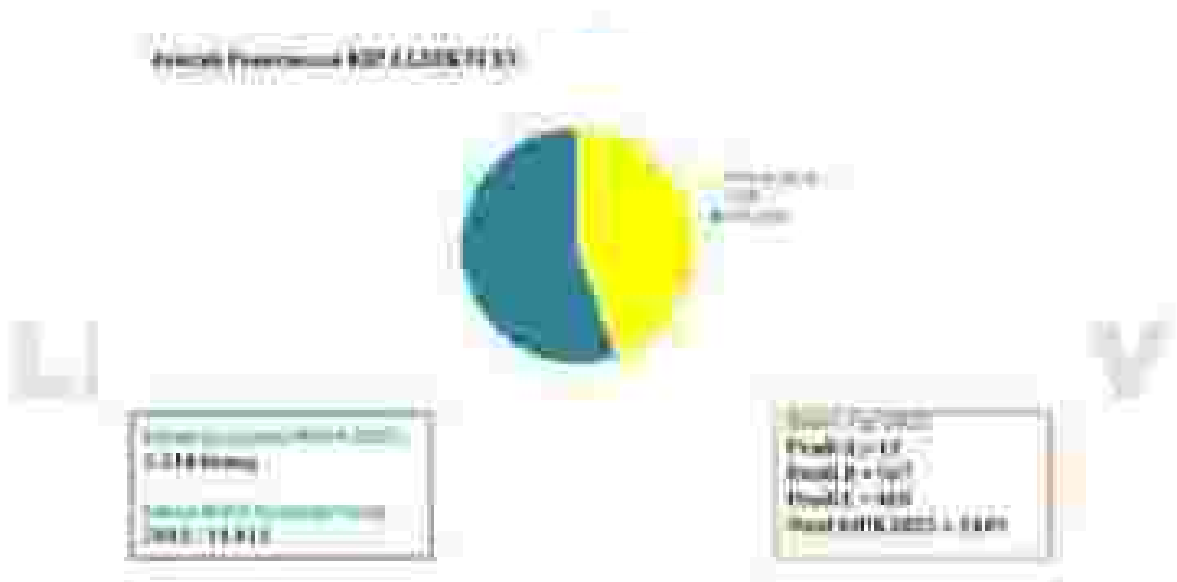




Sumber Gambar : Tim Kerja Belmawa

Gambar 3.19. Sosialisasi Beasiswa KIP Kuliah Tahun 2025 Bagi PTS LLDikti XV

Sebaran data mahasiswa penerima manfaat di LLDIKTI wilayah XV dijabarkan seperti Gambar 3.22 di bawah ini :



Sumber Data : Tim Kerja Belmawa (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.20. Bantuan Pendidikan pada Mahasiswa di PTS LLDikti Wilayah XV Tahun 2025

Tabel 3.11. Penerima KIPK Berdasarkan Jabatan Akademik Tahun 2025

NO	Jenis PT	Kuota Beasiswa MABA 2025 (PTS)	Kuota KIPK Ongoing Gasal 2025 (PTS)
1	Universitas	17	13
2	Institut	5	5
3	Sekolah Tinggi	19	19
4	Akademik	6	6
5	Politeknik	4	3
Total		51	50

Sumber Data : Tim Kerja Belmawa (Data Per 31 Desember 2025)

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 2.1

Keberhasilan pencapaian target 2.1 dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang saling mendukung, baik dari sisi internal maupun eksternal.

- Faktor internal

Keberhasilan didorong oleh perencanaan program yang selaras dengan Renstra dan IKU, penguatan koordinasi lintas fungsi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala berbasis data sehingga meningkatkan ketepatan sasaran intervensi dan efektifitas pelaksanaan program.

- Faktor eksternal

Meningkatnya komitmen dan partisipasi pemangku kepentingan (Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, DUDI, LSM, UMKM) dukungan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta sinergi dengan mitra terkait turut mempercepat pencapaian target. Didukung lingkungan kerja yang semakin adaptif terhadap perubahan kebijakan dan kebutuhan layanan juga mendukung keberhasilan target 2.1.

7. Kendala/Permasalahan

- Keterbatasan Sumber Daya : Dalam mendampingi perguruan tinggi dan program studi untuk perencanaan, implementasi serta pelaporan program yang mendukung IK 2.1 Presentase PTS Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi dari sisi jumlah sumber daya manusia dan kompetensi masih mengalami keterbatasan. Selain itu, kurangnya koordinasi dan sinergi antar program studi maupun antar perguruan tinggi di wilayah LLDikti XV juga menjadi permasalahan yang cukup signifikan. Perbedaan tingkat kesiapan, pemahaman kebijakan, serta komitmen masing – masing perguruan tinggi menyebabkan pelaksanaan program pendukung IKU 2.1 belum berjalan secara seragam dan terintegrasi, sehingga berdampak pada capaian kinerja yang belum optimal.
- Hilangnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mempengaruhi berkurangnya program atau aktifitas di luar Prodi yang dilaksanakan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi (MBKM Mandiri). Dengan demikian, akan berdampak pada capaian jumlah Perguruan Tinggi yang melaksanakan pembelajaran di luar Prodi, sebagaimana dalam data tahun 2024 capaian 350,84 (52 PTS) sedangkan di tahun 2025 capaian 121,42% (18 PTS) yang menyelenggarakan pembelajaran di luar prodi baik yang terfasilitasi maupun secara mandiri.
- Permasalahan lainnya adalah keterbatasan fasilitas dan infrastruktur digital baik di tingkat LLDikti maupun perguruan tinggi khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses jaringan dan teknologi informasi. Kondisi ini menghambat pelaksanaan kegiatan berbasis digital, sistem pelaporan, pemantauan kinerja, serta pemanfaatan platform pendukung yang menjadi bagian penting dalam pencapaian IKU 2.1.
- Disamping itu masih terdapat kurangnya motivasi dan pemahaman mahasiswa serta tenaga kependidikan (Tendik) terhadap pentingnya keterlibatan aktif dalam program dan kebijakan yang mendukung Kegiatan Pembelajaran Mahasiswa di Luar Program Studi karena rendahnya pemahaman terhadap tujuan, manfaat dan mekanisme pelaksanaan program menyebabkan partisipasi mahasiswa belum optimal dan berdampak pada rendahnya kontribusi terhadap capaian indikator kinerja yang ditetapkan.

8. Langkah Antisipasi

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia LLDikti Wilayah XV melakukan:

- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui pembagaaian peran dan tugas yang lebih terstruktur, peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta penguatan peran koordinator atau penanggung jawab program IKU 2.1.

- Melakukan penguatan koordinasi ke Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait dalam rangka mendukung pengembangan program pembelajaran di luar program studi baik internal maupun eksternal kampus (KKN Tematik GENTASKIN, KPT Kosabangsa, Pertukaran Mahasiswa Mandiri).
- Selain itu dilakukan penguatan kerja tim lintas unit guna memastikan pendampingan perguruan tinggi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam rangka mengatasi kurangnya koordinasi antar program studi dan perguruan tinggi, LLDikti Wilayah XV memperkuat mekanisme koordinasi melalui rapat evaluasi berkala, forum komunikasi pimpinan perguruan tinggi, serta pemanfaatan media daring sebagai sarana komunikasi dan diseminasi kebijakan. LLDikti juga mendorong terbentuknya praktik berbagi baik (*best practices*) antar perguruan tinggi untuk meningkatkan keselarasan pelaksanaan program pendukung kegiatan mahasiswa di luar program studi.
- Untuk mengatasi keterbatasan fasilitas dan infrastruktur digital LLDikti XV mendorong pemanfaatan platform digital yang tersedia secara nasional melalui (media), melakukan pendampingan teknis terkait penggunaan sistem informasi, serta menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi untuk peningkatan kesiapan sarana pendukung secara bertahap. Disamping itu, dilakukan penyesuaian metode pelaksanaan kegiatan dengan kondisi wilayah termasuk penggunaan model *hybrid*.
- Selanjutnya dalam mengatasi rendahnya motivasi dan pemahaman mahasiswa serta tenaga kependidikan, LLDikti Wilayah XV meningkatkan kegiatan sosialisasi dan diseminasi kebijakan IKU 2.1 Persentase Mahasiswa Berkegiatan Diluar Program Studi secara berkelanjutan, baik kepada pimpinan perguruan tinggi, dosen, tendik maupun mahasiswa. Pendekatan persuasif dilakukan dengan menekankan manfaat langsung program terhadap peningkatan kualitas lulusan, tata kelola dan kinerja perguruan tinggi untuk memberikan dukungan dan apresiasi atas partisipasi aktif sivitas akademika.
- Sebagai tindak lanjut LLDikti Wilayah XV secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program IKU 2.1, menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi pendampingan pada periode berikutnya serta memastikan adanya kesinambungan program capaian IKU 2.1 dapat meningkat secara bertahap dan berkelanjutan.

9. Upaya Perbaikan

- **Optimalisasi SDM**
Memastikan mekanisme konversi dan rekognisi SKS untuk kegiatan di luar program studi (seperti magang, asistensi mengajar, penelitian, atau proyek kemanusiaan) berjalan dengan baik dan sesuai panduan yang berlaku, sehingga mahasiswa dan dosen memiliki kejelasan akademik.
- **Penguatan Jejaring dan Kerjasama**
Membangun dan memperkuat kerja sama dengan industri, institusi luar kampus, asosiasi profesional dan pemerintah daerah untuk menyediakan tempat kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- **Penguatan Infrastruktur Digital**
Memastikan ketersediaan dan stabilitas infrastruktur jaringan di seluruh area kampus, untuk mendukung pembelajaran daring dan akses ke berbagai sumber daya digital dan Menyediakan platform digital yang menjembatani kerja sama antara perguruan tinggi dengan mitra strategis (dunia usaha dan industri, pemerintah daerah, dll.) untuk mengorganisir magang, proyek desa, atau studi independen.
- **Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dan Kapasitas Tendik**
PTS harus secara aktif merancang dan menawarkan berbagai kegiatan seperti magang industri, proyek sosial, pertukaran mahasiswa, dan penelitian yang relevan dengan minat

dan prospek karier mahasiswa. Informasi mengenai program-program ini harus disosialisasikan secara masif.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Keberhasilan capaian kinerja LLDikti Wilayah XV pada tahun 2025 didukung oleh meningkatnya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis dan perjanjian kinerja. Penguatan koordinasi internal serta sinergi dengan perguruan tinggi di wilayah binaan mendorong pelaksanaan program yang lebih terarah dan efektif selain itu, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan platform digital meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu dan akurasi monitoring serta pelaporan kinerja. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan program sehingga secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2025 dapat tercapai lebih optimal.

b. Indikator Kinerja (IK) 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

1. Penjelasan Definisi Operasional

Definisi operasional adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran dan meraih prestasi sesuai kriteria indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi. Dampak (*outcome*) dari indikator kinerja ini ditandai dengan peningkatan capaian efektifitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi. Kriteria penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi dan prestasi adalah mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran dan meraih prestasi sesuai kriteria indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi nomor 2 yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

$$\frac{\sum_{i=1}^n \frac{b_i}{t} \times 100}{t}$$

Keterangan

n = jumlah mahasiswa PTS di wilayah kerja LLDIKTI yang memenuhi kriteria

k = pembobotan per mahasiswa sesuai matriks berikut : jika mahasiswa mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berprestasi, bobot maksimal yang dapat diberikan adalah 1

Matriks bobot SKS :

a. $X \leq 20$ bobot = 1

b. $10 \leq x < 20$ bobot = 0,5

Matriks bobot prestasi :

Tingkat wilayah kompetisi :

a. Internasional , bobot 0,75

b. Nasional, bobot 0,5

c. Provinsi , bobot 0,25 .

t = total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kegiatan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 pada tabel 3.12.

Tabel 3.12. Capaian IK 2.2. Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025
Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi	Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,44

Sumber Data : LLDikti XV

4. Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja utama (IKU) 2.2 pada Tim Kerja BELMAWA menunjukkan kinerja yang sangat baik. Realisasi capaian mencapai 4,44%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program strategis dibidang kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XV pada Triwulan IV, khususnya melalui program GENTASKIN dan Program Pengembangan Kreativitas Mahasiswa. Program-program ini mendorong meningkatkannya partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan penguatan kompetensi dan kreativitas sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap capaian IKU 3.12.

Tabel 3.13. Capaian IK 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	4,60	4,50	97,82	4,60	4,44	96,57

Sumber Data : LLDikti XV

Pada tahun 2024 realisasi 4,50 % dan capaian 97,82 %, sedangkan tahun 2025 realisasi Kinerja IKK 2.2 sebesar 4,44 % dengan capaian 96,57%.

Dukungan pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan oleh Tim Kerja BELMAWA kepada PTS di lingkup LLDIKTI Wilayah XV untuk mendukung IKU tersebut dilakukan dengan beberapa kegiatan:

- Forum Sinergi LLDIKTI XV Berdampak melalui Evaluasi Gentaskin dan Konsolidasi KPT Kosabangsa yang dilaksanakan pada 10 November 2025 di Hotel Aston Kupang.
- Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran diluar prodi dengan 20 SKS sebanyak 1.925 mahasiswa.
- Jumlah mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran diluar prodi dengan 10 SKS sebanyak 3.450 mahasiswa.
- Jumlah PTS yang memiliki mahasiswa prestasi sebanyak 12 PTS.
- Jumlah mahasiswa yang meraih prestasi tingkat internasional sebanyak 22 mahasiswa.
- Jumlah mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional sebanyak 363 mahasiswa.

- Jumlah mahasiswa yang meraih prestasi tingkat lokal/kabupaten/kota/provinsi sebanyak 258 mahasiswa.
- Mendorong Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk meningkatkan presentase mahasiswa SI/D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran diluar program studi sesuai target IKU 2.2.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada beberapa program kegiatan yang telah dilakukan oleh tim kerja belmawa antara lain:

a. Bimtek Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha

Upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membentuk karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak mahasiswa. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kemdiktisaintek untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan dan kreatifitas serta wawasan kemandirian yakni melalui program pengembangan kewirausahaan yang dikenal dengan program Pengembangan Mahasiswa Wirausaha (P2MW). Melalui Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) diharapkan mahasiswa mampu melakukan kegiatan wirausaha dan berkontribusi dalam upaya mengentaskan kemiskinan maupun menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam rangka membina dan mengembangkan kompetensi kewirausahaan mahasiswa di lingkungan LLDIKTI XV serta dalam upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam program P2MW, maka LLDIKTI Wilayah XV merasa perlu melakukan Bimtek Pendampingan Pengelolaan Kewirausahaan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV. Melalui Bimtek ini, pada akhirnya mahasiswa memiliki jiwa entrepreneurship dan pengalaman kewirausahaan yang menjadi bekal setelah menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menyusun program/kegiatan wirausaha dalam bentuk proposal yang lebih kreatif dan inovatif untuk diikutsertakan dalam kompetisi hibah P2MW tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisaintek.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan Bimtek Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) LLDIKTI Wilayah XV berlangsung baik dan sukses. Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan adanya peningkatan kapasitas perguruan tinggi dalam pembinaan kewirausahaan mahasiswa serta terciptanya calon-calon entrepreneur muda dari kalangan mahasiswa yang mampu berkontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan jumlah kelompok mahasiswa di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV yang mendapatkan bantuan hibah kompetitif program P2MW tahun 2025.





Sumber Gambar : Tim Kerja Belmawa

Gambar 3.21. Bimtek Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha

b. Kegiatan Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wilayah Tahun 2025

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Nasional merupakan salah satu agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Diktisaintek, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, untuk memberikan penghargaan kepada mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi di Indonesia. Program ini merupakan ajang kompetisi bergengsi yang bertujuan untuk memberikan apresiasi dan mendorong mahasiswa untuk mencapai prestasi tertinggi dalam berbagai bidang, baik yang bersifat hard skills, maupun soft skills. Melalui program ini, diharapkan muncul role model mahasiswa unggul yang dapat menginspirasi dan memotivasi rekan-rekannya untuk terus mengembangkan diri.

Sebagai bagian dari proses seleksi nasional, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XV menyelenggarakan seleksi PILMAPRES tingkat wilayah Tahun 2025. Seleksi PILMAPRES Tingkat Wilayah tahun 2025 guna menjaring wakil terbaik dari perguruan tinggi dilingkup LLDikti Wilayah XV dan yang terpilih akan mewakili LLDikti Wilayah XV dalam seleksi PILMAPRES tingkat nasional Tahun 2025.





Sumber Gambar : Tim Kerja Belmawa

Gambar 3.22. Kegiatan Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Tingkat Wilayah Tahun 2025

Tabel 3.14. Jumlah Mahasiswa Berprestasi Pada Seleksi Pilmapres Tahun 2025

No	Jumlah Mahasiswa Peserta Seleksi	Mahasiswa Peserta yang Lolos Seleksi	Presentase (%)
1	11	2	18,19

Sumber Data : Tim Kerja Belmawa (Data Per 31 Desember 2025)

Berdasarkan tabel uraian data pemilihan mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) di atas, jelas pemilihan mahasiswa berprestasi diikuti oleh beberapa mahasiswa yang ikut seleksi, namun hanya ada dua mahasiswa yang mewakili Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Lingkup LLDIKTI XV dengan Persentase kelulusan dari total PTS Lingkup LLDIKTI XV yaitu, ada total 11 orang yang mengikuti seleksi, akan tetapi hanya dua orang yang lulus seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi (PILMAPRES) dengan persentase 18,19%.

Pada tahun 2025 juga terdapat Olimpiade Nasional Fakultas MIPA dengan jurusan/Prodi Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia dengan masing-masing jumlah peserta yang ikut seleksi di setiap tahunnya. Prodi Matematika dengan jumlah peserta ikut seleksi berjumlah 10 orang, Prodi Fisika berjumlah 5 orang, Biologi berjumlah 5 orang dan Kimia berjumlah 7 orang.

Tabel 3.15. Jumlah Mahasiswa Olimpiade MIPA Tahun 2025

No	Bidang Studi	Tahun 2025
1	Matematika	10
2	Fisika	5
3	Biologi	5
4	Kimia	7

Sumber Data : Tim Kerja Belmawa (Data Per 31 Desember 2025)

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 2.2

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan LLDikti Wilayah XV setiap tahunnya, berhasil dipetakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi PTS terkait pembelajaran di luar program studi dan prestasi mahasiswa. Berdasarkan hasil pemetaan

tersebut, dilakukan berbagai pendekatan baik berupa kegiatan maupun pendampingan terhadap perguruan tinggi. Selain itu, antusiasme PTS semakin tinggi untuk mengikuti kompetisi baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

7. Kendala/Permasalahan

- Salah satu hambatan dalam pencapaian IKU 2.2 adalah masih terbatasnya pemahaman pemangku kepentingan, khususnya di tingkat perguruan tinggi terhadap kebijakan, tujuan serta mekanisme pelaksanaan IKU 2.2 informasi yang diterima belum sepenuhnya merata dan terstruktur sehingga menjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan program. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang mendukung IKU 2.2.
- Masalah manajemen waktu adalah kurang efektifnya pengelolaan waktu, baik di tingkat LLDikti maupun perguruan tinggi. Banyaknya beban tugas rutin dan kegiatan lain yang berjalan secara bersamaan menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program, pengumpulan data serta penyampaian laporan kinerja akibatnya beberapa kegiatan pendukung IKU 2.2 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Minimnya event yang diselenggarakan dalam mendukung pengembangan minat, bakat dan prestasi mahasiswa, serta terbatasnya akses untuk mengikuti event kompetisi baik nasional maupun internasional.
- Keterbatasan alokasi anggaran dan dukungan fasilitas khususnya sarana pendukung kegiatan dan infrastruktur teknologi informasi, menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian IKU 2.2 mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi tidak semua perguruan tinggi memiliki kemampuan pembiayaan dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya cakupan kegiatan, kualitas pelaksanaan program serta efektifitas monitoring dan evaluasi.
- Rendahnya kepercayaan diri sebagai dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam berpartisipasi aktif pada program yang mendukung IKU 2.2 juga menjadi permasalahan tersendiri. Kurangnya pengalaman, minimnya pendampingan, serta kekhawatiran terhadap kemampuan diri menyebabkan partisipasi belum optimal hal ini berdampak pada rendahnya inisiatif dan inovasi dalam mendukung pencapaian target IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi.

8. Langkah Antisipasi

- Pengembangan portal web atau aplikasi seluler khusus universitas yang mengagregasi semua informasi terkait kegiatan mahasiswa, peluang magang, beasiswa dan kompetisi. Portal ini harus mudah diakses dan diperbarui secara berkala.
- Meskipun LLDIKTI XV tidak secara langsung memberikan pelatihan manajemen waktu kepada mahasiswa, LLDikti XV mendorong perguruan tinggi (PTS) untuk mengadakan program atau pelatihan terkait pengembangan diri, termasuk manajemen waktu, untuk menyeimbangkan kuliah dan kegiatan organisasi.
- Pengembangan minat, bakat, dan prestasi mahasiswa melalui pola pembinaan, pendampingan maupun menyelenggarakan event – event kompetisi mahasiswa.
- LLDIKTI mengelola dan menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi, yang mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan Biaya Pendidikan (BBP), untuk membantu mahasiswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu. KIP Kuliah memberikan pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup, sedangkan BBP membebaskan biaya pendidikan.
- LDIKTI dan perguruan tinggi perlu langkah seperti peningkatan kapasitas melalui

program KKN Tematik, pembinaan karakter dan soft skill, pendampingan intensif, sosialisasi *achievement-based* program, fasilitasi jejaring profesional (*career center*) dan penciptaan lingkungan kampus yang suportif untuk mendorong partisipasi dan pencapaian mahasiswa.

9. Upaya Perbaikan

- LLDikti Wilayah XV melakukan peningkatan sosialisasi kebijakan dan program yang mendukung IKU 2.2 secara terencana dan berkelanjutan kepada perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan melalui bimbingan teknis melalui luring maupun daring forum koordinasi antar pimpinan serta pemanfaatan media digital.
- LLDikti wilayah XV melakukan upaya perbaikan terhadap permasalahan manajemen waktu dengan mendorong perguruan tinggi untuk melakukan penyesuaian perencanaan akademik dan pengelolaan beban studi mahasiswa agar lebih proporsional.
- Dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian IKU 2.2 LLDikti XV mendorong optimalisasi dukungan finansial melalui pengalokasian anggaran secara prioritas pada program – program yang berdampak langsung terhadap capaian indikator kinerja.
- LLDikti Wilayah XV melakukan penguatan aspek mental dan motivasi mahasiswa melalui kegiatan pembinaan, monitoring, dan pemberian apresiasi atas partisipasi dan prestasi yang dicapai. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian serta partisipasi aktif mahasiswa dalam mendukung pencapaian IKU 2.2.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan LLDikti Wilayah XV setiap tahunnya, memberikan gambaran sebagian perguruan tinggi yang mengalami kendala dalam melaporkan kegiatan kemahasiswaan khususnya terkait prestasi mahasiswa. Fasilitasi terhadap peningkatan minat dan kreativitas mahasiswa pun dilakukan dengan lebih intensif sepanjang tahun 2025 sehingga semakin menambah motivasi mahasiswa untuk meningkatkan jumlah pengajuan proposal PKM. Selain itu, antusiasme PTS semakin tinggi untuk mengikuti kompetisi baik tingkat nasional maupun internasional.

c. Indikator Kegiatan (IK) 2.3. Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi.

Meningkatnya efektifitas sosialisasi kebijakan Pendidikan tinggi (presentase PTS yang mengimplementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba dan anti korupsi. Dimana IKU ini pada tahun – tahun sebelumnya merupakan bagian dari tim pembelajaran dan kemahasiswaan (BELMAWA), pada capaian IKU tersebut pada tahun 2021 hingga 2025 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan selalu tercapai sesuai target yang ditetapkan pada Renstra ataupun Perjanjian Kinerja (PK).

LLDikti Wilayah XV melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pusat penguatan karakter (PUSPEKA) Kemdiktisaintek yang bertujuan menciptakan output yang di dapatkan dari tercapainya indikator kinerja ini adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkebhinekaan melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global.

Semakin meningkatnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi di perguruan tinggi, antar lain perilaku intoleransi, kekerasan seksual, perundungan dan korupsi berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta menurunnya kualitas perguruan tinggi.

Terkait hal diatas kemdiktisaintek mengambil langkah strategis untuk mencegah dan menangani berbagai penyimpangan yang diwujudkan dengan pengembangan SDM yang unggul, berkompetensi dan berkarakter.

Dalam menjalankan tugasnya terdapat dua pendekatan yang digunakan yaitu penguatan dan penuntasan, penguatan yang dimaksud adalah mengantisipasi ancaman terhadap ideologi Pancasila melalui penguatan profil pelajar Pancasila (PPP) inklusifitas dan kebinekaan. Sedangkan untuk penuntasan terkait dengan 3 (tiga) dosa besar Pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan dan intoleransi serta penuntasan penyalahgunaan narkoba dan isu kritis lainnya.

Di triwulan IV, terdapat 35 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah memiliki Satgas PPKPT, sementara 22 PTS lainnya masih dalam proses pembentukan Satgas atau belum memiliki Satgas sama sekali. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya yang lebih serius dalam mendukung implementasi kebijakan tersebut, serta memberikan pemahaman kepada seluruh civitas akademika tentang pentingnya peran aktif dalam menciptakan kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, kegiatan ini juga akan melakukan sosialisasi terkait aturan terbaru Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, yang mengatur mengenai Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.

1. Definisi Operasional

PTS yang sudah mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi merupakan PTS yang sudah mengikuti kegiatan sosialisasi mengenai antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan dan antikorupsi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI Wilayah XV. Dengan catatan: Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh LLDIKTI, PTS yang diperhitungkan dalam perhitungan indikator ini adalah PTS yang telah melakukan tindak lanjut dari sosialisasi misalnya pembentukan satgas, penyusunan kebijakan, SOP, dll.

Berikut kriteria dan ketentuan utama pembentukan satuan tugas Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (satgas PPKPT) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi antara lain:

- Setiap perguruan tinggi wajib membentuk Satgas PPKPT sebagai wadah pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus
- Jika perguruan tinggi belum memiliki Satgas karena keterbatasan sumber daya manusia, pembentukan dapat disesuaikan dengan kemampuan institusi, tetapi harus dibentuk minimal anggota Satgas berjumlah ganjil dan minimal terdiri atas 3 (tiga) orang hal ini dimaksudkan agar pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan dapat menghasilkan keputusan yang jelas.
- Anggota Satgas berasal dari berbagai unsur di perguruan tinggi, minimal mencerminkan keterwakilan dan dari sifitas akademika (misalnya dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa). Ketua dan sekretaris di pilih oleh anggota Satgas sendiri secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- Kedudukan dan peran Satgas PPKPT berada sebagai unit internal perguruan tinggi yang bertugas membantu pemimpin perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan, pedoman, serta pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus. Tugas utama meliputi pemberian sosialisasi, menerima dan menindaklanjuti laporan kekerasan, melakukan koordinasi internal, memfasilitasi bantuan kepada korban dan saksi serta menyampaikan laporan tahunan kepada pimpinan perguruan tinggi.
- Bagi perguruan tinggi yang belum membentuk satgas PPKPT paling lama 6 (enam) bulan setelah Permendikbudristek ini di undangkan maka batas pembentukan secara formal jatuh sekitar April – Mei 2025. Satgas yang sudah ada berdasarkan Permendikbudristek Nomor

30 Tahun 2021 dapat tetap digunakan, tetapi wajib menyesuaikan struktur dan tugasnya sesuai Permendikbudristek 55/2024 jika jumlah anggotanya belum memenuhi ketentuan baru, maka harus ditambah.

- Perguruan tinggi juga diharuskan meninjau dan menyesuaikan kebijakan internal (SOP, Pedoman Penanganan Kekerasan, Prosedur Pelaporan Internal) agar selaras dengan ketentuan Permendikbudristek 55 Tahun 2024.
- Pembentukan satgas PPKPT harus dilaporkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV atau satuan pembina perguruan tinggi sesuai wilayahnya.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Indikator kinerja ini dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Keterangan:

n = jumlah PTS yang memiliki kebijakan antitoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkotika dan antikorupsi.

t = total jumlah mahasiswa di PTS wilayah kerja LLDIKTI.

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kegiatan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 pada tabel 3.16:

Tabel 3.16. Capaian IK 2.3 Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan dan anti korupsi.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025
Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan Tinggi	Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	61,40

Sumber Data : LLDikti XV

Capaian indikator kinerja IK 2.3 pada tahun 2025 sebesar 61,40 % dengan target perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 51 PTS.

4. Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada periode pelaporan tahun 2025, indikator kinerja utama (IKU) 2.3 menunjukkan bahwa dari total 57 PTS yang menjadi binaan, terdapat 35 PTS yang membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Sementara itu masih terdapat 22 PTS yang belum membentuk Satgas PPKPT. Dengan kondisi tersebut, capaian kinerja IKU 2.3 realisasi tercatat sebesar 61,40% di triwulan IV, yang menggambarkan bahwa mayoritas PTS telah menindaklanjuti kebijakan pembentukan Satgas PPKPT, meskipun belum seluruhnya memenuhi target yang diharapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat kesiapan masing-masing PTS, baik dari sisi pemahaman regulasi, ketersediaan sumber daya manusia maupun dukungan kebijakan internal perguruan tinggi.

Tabel 3.17. Capaian IK 2.3 Persentase PTS yang implementasi kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti korupsi.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi.	51	86	168,62	51	61,40	120,39

Sumber Data : LLDikti XV

Pada Tahun 2024 target IK.3.1 adalah 51 % dengan realisasi sebesar 86 % dan capaian 168,62 Sedangkan Tahun 2025 Capaian IK.3.1 dengan target 51 % dengan realisasi 61,40 % dan capaian 120,39 % dengan jumlah PTS yang memnetuk SATGAS PPKPT sebanyak 35 PTS.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

a. Sosialisasi Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT pada PTS Lingkup LLDikti XV Tahun 2025

Sejumlah isu dosa besar pendidikan, berupa kekerasan seksual, perundungan, dan Intoleransi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani di lingkungan pendidikan tinggi. Meningkatnya berita terkait kasus kekerasan marak beredar di media sosial diantaranya dugaan kekerasan seksual Rektor Universitas Negeri Makassar hingga kasus perundungan pada mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal. Kasus lain yang terjadi adalah keluhan mahasiswa atas kesulitan dalam memperjuangkan kasus dugaan kekerasan seksual yang la alami di kampus melalui satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi (Satgas PPKPT).

Kesadaran akan pentingnya menciptakan kampus yang aman mendorong lahimya berbagai kebijakan nasional, termasuk Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Kebijakan ini menempatkan setiap perguruan tinggi sebagai garda terdepan dalam membangun sistem perlindungan yang terpadu mulai dari edukasi, pencegahan, hingga prosedur penanganan kasus secara profesional, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Dalam ekosistem Ini, LLDIKTI memiliki peran yang sangat strategis Sebagai perpanjangan tangan Kemdiktisaintek, bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta memastikan bahwa seluruh perguruan tinggi di wilayah kerjanya menjalankan kebijakan PPKPT secara efektif. Peran ini sejalan dengan mandat LLDIKTI dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, karena kampus yang aman adalah prasyarat utama bagi terciptanya mutu akademik yang baik. Lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan tidak hanya melindungi hak-hak mahasiswa dan dosen, tetapi juga memperkuat reputasi dan kredibilitas perguruan tinggi. Tugas LLDIKTI juga memastikan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki Satgas yang kompeten, memahami tata kelola penanganan kasus, serta mampu menjalankan fungsi edukasi, pencegahan, han, dah penanganan secara terstruktur dan menjamin implementasi kebijakan PPKPT berjalan konsisten di seluruh perguruan tinggi di wilayah kerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk menguatkan peran dan kapasitas Satgas PPKPT maka Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV melakukan kegiatan sosialisasi Penguatan Kapasitas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Pendidikan Tinggi (Satgas PPKPT) lingkup LLDikti XV Tahun 2025.



Gambar 3.23. Sosialisasi Penguatan Kapasitas Satgas PPKPT pada PTS Lingkup LLDikti XV Tahun 2025

b. Monev SATGAS PPKPT Tahun 2025

Sekretariat Satgas PPKPT pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan dan progress pembentukan satgas PPKPT pada perguruan tinggi swasta di STIKOM Uyelindo Kupang dan Universitas Aryasatya Deo Muri.



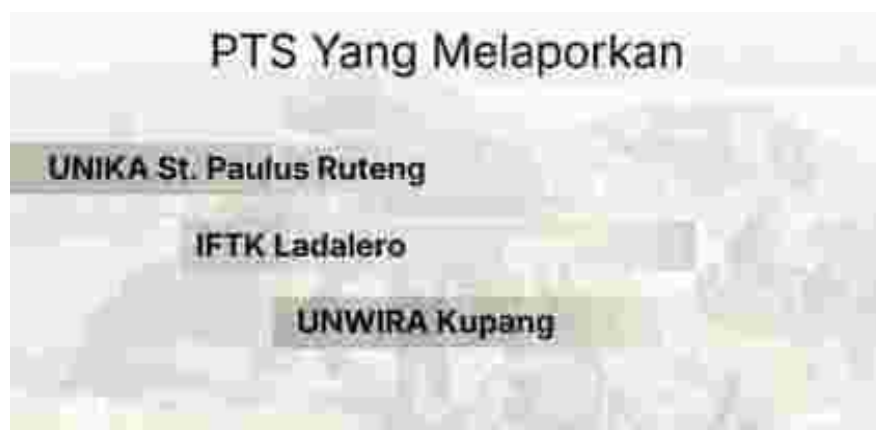


Sumber Data : Tim Kerja Humas

Gambar 3.24. Monev SATGAS PPKPT pada STIKOM Uyelindo Kupang dan Aryasatya Deo Muri

c. Fasilitas Pengaduan dan Pelaporan Terkait Dugaan Pelanggaran Anti Dosa Pendidikan dan Integritas Akademik

Dalam rangka melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan tinggi sesuai Permendiktisaintek nomor 1 tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan juga peningkatan implementasi Permendikbudristek Nomor 55/2024 tentang Satgas PPKPT. LLDikti Wilayah XV sebagai institusi pemerintah yang berada di bawah Kemendiktisaintek dan memiliki stakeholder perguruan tinggi swasta sebanyak 57 PTS. LLDikti Wilayah XV menerima pengaduan tentang pelanggaran anti dosa Pendidikan ataupun integritas akademik seluruh pengaduan yang masuk ke LLDikti Wilayah XV baik melalui aplikasi Lapor, surat elektronik ataupun hardcopy selalu ditindaklanjuti oleh LLDikti Wilayah XV, adapun rincian laporan yang masuk ke LLDikti Wilayah XV dapat diligat pada gambar di bawah ini:

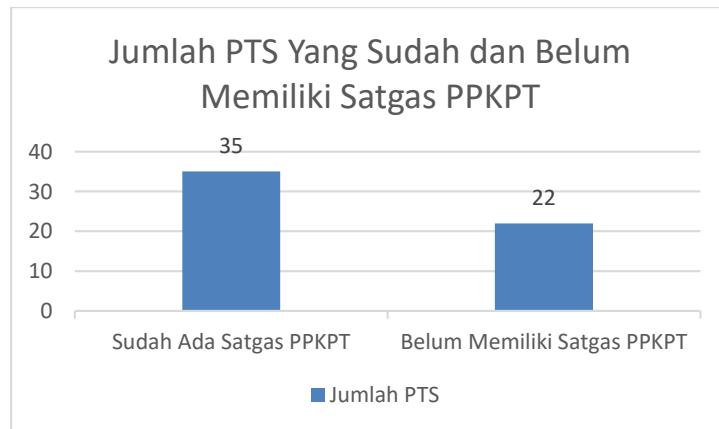


Sumber data : Tim Kerja Humas (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.25. PTS Yang Melaporkan

d. Data SATGAS PPKPT

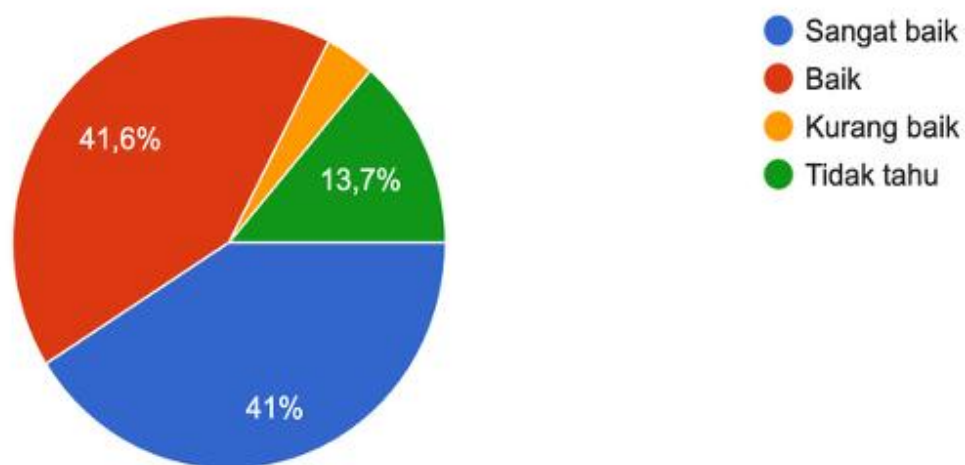
SATGAS PPKPT Dari 57 PTS Lingkup LLDikti Wilayah XV sebanyak 35 PTS telah membentuk Satgas PPKPT dan 22 PTS yang masih dalam proses pembentukan, dengan rincian sebagai berikut:



Sumber Data : Tim Kerja Humas (Data Per 31 Desember 2025)

Grafik 3.2. Data Satgas PPKPT

LLDikti Wilayah XV telah melakukan survey Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi dengan melihat Peran dari Satgas PPKPT dengan jumlah 351 responden dari 57 PTS. Dengan rincian sebagai berikut:



Sumber Data : Tim Kerja Humas (Data Per 31 Desember 2025)

Grafik 3.3. Survey SATGAS PPKPT

No	Nama PTS yang Sudah Membentuk Satgas	Nama PTS yang Belum Membentuk Satgas
1.	Universitas Negeri Frodo	Universitas Negeri Lontar Rote
2.	Universitas Kristen Pina Ungang Sumba	Universitas Stella Maris Sumba
3.	Universitas Katolik Westwale	STHES Maristinus Kupang
4.	Universitas Sri Pelay	STKIP Negeri Timor
5.	Universitas Katolik Widyadarmas Kupang	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Timor
6.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dorya Kasli	Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Sumba
7.	Institut Teknologi dan Telekomunikasi Lenda	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gerasidhera
8.	Sekolah Tinggi Teknologi Hutan Bajawa	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya
9.	Akademi Keunggulan dan Pemberdayaan Kupang	STKIP Muhammadiyah Kaidoko
10.	Akademi Kebidanan Sumba Kaidoko Kelembangan	STKIP Sidiyasa
11.	Polytechnic Elkan Camundia	STKIP Negeri Oesga Fikreka
12.	Konsepak Citra Ka	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Timor
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Giforika SH, MH	Sekolah Tinggi Hukum Ating Calramala Maimara
14.	Institute Pendidikan Sali	STKIP Kupang
15.	Akademi Keperawatan ST Trusmi Sali	Sekolah Tinggi Hukum Ating Mentrak Kupang
16.	Universitas Muhammadiyah Kupang	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maimara
17.	Universitas Katolik Indonesia Santa Paulus Kupang	Politeknik Kasetaten Dori Sumba
18.	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Geyikaba Kupang	Politeknik di Wulubura
19.	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Dorya Kasli	Institut Teknologi Perek
20.	Institut Teknologi Alifeti Fereka	IKUOLA Kogirika dan Telekomunikasi Kaidoko
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) KUPANG	Institut Teknologi Pendidikan Maimara Dori
22.	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Sumba Utara	Akademi Pajawaka Kupang
23.	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dandara Wangi	
24.	STKIP Sipi Pampalia	
25.	Akademi Teknik Kupang	
26.	Akademi Pekerjaan Sosial Kupang	
27.	Akademi Teknik Sains Kaidoko Kaidoko Maimara	
28.	Universitas Kristen Kaiti Wacari	
29.	Universitas Pireka	
30.	Universitas Citra Bangsa	
31.	Universitas Aryadita Dori Mui	
32.	Universitas Muhammadiyah Maimara	
33.	Universitas Karyadarma Kupang	
34.	Universitas Teknologi Kaidoko	
35.	Universitas Persatuan Guru IGALNTT	

Sumber Data : Tim Kerja Humas (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.26. Nama PTS Sudah Membentuk Satgas dan Belum Membentuk Satgas

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 2.3

Melalui kegiatan koordinasi yang baik dengan Pusat Pengembangan Karakter (Puspeka) Kemdikbudristek sebagai fasilitator utama dalam perkembangan Satgas PPKPT di lingkungan pendidikan tinggi, berkoordinasi dengan PTS Pendamping terhadap perkembangan Pembentukan Satgas PPKPT pada PTS Asuh, serta melakukan monitoring dan evaluasi yang rutin oleh LLDikti Wilayah XV setiap bulannya, dengan berhasil memetakan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi PTS dalam mencapai persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, dilakukan berbagai pendekatan baik berupa kegiatan maupun pendampingan terhadap perguruan tinggi. Komitmen LLDikti Wilayah XV berkomitmen mendorong PTS di lingkungannya untuk membentuk satgas PPKPT. Melalui berbagai pendampingan, tahun 2025 sebanyak 35 PTS yang memiliki satgas PPKPT dari 57 PTS yang aktif di lingkungan LLDikti Wilayah XV.

7. Kendala/Permasalahan

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2.3 yang befokus pada penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan di mlingkungan perguruan tinggi pada tahun 2025 masi menghadapi berbagai kendala struktural, kultural dan teknis. Kendala tersebut berdampak pada belum optimalnya capaian target IKU khususnya dalam aspek pemahaman kebijakan, komitmen pimpinan, serta kesiapan sistem pendukung adapun permasalahan utama yang di hadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Minimnya pemahaman dan kesadaran perguruan tinggi tentang pentingnya pencegahan kekerasan terhadap urgensi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Pencegahan kekerasan masih dipersepsikan sebagai isu tambahan atau sekedar kewajiban administrative, bukan sebagai bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi yang sehat dan berkeadilan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa factor antara lain:
 - a. Kurangnya sosialisasi kebijakan PPKPT secara komperhensif dan berkelanjutan.
 - b. Pemahaman yang belum utuh mengenai runag lingkup kekerasan, termasuk kekerasan non fisik, kekerasan berbasis relasi kuasa dan kekerasan yang terjadi dalam kebijakan atau praktik akademik.
 - c. Masih adanya budaya permisif dan normalisasi terhadap perilaku kekerasan, perundungan, maupun diskriminasi di lingkungan kampus.
- Rendahnya komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam implementasi satgas PPKPT secara optimal pada sebagian perguruan tinggi di LLDikti XV mencapai 22 PTS yang belum melakukan pembentukan Satgas PPKPT. Rendahnya komitmen tercermin dari :
 - a. Satgas PPKPT belum diintegrasikan ke dalam struktur kelembagaan yang kuat.
 - b. Belum adanya monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja satgas.
 - c. Minimnya dukungan anggaran dan fasilitas operasional.
 - d. Rendahnya keterlibatan pimpinan dalam mendorong budaya kampus yang aman dan bebas kekerasan.

Kondisi ini menyebabkan fungsi satgas PPKPT belum berjalan efektif, sehingga tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan belum tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Kendala teknis juga menjadi faktor penghambat pencapaian IKU 2.3, khususnya terkait pelaksanaan ujian atau asesmen melalui learning management system (LMS) pada tahun 2025, sejumlah PTS belum dapat mengikuti ujian LMS karena sistem masih dalam proses perbaikan dan penyesuaian dari pusat. Permasalahan ini berdampak pada:

- Terhambatnya proses penguatan kapasitas dan peningkatan kompetensi SDM perguruan tinggi terkait PPKPT.
- Ketidakterpenuhinya indikator partisipasi dan kelulusan ujian LMS sebagai salah satu tolak ukur capaian IKU.

- Ketimpangan capaian antara perguruan tinggi yang sudah dapat mengakses sistem dengan yang belum dapat mengikuti akibat kendala teknis.

8. Langkah Antisipasi

Sebagai antisipasi terhadap minimnya pemahaman dan kesedaran sebagian perguruan tinggi dilakukan langkah – langkah:

- Melaksanakan sosialisasi dan diseminasi kebijakan PPKTP secara masif dan berkelanjutan baik melalui kegiatan daring, luring maupun media informasi resmi.
- Menorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan isu pencegahan kekerasan dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan dan pengembangan budaya kampus.
- Perguruan tinggi perlu didorong untuk menyamakan persepsi terkait implementasi kebijakan yang mengandung lima anti dosa Pendidikan tinggi mulai dari Satgas PPKPT hingga pimpinan perguruan tinggi.
- Mendorong pembentukan Satgas PPKPT yang independen dan berwenang penuh, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, untuk menjadi pusat informasi, pelaporan, dan penanganan kasus.
- Mengadvokasikan agar isu PPKPT menjadi bagian integral dari rencana strategis universitas, bukan hanya proyek sementara.
- Menghubungkan implementasi PPKPT dengan indikator kinerja utama (IKU) pimpinan dan institusi untuk memastikan akuntabilitas.
- Menjalin komunikasi yang proaktif dengan kementerian terkait atau penyedia sistem pusat untuk mendapatkan pembaruan status perbaikan secara berkala, jadwal pasti pemulihan, dan potensi solusi alternatif.

9. Upaya Perbaikan

- Setiap Minggu akan dilakukan pendampingan di dalam grup untuk progres pembentukan Satgas PPKPT.
- Akan ada Aplikasi SAHABAT (satgas harmoni, anti kekerasan dan bantuan tanggap) untuk LLDikti melakukan seleksi administrasi bagi Calon Satgas PPKPT dan Aplikasi SPADA (sistem pembelajaran daring) untuk Ujian LMS.
- Melakukan Kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Satgas PPKPT pada PTS Lingkup LLDikti Wilayah XV.
- Melakukan Monitoring dan Evaluasi Satgas PPKPT di PTS Lingkup LLDikti Wilayah XV.
- Membentuk perguruan tinggi pendamping yang berfungsi untuk mendampingi perguruan tinggi dalam percepatan pembentukan Satgas PPKPT pada PTS asuh/PTS yang belum memiliki Satgas PPKPT.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Keberhasilan ketercapaian IK 2.3 tidak lepas dari arahan dan support dari kepala LLDikti XV yaitu Bapak Prof. Doktor Adrianus Amheka ST., M.Eng dalam mengawal dan mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja Satgas PPKPT selaku pengampu IKU tersebut. LLDikti Wilayah XV juga melakukan koordinasi secara rutin dengan puspeka kemdiktisaintek terkait arahan maupun langkah selanjutnya dari kementerian terkait. Selanjutnya LLDikti Wilayah XV juga melakukan koordinasi dan pertemuan secara intens dengan PTS terkait progress perkembangan pembentukan Satgas PPKPT pada masing – masing PTS.

Capaian LLDIKTI XV dalam PPKPT masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Keberhasilan akan sangat bergantung pada eksekusi langkah antisipasi tersebut untuk mengubah tantangan menjadi komitmen institusional dan solusi teknis yang terintegrasi.

3. Sasaran 3 “Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan”

Penguatan inovasi perguruan tinggi harus sejalan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang didukung oleh SDM perguruan tinggi yang kompeten agar dapat meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat bersaing pada Tingkat nasional, regional, maupun global.

Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan menjadi sasaran LLDikti yang memiliki dua indikator kegiatan (IK) yaitu IK 3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus dan IK 3.2. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra, dengan persentase capaian dari target sebagai berikut:

Meningkatnya Inovasi Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan			
IKK 3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus		IKK 3.2. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	
Target	: 43,20	Target	: 51
Realisasi	: 56,14	Realisasi	: 63,16
Capaian	: 129,95	Capaian	: 123,84

Sumber Data : LLDikti XV

Gambar 3.27. Persentase Capaian IKK 3.1 dan IKK 3.2

a. Indikator Kegiatan (IK) 3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus.

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional adalah peningkatan *link and match* PTS dan mutu pendidikan tinggi bagi dosen yang berkegiatan di luar kampus. Dampak (*outcome*) tercapainya target persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus dapat meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kualitas dosen dan pengajar yang diukur dengan dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, dan hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional. Diharapkan dosen memiliki pengalaman yang dapat ditularkan kepada mahasiswanya untuk menghadapi dunia kerja. Meningkatnya kualitas dosen akan memberikan dampak kepada kualitas lulusan mahasiswanya. IK 3.1 memberikan gambaran mengenai kinerja perguruan tinggi swasta (PTS) dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bagian dari upaya strategis PTS, indikator ini fokus pada peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan tridharma di luar kampus serta pengembangan jaringan

kerjasama dengan mitra eksternal. Kegiatan tersebut meliputi kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti dunia industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat, yang berfungsi untuk memperkuat kualitas akademik, memperluas wawasan dosen, dan meningkatkan relevansi sosial perguruan tinggi. Dengan meningkatkan kontribusi dosen melalui kegiatan di luar kampus dan memperluas kerjasama antar program studi, PTS bertujuan untuk memperkuat peran dan dampaknya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. LLDikti Wilayah XV berperan penting sebagai fasilitator dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Sebagai lembaga yang bertugas membina dan memfasilitasi perguruan tinggi di wilayah kerjanya, LLDikti Wilayah XV memberikan layanan dalam meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan tridharma di luar kampus dan memperluas kerjasama dengan mitra eksternal. Dalam konteks IK 3.1, LLDikti Wilayah XV berfungsi untuk memperkuat dan memfasilitasi upaya perguruan tinggi dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Lembaga industri, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas akademik, memperluas kesempatan bagi dosen dan mahasiswa dalam berkontribusi kepada masyarakat, serta meningkatkan relevansi sosial perguruan tinggi. Dosen harus melaporkan aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di luar kampus utama melalui laman aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) yang saat ini dikelola oleh Direktorat Sumberdaya dan aplikasi *Science and Technology Index* (SINTA) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Kriteria dosen berkegiatan di luar kampus mengacu pada kriteria yang sama untuk dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi sesuai dengan IK 3.1. Minimal 20% (dua puluh persen) dosen di PTS memenuhi kriteria. Kriteria yang terdapat pada IKU perguruan tinggi nomor tiga antara lain:

- Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi:
 - a. Kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan.
 - b. Format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (*sabbatical leave*) atau paruh waktu (*part time*).
 - c. Kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus.
 - d. Dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah SKS yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus.
- Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain:

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

 - a. Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
 - b. Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.
- Kriteria bekerja sebagai praktisi:

Dosen yang berpengalaman sebagai praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

 - a. Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (*full time*), atau paruh waktu (*part time*) di: Perusahaan multinasional, Perusahaan swasta berskala menengah

- ke atas, Perusahaan teknologi global, Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, Organisasi nirlaba nasional dan internasional, Institusi/organisasi multilateral, Lembaga pemerintah, atau BUMN/BUMD.
- Menjadi wiraswasta pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) di Perusahaan multinasional, Perusahaan swasta berskala kecil ke atas, Perusahaan teknologi global, Perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi, atau Organisasi nirlaba nasional dan internasional.
 - Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan: Berkreasi independen atau menampilkan karya, menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional, atau menjadi pendiri (*founder*) atau pasangan pendiri (*co-founder*) sanggar.
- Kriteria bekerja sebagai praktisi:
Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:
- Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi.
 - Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional atau tingkat provinsi.
 - Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.
 - Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Formulasi Perhitungan IK 3.1. adalah sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Keterangan:

n = Jumlah PTS yang memiliki dosen yang berkegiatan di luar kampus sesuai kriteria minimal

t = Total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kegiatan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 pada tabel 3.17:

Tabel 3.18. Capaian IK 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus	56,14

Sumber Data : LLDikti XV

Capaian indikator kegiatan pada tahun 2025 sebesar 56, 14 % melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 43,20 % dengan persentase capaian 129,95 %.

4. Target dan Realisasi Tahun 2025

Realisasi target indikator kinerja IK 3.1 mencapai 56,14% dengan jumlah sebanyak 32 PTS, upaya untuk meningkatkan jumlah dosen yang aktif berkegiatan di luar kampus merupakan transformasi pembelajaran dan kolaborasi tridharma agar dosen memperoleh pengalaman praktis dan memperluas jejaring dengan dunia kerja, industri dan masyarakat.

Tabel 3.19. Capaian IK 3.1 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus	43,20	70,18	162,45	43,20	56,14	129,95

Sumber Data : LLDikti XV

Pada Tahun 2024 target IK.3.1 adalah 43,20% dengan realisasi sebesar 70,18% dan capaian 162,45. Capaian ini ditunjukkan dengan 40 PTS yang menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian dengan 7 skema. Sedangkan Tahun 2025 Capaian IK.3.1 melampaui target dengan realisasi 56,14 % dan capaian 129,95 dengan jumlah PTS yang menyelenggarakan Penelitian dan Pengabdian dengan 8 Skema ; Penelitian Batch I, Penelitian Batch II, Pengabdian Batch I, II, III , Kosabangsa, Pengabdian Program Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Hilirisasi Prototipe, dan Bantuan Jurnal.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Untuk mendukung IK. 3.1 beberapa program dan kegiatan telah dilakukan :

a. Penandatanganan Kontrak dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa seperti dijelaskan dalam Pasal 45 dan 46 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melalui Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Fisbang) menyelenggarakan berbagai program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penelitian, mendorong inovasi, serta mempercepat hilirisasi hasil penelitian dalam berbagai sektor strategis. Program ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya dalam upaya penguatan ekosistem riset dan inovasi yang berorientasi pada kemajuan teknologi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi. Oleh karena itu, Ditjen

Risbang terus berupaya meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan riset dan pengabdian yang menghasilkan inovasi menguntungkan bagi berbagai pihak, seperti pemerintah, industri, dan instansi terkait. Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan dialokasikan bagi dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Sebagai lembaga yang bertanggung jawab membina dan memfasilitasi perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, LLDIKTI Wilayah XV terus berkomitmen menciptakan ekosistem riset yang sehat, kolaboratif, dan berdampak. Salah satu instrumen utama dalam mendukung hal ini adalah partisipasi aktif dalam program pendanaan yang dikelola oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sistem aplikasi Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (BIMA).

Tahun 2025 menjadi momentum penting, di mana terdapat 252 judul penelitian dan 50 judul pengabdian kepada masyarakat dari dosen-dosen PTS lingkup LLDIKTI Wilayah XV yang berhasil mendapatkan pendanaan hibah BIMA. Ini merupakan pencapaian signifikan yang menandakan meningkatnya kualitas proposal, semangat intelektual, dan kesadaran kolektif akan pentingnya peran akademisi sebagai motor inovasi.

Sebagai langkah awal pelaksanaan, kegiatan Penandatanganan Kontrak menjadi sebuah proses formal sekaligus substansial dalam menegaskan komitmen dan tanggung jawab antara pemberi hibah (LLDIKTI XV selaku fasilitator Kemdiktisintek) dan para penerima hibah. Ini adalah ruang edukatif dan administratif yang mempertemukan semangat, struktur, dan integritas dalam satu bingkai perjanjian resmi.



Sumber Gambar : Tim Kerja Kerjasama

Gambar 3.28. Penandatanganan Kontrak dan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

b. Rapat Teknis Fungsi dan Penyamaan Persepsi Kolaborasi dan Riset Bersama

Kegiatan silaturahmi bersama yang melibatkan perwakilan Perguruan Tinggi (PT), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kota Kupang khususnya unsur peneliti dilaksanakan sebagai langkah awal untuk mengkonkretkan Nota Kesepakatan (MoA) antara Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini diarahkan untuk memperjelas ruang lingkup kolaborasi secara lebih eksplisit berdasarkan sektor dan fungsi masing-masing pihak, sekaligus menentukan fokus penelitian bersama yang paling relevan dan strategis bagi daerah.

Dalam kerangka tersebut, LLDIKTI Wilayah XV diposisikan sebagai hubungan konsolidasi yang menjembatani kepentingan dan kapasitas Perguruan Tinggi dengan kebutuhan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Salah satu gagasan utama yang mengemuka adalah pembentukan semacam laboratorium bersama (*shared research platform*) yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai wahana riset kolaboratif jangka panjang. Laboratorium bersama ini diharapkan menjadi simpul integrasi sains, teknologi, dan kebijakan berbasis kebutuhan ril daerah.

Untuk jangka pendek, kolaborasi riset diarahkan pada upaya menjawab tantangan dan permasalahan aktual daerah yang dapat segera diintervensi oleh peneliti. Dalam konteks ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi akan berperan melakukan belanja masalah melalui skema riset bersama yang didanai oleh anggaran kementerian maupun sumber pendanaan lain yang sah. Pendekatan ini menekankan kejelasan peran: siapa melakukan apa, untuk tujuan apa, dan dengan dukungan anggaran dari mana yang seluruhnya menjadi landasan operasional dari *Memorandum Of Understand (MoU)* dimaksud.

Secara spesifik untuk Kota Kupang, isu pengelolaan sampah disepakati sebagai salah satu aspek prioritas. Permasalahan ini dinilai strategis karena dapat ditangani melalui dukungan sumber daya teknologi dan keilmuan yang dimiliki Perguruan Tinggi, tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga untuk mendorong dampak ekonomi melalui intervensi teknologi tepat guna.

Target konkret kolaborasi pada tahun 2026 adalah dihasilkannya *policy brief* bersama, yang disusun melalui riset kolaboratif dengan melibatkan mitra sasaran dan mitra pengguna sebagai bagian integral dari tim peneliti. Selain itu, akan dilakukan peluncuran Panduan Riset 2026 yang memuat berbagai skema penelitian kolaboratif, dengan membuka peluang keterlibatan anggota tim dari luar Perguruan Tinggi, termasuk dari unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Skema ini juga akan disinergikan dengan Direktorat Hilirisasi serta Direktorat Riset dan Pengembangan (Risbang) dalam rangka menginkubasi sains dan teknologi yang berkembang di daerah.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap peneliti dan dosen, disampaikan pula rencana pemberian insentif, khususnya bagi dosen yang berhasil melakukan publikasi pada jurnal bereputasi nasional, seperti jurnal terindeks SINTA 2. Hal ini sejalan dengan kebutuhan peneliti untuk memenuhi dan menambah angka Kredit Unit Minimal (KUM) sebagai bagian dari pengembangan karier akademik.

Direktorat Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek, melalui referensi kebijakan seperti Adaptif, Sinergis, Responsif dan Inovatif (ASRI), akan menjadi rujukan dalam penguatan basis data dan informasi kebijakan riset. Seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pertemuan ini akan dituangkan dalam notulen resmi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sebagai tindak lanjut, disepakati bahwa pada tahun 2026 kolaborasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intensif, dengan frekuensi pertemuan minimal satu kali setiap dua bulan. Untuk memastikan keberlanjutan dan ketercapaian target, akan dibentuk tim ad hoc yang bertugas mengawal, memonitor, dan mengevaluasi seluruh rencana kerja serta tindak lanjut yang menjadi hasil kesepakatan bersama.



Sumber Gambar : Tim Kerja Kerjasama

Gambar 3.29. Rapat Teknis Fungsi dan Penyamaan Persepsi Kolaborasi dan Riset Bersama

c. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Proposal Penelitian Pengabdian Hibah BIMA Tahun 2026

Pendidikan Tinggi (Dikti) mengemban mandat utama yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di NTT, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi telah menjadi prioritas strategis. Namun, terdapat data yang menunjukkan bahwa partisipasi dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat masih tergolong rendah. Meskipun alokasi dana penelitian terus ditingkatkan setiap tahun, hanya sebagian kecil dari ribuan dosen yang berhasil mendapatkan bantuan dana riset. Rendahnya partisipasi ini menjadi perhatian mengingat proposal penelitian yang berhasil didanai dan dipublikasikan, turut berperan penting dalam meningkatkan reputasi akademis dosen, institusi pendidikan, dan lembaga penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kualitas dan kuantitas proposal hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari para dosen menjadi kunci utama. Penulisan proposal penelitian membutuhkan serangkaian pengetahuan khusus, yang meliputi penguasaan metodologi penelitian, kemampuan analisis data, dan kemahiran menyusun tulisan menggunakan bahasa yang baku sesuai kaidah ilmiah. Selain itu, penulis juga dituntut untuk mampu mengomunikasikan ide-ide atau gagasan kompleks secara jelas, ringkas, dan logis. Namun, bagi sebagian besar peneliti dan akademisi di NTT, dalam penulisan proposal penelitian sering kali menjadi tantangan tersendiri, antara lain adalah kesulitan dalam merumuskan masalah penelitian, kurangnya pemahaman mengenai struktur penulisan yang tepat, serta kendala dalam menyesuaikan diri dengan standar penulisan jurnal ilmiah internasional.

Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan, baik praktis maupun teoritis, bagi para penulis, khususnya bagi mereka yang baru memulai penulisan proposal penelitian. Melalui program ini, peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang berbagai aspek krusial

dalam penulisan proposal penelitian, seperti teknik penyusunan kajian literatur, pengembangan argumen yang koheren, serta cara efektif menghindari *plagiarisme*. Bimbingan teknis ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dosen/peneliti dalam menghasilkan proposal yang berkualitas, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah publikasi ilmiah di tingkat internasional. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta secara individu, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan citra akademis dan kualitas pendidikan tinggi di wilayah NTT secara keseluruhan.



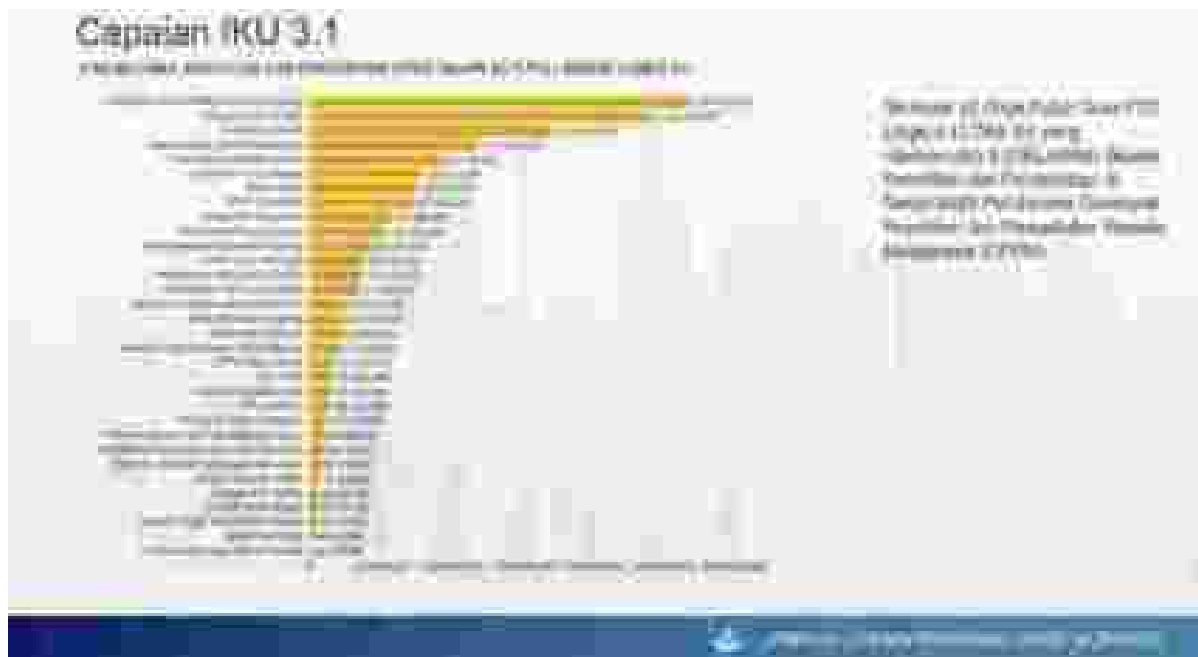
Sumber Gambar : Tim Kerja Kerjasama

Gambar 3.29. Kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Proposal Penelitian Pengabdian Hibah BIMA Tahun 2026

d. Data Dosen Berkegiatan di Luar Kampus melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan data capaian IKU 3.1 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus melalui Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), terlihat bahwa total PTS yang berhasil memperoleh pendanaan PPM Tahun 2025 = 32 PTS, terdapat 25 PTS lainnya di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV yang belum memperoleh pendanaan atau belum dapat meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian & pengabdian di luar kampus. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan kapasitas, baik pada aspek perencanaan, penyusunan proposal, tata kelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM), kualitas penelitian berbasis masalah lokal serta manajemen luaran (*output–outcome–impact*). Dengan demikian, LLDIKTI Wilayah XV memerlukan intervensi sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk pendampingan, asistensi teknis, dan penguatan kelembagaan PPM di PTS.

Tujuan strategi tindak lanjut adalah meningkatkan jumlah dan kualitas proposal PPM yang lolos pendanaan nasional maupun mitra eksternal, mendorong dosen agar memenuhi indikator IKU 3, menghasilkan luaran PPM yang relevan, berkelanjutan, dan berdampak bagi masyarakat (*impactful / problem solving*), membangun budaya riset terapan dan *community engagement* yang berbasis keunggulan lokal.



Sumber Data : Tim Kerja Kerjasama (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.31. Jumlah Dana Penelitian dan Pengabdian (PPM) Tahun 2025 PTS Lingkup LLDikti XV



No	Uraian	Saldo
1	Pembelian BATCH 1	11.506.000,00
2	Pengalihan BATCH 1	2.119.951,000
3	Pembelian BATCH 2	148.910.000
4	Pengalihan BATCH 2	270.780.000
5	Minyak (Prototype)	889.172,000
6	Kese Bangsa	1.538.940,000
7	Bahan (Kuliah)	236.047,000
8	Pengalihan BATCH 2	498.101,000

Sumber Data : Tim Kerja Kerjasama (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.32. Delapan Skema PPM 2025

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 3.1

Keberhasilan LLDikti XV dalam capaian IKU 3.1 yang mengukur persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerjasama dengan mitra dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis dan operasional. Faktor – faktor ini berhubungan dengan upaya LLDikti Wilayah XV dalam memfasilitasi, mendukung dan mengarahkan perguruan tinggi swasta di wilayah tersebut. Faktor kuncinya adalah penerapan kebijakan suportif dan program pendampingan terstruktur yang membantu PTS merancang kegiatan tridharma berdampak.

7. Kendala/Permasalahan

Indikator kinerja utama IKU 3.1 yang mengukur peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di luar kampus pada tahun 2025 masih menghadapi kendala signifikan, khususnya pada 25 perguruan tinggi swasta (PTS) di lingkungan LLDikti Wilayah XV yang belum memperoleh pendanaan atau belum mampu meningkatkan partisipasi dosen secara optimal. Sebagian PTS mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan, penelitian dan pengabdian, baik yang bersumber dari internal perguruan tinggi maupun dari skema pendanaan eksternal (pemerintah, industri dan mitra lainnya) keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan dosen dalam menyusun proposal yang kompetitif dan sesuai dengan standar pendanaan nasional. Minimnya informasi dan pendampingan terkait skema hiba penelitian dan pengabdian yang tersedia. Keterbatasan alokasi anggaran internal PTS untuk mendukung kegiatan tridharma dosen.

8. Langkah Antisipasi

- Melakukan pemetaan 25 PTS yang belum memperoleh pendanaan sebagai dasar intervensi dan pendampingan terarah.
- LLDIKTI Wilayah XV secara rutin mensosialisasikan panduan terbaru pengelolaan program penelitian dan PPM dari kementerian, termasuk perihal klasterisasi perguruan tinggi, skema pendanaan dan mekanisme pelaporan. Ini membantu PTS memahami persyaratan administrasi dan substansi secara lebih baik.
- LDIKTI XV berupaya memperkuat kapasitas riset dosen, dari yang bersifat kompetitif menuju penelitian yang bersifat kolaboratif dan berdampak, baik antar PTS maupun dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau dunia usaha/industri.
- Melalui pendampingan, PTS didorong untuk fokus pada luaran penelitian yang jelas (output, outcome dan impact) dan memastikan pelaporan luaran wajib diunggah tepat waktu melalui platform yang tersedia seperti BIMA.

9. Upaya Perbaikan

Strategi tindak lanjut utama adalah melakukan Pendampingan dan Asistensi Teknis (*Capacity Building*) melalui program yang disarankan yaitu Workshop Penyusunan Proposal Penelitian & PkM sesuai panduan Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DPPM), Mentoring intensif (*coaching clinic*) oleh reviewer nasional, Bimbingan penulisan luar seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), artikel, produk, modul, *policy brief*. LLDIKTI XV dapat mengelompokkan PTS berdasarkan *level readiness*: Cluster A (Mandiri), B (Perlu Pendampingan), C (Pendampingan Intensif).

Penyusunan Pedoman Internal PPM di PTS agar setiap PTS perlu memiliki SOP dan Pedoman Internal PPM yang memuat:

- Standarisasi topik berbasis isu strategis wilayah NTT (stunting, kemiskinan, literasi, energi, agro-maritim, pariwisata, disrupsi digital).
- Mekanisme rekrutmen dan penilaian proposal.
- Sistem monitoring & evaluasi (*logbook*, *timeline* dan indikator luaran).

- Skema *reward & punishment* berbasis luaran.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Tahun 2025

keberhasilan LLDikti Wilayah XV dalam IKU 3.1 didorong oleh pendekatan fasilitasi, kolaborasi, dan evaluasi yang kuat, yang secara efektif mengintegrasikan program dosen berkegiatan di luar kampus dengan kemitraan strategis antara program studi dan industri atau institusi lain. Hal ini menghasilkan peningkatan relevansi pendidikan tinggi dan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.

b. Indikator Kegiatan (IK) 3.2. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra, dengan persentase capaian dari target sebagai berikut.

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia unggul. Dalam upaya meningkatkan daya saing, banyak PTS yang berhasil meningkatkan kinerja institusinya melalui kerja sama program studi dengan berbagai mitra strategis, seperti industri, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional. Berdasarkan data terbaru, persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerjanya menunjukkan tren positif. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah program studi yang aktif menjalin kemitraan. Kolaborasi ini memberikan manfaat ganda, baik bagi program studi maupun mitra yang terlibat. Bagi program studi, kerja sama ini memperluas cakupan kurikulum berbasis kebutuhan pasar, meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja, serta membuka peluang magang atau penelitian kolaboratif. Sementara itu, bagi mitra, kerja sama ini menjadi peluang untuk mengakses talenta muda dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Peningkatan kinerja PTS ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci sukses dalam mengintegrasikan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan terus memperluas jaringan kerja sama, Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kualitas akademik, daya saing institusi, dan kontribusi pada pembangunan nasional.

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional adalah peningkatan link and match PTS dan mutu pendidikan tinggi untuk bekerja sama dengan mitra dunia usaha dan industri. Dampak (*outcome*) tercapainya target persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra dapat meningkatkan inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi. LLDikti Wilayah XV terus mendorong perguruan tinggi untuk bekerja sama dengan mitra kelas dunia untuk memiliki reputasi global. Kerja sama dengan sesama perguruan tinggi, dunia usaha/industri dan pihak lain baik dalam maupun luar negeri, memungkinkan perguruan tinggi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Ini berkontribusi langsung pada peningkatan mutu perguruan tinggi. Sasaran dari capaian IK 3.2 adalah meningkatkan inovasi perguruan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Inovasi ini bisa berupa peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum atau peningkatan kapasitas pengajaran melalui kolaborasi dengan mitra-mitra eksternal. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah persentase Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Kriteria Kemitraan:

- pengembangan kurikulum bersama.
- menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- menyediakan kesempatan kerja.

- mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi.
- Serta dapat melakukan kegiatan tridarma lainnya, misalnya kemitraan penelitian dan/atau memberikan pelatihan bagi dosen dan instruktur.

Kriteria mitra:

- perusahaan multinasional.
- perusahaan nasional berstandar tinggi.
- perusahaan teknologi global.
- perusahaan rintisan (*startup company*) teknologi.
- organisasi nirlaba kelas dunia.
- institusi/organisasi multilateral.
- perguruan tinggi yang masuk dalam daftar berdasarkan bidang ilmu.
- perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan (untuk PTN Vokasi).
 - a. instansi pemerintah, BUMN dan/atau BUMD.
 - b. rumah sakit.
 - c. UMKM.
 - d. Lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional.
 - e. Lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Formulasi perhitungan IK 3.2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{n}{t} \times 100$$

Keterangan

n= Jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja dengan mitra sesuai kriteria minimal
t= Total jumlah PTS di wilayah kerja LLDikti

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 indikator kegiatan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 210/M/2023 pada tabel 3.20:

Tabel 3.20. Capaian IK. 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025
Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam Rangka meningkatkan mutu pendidikan	Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	63,16

Sumber Data : LLDikti XV

Capaian indikator kinerja pada tahun 2025 sebesar 63,16 % dengan target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 sebesar 51 % dengan persentase capaian 123.84 %.

4. Target dan Realisasi Tahun 2025

Dari total 57 PTS yang berada dibawah binaan LLDIKTI Wilayah XV, terdapat 36 PTS yang telah melaksanakan ketentuan sesuai indikator yang ditetapkan. Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja IKU 3.2 target yang dicapai adalah 63,16%

Tabel 3.21. Capaian IK 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target PK	Realisasi	Capaian	Target PK	Realisasi	Capaian
Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridarma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.	51	61,40	120,39	51	63,16	123,84

Sumber Data : LLDikti XV

Pada tahun 2024 target PK sebesar 51 % realisasi sebesar 61,40 % dengan persentase capaian sebesar 120,39 % dan pada tahun 2025 target PK sebesar 51 % dengan realiasi sebesar 61,16 % dan persentase capaian sebesar 63,16 %.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator kinerja ini, antara lain:

a. Kegiatan Rembug Bersama Dalam Rangka Implementasi Nota Kesepakatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek) dengan Pemerintah Daerah

Kegiatan Rembug Bersama Dalam Rangka Implementasi Nota Kesepakatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek) dengan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rembug bersama ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani, dengan maksud dan tujuan untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi potensi kerja sama, serta merumuskan rencana aksi bersama dalam mengimplementasikan program-program prioritas di bidang pendidikan, riset, dan teknologi di tingkat daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang peranan vital dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana kerja bersama (joint action plan) implementasi Nota Kesepakatan, menentukan pembagian tugas dan peran antar pemangku kepentingan, menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, memperkuat komitmen kemitraan strategis berbasis sinergi program dan mengidentifikasi potensi pendanaan dan sumber daya kolaboratif.

Dari kegiatan ini tercapainya pembentukan Rencana Tindak Lanjut Bersama anatara lain:

- Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Bersama (*Joint Action Plan*) untuk implementasi Nota Kesepakatan Kemendikristek-Pemprov NTT.
- Pembentukan Tim Teknis Kolaboratif terdiri atas unsur: LLDikti wilayah XV, Pemprov NTT (Bappelitbangda & BRIDA), Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha/Industri
- Fokus Program untuk tahun 2026 antara lain Penguatan kapasitas riset terapan di bidang pangan, kesehatan, energi, dan digitalisasi, Implementasi program *One Campus One Product* dan hilirisasi hasil riset, Pemberdayaan desa melalui kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten, Replikasi program KOSABANGSA sebagai model kerja kolaboratif kampus-desa
- Penyusunan mekanisme Monitoring & Evaluasi (Monev untuk setiap kegiatan kolaboratif.
- Penguatan jejaring kemitraan nasional dan internasional guna mendorong mobilitas akademik dan riset bersama.
- Serta berbagai pembahasan bersama mengenai Fokus kegiatan yaitu Penguatan sinergi hasil riset perguruan tinggi dengan kebijakan pembangunan daerah, Optimalisasi program KKN Tematik dan KOSABANGSA berbasis potensi lokal, Pemetaan sumber daya dan kebutuhan penelitian daerah, Kolaborasi dengan dunia usaha (KADIN, BI) untuk mendukung hilirisasi produk, dan Pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi kolaboratif



Sumber Gambar : Tim Kerja Kerjasama

Gambar 3.33. Kegiatan Rembug Bersama Dalam Rangka Implementasi Nota Kesepakatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek) dengan Pemerintah Daerah

b. Konsorsium Trilateral Indonesia Timur Tahun 2025

Tantangan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif antar wilayah. Konsorsium trilateral ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi, berbagi praktik baik, serta

mendorong program bersama seperti peningkatan akreditasi, penjaminan mutu, penelitian terapan, dan pengembangan SDM dosen. Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, tantangan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di wilayah Timur Indonesia masih signifikan, mencakup keterbatasan infrastuktur, tenaga pengajar berkualitas, serta akses ke sumber daya Pendidikan yang memadai. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pembentukan Konsorsium Pendidikan Tinggi dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di kawasan tersebut.

Wilayah Timur Indonesia meliputi provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini masih menghadapi kendala besar dalam sektor Pendidikan tinggi. Keterbatasan infrastruktur fisik, seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi, membatasi kemampuan perguruan tinggi untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal kepada mahasiswa. Selain itu, jumlah tenaga pengajar dengan kualifikasi doctoral dan kemampuan penelitian yang memadai masih sangat minim dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Tantangan ini diperparah oleh akses yang terbatas ke jejaring kolaborasi akademik, baik secara nasional maupun internasional. Perguruan tinggi di wilayah Timur Indonesia sering kali kurang terhubung dengan pusat-pusat penelitian dan inovasi, sehingga sulit untuk bersaing dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah diatas adalah melalui wadah Konsorsium Pendidikan Tinggi. Melalui konsorsium, perguruan tinggi di wilayah Timur Indonesia dapat berbagi tenaga pengajar berkualitas, program pelatihan, dan materi pembelajaran. Misalnya, dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lebih maju di Jawa atau Sulawesi dapat memberikan kuliah tamu atau bimbingan penelitian melalui skema kolaborasi daring maupun luring. Hal ini dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga pengajar berkualitas di perguruan tinggi daerah. Konsorsium juga memungkinkan perguruan tinggi berbagi fasilitas, seperti laboratorium dan perpustakaan digital. Misalnya, Universitas yang memiliki fasilitas laboratorium modern dapat membuka akses bagi mahasiswa dari Perguruan Tinggi mitra di wilayah Timur Indonesia. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dapat diperluas melalui kerja sama pengembangan platform daring. Kolaborasi penelitian dalam konsorsium juga dapat membantu perguruan tinggi di wilayah Timur Indonesia untuk lebih aktif dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan isu-isu local. Contohnya, Penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam atau pemberdayaan masyarakat adat dapat dilakukan secara Bersama-sama dengan dukungan pendanaan dari pemerintah atau donor internasional. Pada tanggal 12 November 2025, LLDIKTI Wilayah XV bersama dengan LLDIKTI Wilayah VIII dan LLDIKTI Wilayah XII melakukan Sinergi dan Kolaborasi Konsorsium Trilateral Indonesia Timur dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.





Sumber Gambar : Tim Kerja Kerjasama

Gambar 3.33. Konsorsium Triteral Indonesia Timur Tahun 2025

c. Data Program Studi yang Bekerja Sama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Mitra Strategis

Berdasarkan capaian IKU 3.2 (Program Studi yang Bekerja Sama dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Mitra Strategis), ditunjukkan bahwa sebanyak 36 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dari total 57 PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV telah melaksanakan kolaborasi atau kerja sama dengan mitra melalui sistem pelaporan yang terverifikasi, sehingga capaian kinerja berada pada angka 63,16% pada Triwulan III, masih terdapat 21 PTS (36,84%) yang belum memiliki atau belum memperkuat kerja sama program studi melalui akun LaporKerma nasional, baik karena belum menyusun perencanaan kerja sama secara sistematis, belum mengunggah dokumen kerja sama, atau masih menghadapi kendala teknis dalam penggunaan sistem. Hal tersebut menunjukkan bahwa arus kolaborasi PTS dengan mitra eksternal belum merata, sehingga perlu adanya intervensi strategis untuk memperluas jejaring kerja sama yang relevan, aplikatif, dan berorientasi output serta dampak sesuai standar.



Sumber Data : Tim Kerja Kerjasama (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.35. Data Jumlah Dana Penelitian dan Pengabdian Tahun 2025 PTS Lingkup LLDIKTI XV

Data tersebut diatas menunjukkan capaian pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) LLDIKTI Wilayah XV untuk Tahun Anggaran 2025. Total dana yang berhasil diperoleh oleh seluruh PTS adalah Rp 16.226.918.000, yang bersumber dari berbagai skema pendanaan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) dan program pendanaan lainnya yang relevan. Pendanaan ini diperoleh melalui beberapa jenis skema, yaitu:

- a. Penelitian Batch 1
- b. Pengabdian Batch 1
- c. Penelitian Batch 2
- d. Pengabdian Batch 2
- e. Hilirisasi/Prototipe
- f. Program KOSABANGSA
- g. Badan Eksekutif
- h. Pengabdian Batch 3

Dari total pendanaan tersebut, skema Penelitian Batch 1 menjadi penerima terbesar dengan nominal Rp 11.306.850.000, disusul oleh Pengabdian Batch 1 sebesar Rp 2.119.951.000, dan Program KOSABANGSA sebesar Rp 1.518.904.000. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PT di wilayah LLDIKTI XV masih dominan mengakses pendanaan untuk kegiatan penelitian dibandingkan dengan hilirisasi dan program prototipe, meskipun tren integrasi riset–hilirisasi mulai terlihat melalui beberapa perguruan tinggi yang sudah menembus skema tersebut. Jika dilihat berdasarkan peringkat perguruan tinggi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang menjadi penerima pendanaan terbesar dengan total Rp 2.694.729.000, disusul oleh Universitas Nusa Nipa sebesar Rp 2.444.509.000, dan Universitas Flores dengan total Rp 1.719.100.000. Sementara beberapa perguruan tinggi lainnya menerima pendanaan dalam jumlah bervariasi sesuai dengan keberhasilan proposal serta kelengkapan administratif dan teknis pengusulan.

Interpretasi Kinerja

- a. Distribusi pendanaan menunjukkan bahwa kapasitas proposal, kualitas riset, dan tata kelola LPPM/PT bervariasi antar perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi dengan sistem manajemen riset yang lebih mapan cenderung memperoleh pendanaan lebih besar.
- c. Program hilirisasi, prototipe, dan KOSABANGSA menunjukkan adanya peningkatan orientasi riset berbasis problem solving dan pemberdayaan masyarakat.

Makna dan Implikasi Strategis hasil pendanaan ini mencerminkan bahwa: PTS di wilayah timur Indonesia memiliki potensi dan kapasitas riset yang kompetitif secara nasional, Penguatan ekosistem riset, inovasi, dan kolaborasi menjadi aspek penting untuk meningkatkan keberlanjutan pendanaan, Ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas proposal, roadmap riset, dan hilirisasi produk secara lebih sistematis.



Sumber Data : Tim Kerja Kerjasama (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.36. Perbandingan Anggaran Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan data perbandingan anggaran hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PPM) untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV, terlihat bahwa terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, total dana hibah yang berhasil diperoleh oleh PTS di wilayah LLDIKTI XV adalah sebesar Rp 9.112.685.000. Sementara pada tahun 2025, jumlah pendanaan tersebut meningkat menjadi Rp 16.226.918.000. Dengan demikian, terjadi kenaikan anggaran sebesar 78,07% dari tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran dan keterbatasan fasilitas lembaga di tahun 2025, namun kualitas pengusulan proposal, kemampuan kompetisi, dan kesiapan sistem riset serta pengabdian di PTS semakin membaik. Hal ini juga mencerminkan bahwa ekosistem riset dan inovasi di wilayah Nusa Tenggara Timur semakin berkembang, baik dari sisi sumber daya manusia (SDM), tata kelola kelembagaan, maupun kualitas kolaborasi dan kemitraan yang dilakukan oleh perguruan tinggi.

Kenaikan pendanaan ini juga menjadi indikator bahwa dosen dan lembaga penelitian di PTS telah mampu bersaing secara nasional, serta memiliki kapasitas untuk menghasilkan proposal yang layak, kredibel, dan relevan terhadap kebutuhan pembangunan berbasis riset dan pemberdayaan masyarakat. Makna strategis yang perlu diintervensi adalah Peningkatan keterlibatan dosen dan perguruan tinggi dalam kompetisi hibah nasional, Penguatan budaya riset dan pengabdian berbasis luaran serta dampak nyata (impactful research), Meningkatkan tata kelola LPPM dan perencanaan program berbasis data dan analisis kebutuhan daerah, Adanya peluang besar untuk percepatan hilirisasi produk inovasi lokal melalui pendanaan berkelanjutan.

Tabel 3.22. PTS Yang Melaporkan Kerjasama Dengan Mitra

NO	Nama	MoU	Moa	IA	Total	Status
1	Politeknik Cristo Re	2	0	0	2	Aktif
2	Politeknik Elbajio Commodus	30	35	4	68	Aktif
3	Akademik Kebidanan Santa Elisabeth Kefamenanu	26	1	0	27	Aktif
4	Akademik Keperawatan ST Elisabeth Lela	3	0	0	3	Aktif
5	Akademik Keuangan dan Perbankan Effata Kupang	5	0	0	5	Aktif
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St. Elisabeth Keuskupan Maumere	1	5	0	6	Aktif
7	Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa	32	4	3	39	Aktif
8	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Karya	1	1	0	2	Aktif
9	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stella Maris Sumba	9	1	0	10	Aktif
10	Stikes Santu Paulus Ruteng	0	2	0	2	Aktif
11	SKIP Sinar Pancasila	0	2	0	2	Aktif
12	STKIP SOE	7	0	0	7	Aktif
13	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Citra Bakti	74	24	3	101	Aktif
14	Stikes Maranatha Kupang	2	0	0	2	Aktif
15	Sekolah Tinggi Informatika Komputer Artha Buana	27	0	0	27	Aktif
16	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Fajar Timur	7	2	0	9	Aktif
17	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula	1	0	0	1	Aktif
18	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Uyelindo Kupang	19	14	1	34	Aktif
19	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang	1	0	0	1	Aktif
20	STKIP Santu Paulus	7	0	0	7	Aktif
21	Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladalero	11	1	5	17	Aktif
22	Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ladalero	6	0	0	6	Aktif
23	IKIP Muhamadiya Maumere	24	12	32	68	Aktif
24	Universitas Katoli Weetebula	73	1	0	74	Aktif
25	Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	75	98	41	214	Aktif
26	Universitas Citra Bangsa	10	4	2	16	Aktif
27	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	28	3	0	31	Aktif
28	Ubiversitas Kristen Wira Wacana Sumba	53	19	3	75	Aktif
29	Universitas San Pedro	0	4	0	4	Aktif
30	Universitas Karyadarma Kupang	1	0	0	1	Aktif
31	Universitas Tribuana Kalabahi	41	1	0	42	Aktif
32	Universitas Nusa Nipa	43	66	2	111	Aktif
33	Universitas Muhammadiyah Kupang	8	8	0	16	Aktif
34	Universitas Kristen Artha Wacana	75	2	0	77	Aktif
35	Universitas Flores	40	30	1	71	Aktif
36	Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	31	16	0	47	Aktif
Total		773	356	97	1225	

Sumber Data : LaporKerma : Tim Kerja Kerjasama (Data Per 31 Desember 2025)

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 3.2

LLDikti Wilayah XV melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Hal ini memupuk komunikasi dan hubungan yang kuat, yang sangat penting untuk memfasilitasi kemitraan yang sukses antara lembaga pendidikan tinggi dan berbagai

mitra. Secara efektif, LLDikti Wilayah XV berfungsi sebagai fasilitator utama, membuka jalan bagi PTS di lingkup LLDikti XV untuk menjalin kolaborasi yang semakin luas.

7. Kendala/Permasalahan

- Masih terdapat 21 PTS (36,84%) yang belum memiliki atau belum memperkuat kerja sama program studi melalui akun Laporan Kerjasama (LaporKerma) nasional, baik karena belum menyusun perencanaan kerja sama secara sistematis, belum mengunggah dokumen kerja sama, atau masih menghadapi kendala teknis dalam penggunaan sistem.
- Lemahnya tata kelola dan koordinasi internal terlihat dari belum adanya unit atau pejabat khusus yangangani kerjasama institusional. Kerjasama program studi belum menjadi bagian dari perencanaan strategis intitusi.
- Keterbatasan jejaring dan kemitraan eksternal baik pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, maupun lembaga non pemerintah.
- Rendahnya komitmen dan dukungan pimpinan perguruan tinggi sehingga berdampak pada minimnya arahan kebijakan terkait penguatan kerjasama, tidak adanya target dan evaluasi kinerja kerjasama program studi, kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung.

8. Langkah Antisipasi

- Meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Program Studi (Prodi) yang menjalin kerja sama aktif dan terukur dengan mitra, yang merupakan fokus utama IKU 3.2.
- Optimalisasi pemanfaatan akun LaporKerma sebagai basis data nasional juga secara spesifik ditujukan untuk verifikasi dan pelaporan IKU 3.2.
- Dorongan untuk menghasilkan program konkret, bukan sekadar dokumen administratif (MoU/PKS), serta penguatan kapasitas SDM pengelola kerja sama, semuanya mendukung pencapaian IKU 3.2 yang menekankan pada kerja sama yang berdampak dan berkelanjutan.
- Pengembangan dan fasilitasi jejaring kemitraan dengan pertemuan dan forum temu mitra antara PTS dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri.
- Penguatan komitmen pimpinan dan integrase dengan IKU, dengan cara mengaitkan capaian kerjasama program studi dengan evaluasi kinerja institusi dan pelaporan IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan tridharma di luar kampus dan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra.

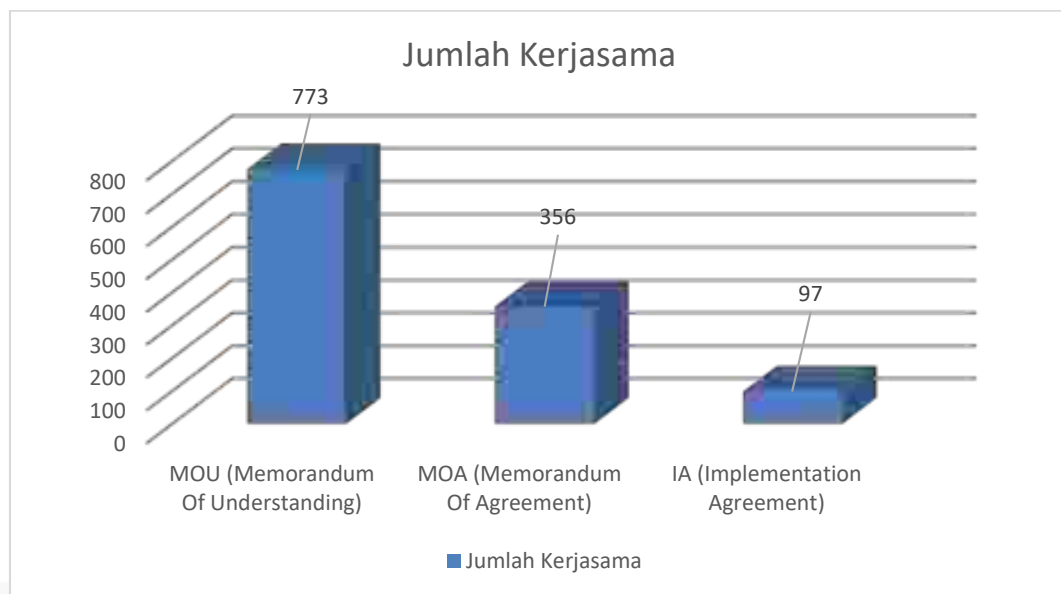
9. Upaya Perbaikan

- Membuat sosialisasi dan pendampingan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat dan pentingnya pelaporan kerjasama, baik untuk pengembangan perguruan tinggi maupun evaluasi oleh LLDikti XV. Karena hal tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan kualitas layanan Pendidikan dan pengembangan fasilitas pendukung yang lebih efektif.
- Pendampingan proaktif untuk mempertemukan perguruan tinggi dengan mitra yang memenuhi kriteria nasional dan internasional penting untuk dilakukan bagi perguruan tinggi yang kesulitan menemukan mitra kerja sama yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- Strategi Tindaklanjut adalah meningkatkan jumlah PTS dan Prodi yang menjalin kerja sama aktif dan terukur dengan mitra, mengoptimalkan pemanfaatan akun LaporKerma sebagai basis database nasional kerja sama perguruan tinggi, mendorong kerja sama yang menghasilkan program konkrit, bukan sekadar dokumen administratif (MoU/PKS), memperkuat kapasitas SDM pengelola kerja sama di tingkat universitas dan program studi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pendampingan teknis, penguatan

manajemen dan roadmap kerja sama, serta percepatan penginputan data berbasis output agar capaian IKU 3.2 dapat meningkat secara signifikan dan merata pada seluruh PTS di lingkungan LLDIKTI Wilayah XV.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Pencapaian target kinerja IK 3.2 yang dapat diukur dengan persentase jumlah PTS yang memiliki program studi yang bekerja dengan mitra sesuai kriteria minimal. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis dan operasional yang terkait langsung dengan peran LLDikti Wilayah XV dalam memfasilitasi, mendukung, dan membimbing PTS di wilayah kerjanya, yang berkontribusi pada peningkatan kinerja PTS yang berhasil.



Sumber Data : *LaporKerma : Tim Kerja Kerjasama (Data Per 31 Desember 2025)*

Grafik 3.4 Jumlah Kerjasama (MOU, MOA dan IA)

Keberhasilan pencapaian IK 3.2 dapat dilihat, Pada tahun 2025 dengan kategori MOU (*Memorandum of Understanding*), MOA (*Memorandum of Agreement*), dan IA (*Implementation Agreement*). Pada tahun 2025, jumlah kerja sama tertinggi tercatat pada kategori MOU dengan 773 kerja sama, diikuti oleh MOA sebanyak 356 dan IA sebanyak 97 dengan total kerjasama 1225. Hal ini mengindikasikan bahwa kerja sama, terutama yang berkaitan dengan MOU, semakin berkembang dan diperluas di berbagai sektor dan sejalan dengan upaya atau dorongan yang dilakukan di internal atau eksternal.

Pendekatan proaktif LLDIKTI Wilayah XV dalam menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi kemitraan menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan hubungan yang kuat antar pemangku kepentingan, yang berdampak positif pada peningkatan kolaborasi PTS di daerahnya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program dan inisiatif terkini, Anda dapat mengunjungi situs web resmi LLDIKTI Wilayah XV.

4. Sasaran Kegiatan 4 “Meningkatnya Tata Kelola LLDikti”

Tata kelola LLDikti Wilayah XV secara terus-menerus telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan LLDikti Wilayah XV menaikan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang meningkat.

“Meningkatnya tata kelola layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi” menjadi sasaran LLDikti yang memiliki dua indikator kinerja (IK) yaitu 4.1. Predikat SAKIP dan 4.2. Nilai

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L, dengan persentase capaian dari target sebagai berikut:

Meningkatnya Tata Kelola LLDikti	
IK 4.1 Predikat SAKIP	IK 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Target : 88	Target : 92,50
Realisasi : 88	Realisasi : 99,05
Capaian : 73,35	Capaian : 107,08

Sumber Data : LLDikti XV

Gambar 3.37. Persentase Capaian IKK 4.1. dan 4.2.

a. Indikator Kegiatan (IK) 4.1. Predikat SAKIP

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Definisi operasional adalah pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebagai sistem terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dampak (outcome) tercapainya predikat SAKIP menjadi bukti nyata bahwa tata kelola layanan LLDikti Wilayah XV sudah dijalankan dengan optimal. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai komponen, alat dan prosedur yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan laporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014. Hal ini didukung dengan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemendikbudristek.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Evaluasi SAKIP di LLDikti Wilayah XV melalui 2 (dua) tahap, yakni Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Satuan Kerja (Satker), dan Reviu atas Evaluasi SAKIP Mandiri oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek. Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penilaian SAKIP terbagi dalam empat komponen dan tiga sub komponen penilaian yang memiliki bobot berbeda. Rincian penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.23. Kriteria Penilaian

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	Total Bobot
	20%	30%	50 %	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3.24. Gambaran Tingkat AKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80 – 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
BB	>70 – 80	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60 – 70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	>0 - 30	Sangat Kurang,

		Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
--	--	---

3. Capaian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.25. IKK 4.1 Predikat SAKIP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025
Meningkatnya tata kelola Lembaga %Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)	Predikat SAKIP	BB (73,35)

Sumber Data : LLDikti XV

Capaian Tahun 2025 menunjukkan progres yang baik dengan predikat SAKIP BB dengan nilai **73,35**.

4. Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 capaian kinerja IKU 4.1 target yang dicapai adalah BB mencapai target yang telah ditetapkan pada awal tahun yaitu BB.

Hasil Implementasi SAKIP Pada LLDikti Wilayah XV mendapat Predikat BB dengan Nilai 73,35, dimana terdapat beberapa upaya yang dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut. Rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.26. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,5
2	Pengukuran Kinerja	30	21,6
3	Pelaporan Kinerja	15	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18
Predikat		BB	73,35

Sumber Data : Spekta : Itjen Kemdiktisaintek

IK 4.1 masih menggunakan formula yang sama dengan laporan kinerja tahun sebelumnya dan LLDikti Wilayah XV menargetkan predikat SAKIP BB, sampai dengan tahun 2025 LLDikti Wilayah XV berhasil mencapai predikat BB artinya **Sangat Baik**, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

5. Program dan Kegiatan Pendukung

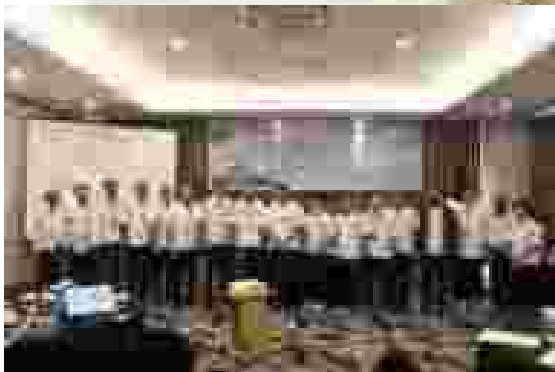
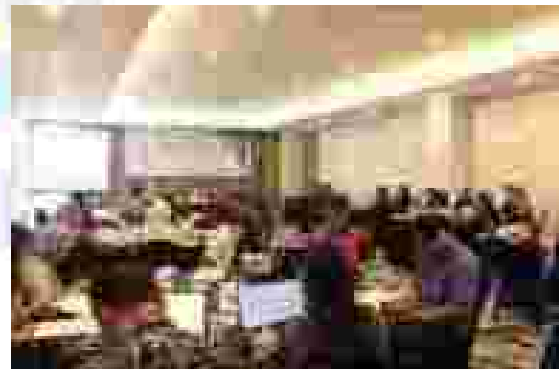
Berbagai program dan kegiatan yang dapat mendukung tercapainya indikator kegiatan ini, antara lain:

- a. Pada Tahun 2025 Rapat secara rutin dilakukan baik setiap bulan dan triwulan yang dipimpin oleh kepala Lembaga dan kepala bagian umum yang dilakukan terkait pencapaian kinerja, penyusunan renstra, revisi target kinerja, evaluasi SAKIP dan revisi anggaran yang di selenggarakan secara daring/luring.



Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.38. Rapat Rutin dengan Pimpinan



Sumber Gambar : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.39. Rapat TW I, TW II, TW III dan IV

- b. Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun sebelumnya.
- c. Secara intensif berkoordinasi ke Biro Perencanaan Kemdiktisaintek terkait permasalahan dan kendala yang dihadapi terkait implementasi SAKIP. Biro Perencanaan Kemendiktisaintek secara aktif memfasilitasi dan monitoring satker untuk mempersiapkan

dokumen pendukung yang dibutuhkan melalui fitur evaluasi mandiri pada laman <https://spekta.kemdiktisaintek.go.id/>. Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Rencana Strategis
- Rencana Kerja Tahunan
- Perjanjian Kinerja
- Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
- Rencana Aksi
- Pengukuran Triwulan 1 – 4
- Prosedur Operasional Standar
- Dokumen *Reward dan Punishment*
- Laporan/Notula Kegiatan
- Laporan Kinerja
- Dan lain sebagainya.

6. Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Target IKU 4.2

Pada triwulan IV, LLDIKTI Wilayah XV melakukan Penguatan implementasi SAKIP melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan kinerja (Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan IKU), peningkatan kualitas pengukuran dan validasi data kinerja, serta penyusunan laporan kinerja yang lebih analitis dan berbasis hasil. Selain itu, dilakukan evaluasi internal secara berkala beserta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi, penguatan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan koordinasi dan komitmen dalam pengendalian kinerja. Langkah-langkah tersebut mendukung peningkatan penilaian nilai SAKIP hingga mencapai predikat BB.

7. Kendala/Permasalahan

- Nilai SAKIP LLDIKTI XV pada tahun 2024 masih berada pada kategori B. namun demikian melalui berbagai upaya perbaikan berkelanjutan, penguatan perencanaan kinerja, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta penguatan akuntabilitas internal, diharapkan pada tahun 2025 LLDIKTI Wilayah XV dapat meningkatkan capaian nilai SAKIP mencapai kategori BB.
- Banyak Pegawai LLDIKTI yang belum memahami pekerjaan yang mendukung IKU LLDIKTI XV.
- belum terdapat definisi operasional, di dalam dokumen Renstra hanya terdapat cara mengukur indikator kinerja.
- belum terdapat dokumen Rencana Pengembangan Pegawai, Surat Keputusan Penataan Pegawai (seperti rotasi dan promosi/demosi).
- pada bab 3 Laporan Kinerja belum terdapat informasi terkait efisiensi atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai kinerja.

8. Langkah Antisipasi

- Bekerjasama dengan kemdiktisaintek terkait kekeluasaan dalam akses data untuk mengukur capaian indikator kinerja LLDikti Wilayah XV.
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan mengusulkan pegawai untuk mengikuti Diklat SAKIP Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan.
- Setiap unit/satuan kerja dan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- Menyusun program dan kegiatan yang efektif dan efisien.
- Melakukan pemantauan serta evaluasi kinerja secara berkala pada unit kerja yang ada pada LLDIKTI XV.
- Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2025 lebih fokus kepada kepatuhan PTS

- dalam mengisi data yang dibutuhkan dalam pengukuran capaian kinerja.
- Menerapkan pemberian Reward dan Punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja baik secara perorangan maupun tim kerja.
- Selalu berkoordinasi dengan Tim Biro perencanaan dan SAKIP Kemdiktisaintek terkait pengelolaan anggaran dan pengelolaan SAKIP.

9. Upaya Perbaikan

Strategi yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja dengan komitmen seluruh lini di LLDikti Wilayah XV dalam mendukung pencapaian SAKIP di tahun 2026 serta mengoptimalkan semua komponen pada evaluasi SAKIP.

10. Analisa Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Keberhasilan LLDIKTI XV sangat bergantung pada konsistensi dan efektivitas implementasi langkah-langkah antisipasi yang telah direncanakan. Rencana aksi yang ada sudah tepat sasaran, berfokus pada peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan sistem manajerial. Jika LLDIKTI XV berhasil melaksanakan pelatihan SAKIP dan Bimtek anggaran, menyosialisasikan IKU secara efektif, dan mengimplementasikan sistem monitoring data terpusat seperti SPEKTA, maka besar kemungkinan LLDIKTI XV akan mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi dan mewujudkan keberhasilan organisasinya.

b. Indikator Kegiatan (IK) 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

1. Definisi Operasional Indikator Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Selanjutnya berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga, sedangkan nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari EKA dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai tertimbang dari nilai kinerja perencanaan dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, nilai kinerja perencanaan adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

2. Cara Perhitungan Indikator Kinerja

Metode penghitungan dengan rata-rata NKA atas pelaksanaan RKAK/L satker berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Nilai kinerja perencanaan anggaran dihitung dengan tiga indikator sebagai berikut:

Tabel 3.27. Komponen Penilaian EKA

Variable	Indikator	Bobot
Efektifitas 75 %	Capaian RO	75 %
Efisiensi 25 %	Penggunaan SBK	10 %
	Efisiensi SBK	15 %
Total		100 %

Sedangkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran dihitung dengan tiga aspek yang terdiri dari delapan indikator sebagai berikut:

Aspek	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran	Sesuai Dite (10 %)	10 %
	Distribusi Nilai Dite (15 %)	15 %
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyusunan Anggaran (20 %)	20 %
	Efisiensi Ketersediaan (10 %)	10 %
	Penyusunan Tagihan (10 %)	10 %
	Penyusunan SP dan TSP (10 %)	10 %
	Optimisasi SPM (10 %)	10 %
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output (25 %)	25 %

Gambar 3.40. Komponen Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Formulasi Perhitungan

$$\frac{\text{Nilai EKA} \times (50\%) + \text{Nilai IKPA} \times (50\%)}{100}$$

Keterangan:

NKA= Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L (diambil dari laman SMART DJA <https://monev.kemenkeu.go.id>)

EKA/nilai kinerja perencanaan = diambil dari laman SMART DJA <https://monev.kemenkeu.go.id>

IKPA/nilai kinerja pelaksanaan =diambil dari laman Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OMSPAN) <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

3. Capaian Kinerja Tahun 2025



Sumber Data : Asgar : Tim Kerja Perencanaan (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.41. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Capaian tahun 2025 menunjukkan progress yang baik.

4. Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada tahun 2025 capaian kinerja IKU 4.1 target yang dicapai adalah 99,05 % melebihi target yang telah di tetapkan pada awal tahun yaitu sebesar 92,50 % dengan persentase capaian 107,08%, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.28. Capaian IK 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Indikator Kinerja	Target PK 2024			Target PK 2025		
	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian	
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	92,50	63,70	68,86	92,50	99,05	107,08

Sumber Data : LLDikti XV

5. Program dan Kegiatan Pendukung

Pencapaian terhadap tata kelola LLDikti Wilayah XV didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap nilai kinerja anggaran melalui berbagai sarana/aplikasi yang tersedia.
- Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan secara rutin dilakukan tepat waktu.
- Melaksanakan pengisian capaian output tepat waktu dengan perhitungan yang tepat.
- Melakukan revisi halaman III DIPA di awal triwulan agar pelaksanaan sesuai perencanaan.

- Melakukan pemantauan atas penyampaian LPJ, data kontrak, pengelolaan UP/TUP, dan pembayaran kontraktual tepat waktu.

6. Faktor Pendukung Keberhasilan Pencapaian Target IKU 4.2

Faktor Penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja ini adalah koordinasi yang baik antar tim kerja di bawah arahan Kepala Lembaga dan Kepala Bagian Umum. Tata kelola yang baik merupakan hasil kerja keras semua lini di lingkungan LLDikti Wilayah XV, sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik. Evaluasi dan arahan yang secara berkala disampaikan Pimpinan sebagai bukti keterlibatan langsung Pimpinan dalam tata kelola LLDikti Wilayah XV.

7. Kendala/Permasalahan

- Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, karena sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sehingga memerlukan percepatan realisasi.
- Penyesuaian jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, sebagai dampak dari dinamika kebijakan dan kondisi lapangan.
- Proses administrasi keuangan yang lebih intensif, khususnya pada tahap akhir tahun anggaran, sehingga memerlukan koordinasi dan ketelitian lebih tinggi.

8. Langkah Antisipasi

Meskipun capaian kinerja indikator 4.2 telah mencapai nilai NKA 99,05 terdapat sejumlah potensi hambatan yang perlu di antisipasi agar capaian tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan tidak mengalami penurunan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, langkah antisipasi dan upaya perbaikan dilakukan secara sistematis dengan cara penguatan sistem pengendalian dan monitoring berkala, penguatan kapasitas dan komitmen sumber daya manusia serta optimalisasi koordinasi dan kolaborasi internal.

9. Upaya Perbaikan

- Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas, penyesuaian jadwal secara fleksibel, serta monitoring realisasi anggaran secara intensif.
- Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal serta melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran secara cepat dan tepat.
- Penguatan koordinasi antar tim kerja, penjadwalan penyelesaian administrasi lebih awal, serta peningkatan ketelitian dalam proses verifikasi dokumen keuangan.
- Berikan apresiasi khusus kepada Tim/Kegiatan yang realisasinya tepat waktu dan *outputnya* berkualitas.
- Upaya LLDIKTI XV dalam menghadapi kendala ini termasuk evaluasi kinerja anggaran secara berkala, koordinasi dengan KPPN Kupang, dan penyesuaian perencanaan anggaran agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat di tahun 2025.

10. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian nilai NKA tahun 2025 mendapatkan hasil diatas target PK karena monitoring untuk setiap komponen yang rutin dilakukan dan antisipasi terhadap kemungkinan turunnya nilai NKA.

C. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

1. Realisasi Anggaran

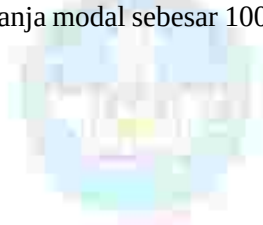
Tahun anggaran 2025 LLDikti Wilayah XV memiliki pagu anggaran sebesar Rp Rp 52.520.218.000 dengan realisasi Rp 49.224.995.617 dengan persentase daya serap sebesar 93,73 %. Rincian anggaran dan realisasi per jenis belanja sebagai berikut:

Tabel 3.29. Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	42.908.382.000	0	42.261.617.981	98,49	42.261.617.981	98,49
2	BELANJA BARANG	8.851.406.000	2.575.442.000	6.202.977.636	70,08	6.202.977.636	70,08
3	BELANJA MODAL	760.430.000	0	760.400.000	100,00	760.400.000	100,00
T O T A L		52.520.218.000	2.575.442.000	49.224.995.617	93,73	49.224.995.617	93,73

Sumber Data : Asgar : Tim Kerja Perencanaan (Data Per 31 Desember 2025)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa LLDikti Wilayah XV memiliki daya serap sebesar 93,73 % dari seluruh total pagu LLDikti Wilayah XV. Penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar 98,49 %, belanja barang sebesar 70,08 %, dan belanja modal sebesar 100 %. Realisasi perprogram/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



LLDIKTI WILAYAH XV

Tabel 3.30. Anggaran dan Realisasi per Program/Kegiatan/KRO/RO

No	Nomen	Program / Kegiatan / KRO / RO	Capaian Rincian Output				Progres Fisik	Pagu	Blokir	SPM		SP2D	
			Satuan	Target	Realisasi	%				Realisasi	%	Realisasi	%
1	Program	[DK] Program Pendidikan Tinggi						38.358.416.000	2.128.702.000	35.792.155.860	93,31	35.792.155.860	93,31
2	Kegiatan	[7733] Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi						38.358.416.000	2.128.702.000	35.792.155.860	93,31	35.792.155.860	93,31
3	KRO	[7733.BDB] Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						4.357.403.000	2.128.702.000	2.175.605.960	49,93	2.175.605.960	49,93
4	RO	[7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	57	57	100,00	100,00	3.566.514.000	1.654.572.000	1.887.070.601	52,91	1.887.070.601	52,91
5	RO	[7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi	Lembaga	11	11	100,00	100,00	790.889.000	474.130.000	288.535.359	36,48	288.535.359	36,48
6	KRO	[7733.BEJ] Bantuan Pendidikan Tinggi						34.001.013.000	0	33.616.549.900	98,87	33.616.549.900	98,87

7	RO	[7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	872	872	100,00	100,00	34.001.013.000	0	33.616.549.900	98,87	33.616.549.900	98,87
8	Program	[WA] Program Dukungan Manajemen						14.161.802.000	446.740.000	13.432.839.757	94,85	13.432.839.757	94,85
9	Kegiatan	[7735] Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi						14.161.802.000	446.740.000	13.432.839.757	94,85	13.432.839.757	94,85
10	KRO	[7735.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal						13.401.372.000	446.740.000	12.672.439.757	94,56	12.672.439.757	94,56
11	RO	[7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	100,00	100,00	10.000.000	0	6.316.900	63,17	6.316.900	63,17
12	RO	[7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	1	100,00	100,00	392.066.000	191.740.000	197.274.593	50,32	197.274.593	50,32
13	RO	[7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	2	200,00	100,00	12.999.306.000	255.000.000	12.468.848.264	95,92	12.468.848.264	95,92
14	KRO	[7735.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal						760.430.000	0	760.400.000	100,00	760.400.000	100,00
15	RO	[7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	100,00	100,00	760.430.000	0	760.400.000	100,00	760.400.000	100,00
		TOTAL						52.520.218.000	2.575.442.000	49.224.995.617	93,73	49.224.995.617	93,73

Sumber Data : Asgar : Tim Kerja Perencanaan (Data Per 31 Desember 2025)

Pagu anggaran yang dimiliki LLDikti Wilayah XV tahu 2025 digunakan untuk membiayai 4 (empat) sasaran dan 9 (sembilan) indikator kegiatan. Rincian sebagai berikut:

IKK 1.1. Kepuasan Pengguna Terhadap Layanan Utama LI.Diku Pagu : Rp. 456.277.000 Realisasi : Rp. 455.117.478 Daya Serap : 99,75 %	IKK 1.2. Persentase PTS yang Terakreditasi Atau Meningkatkan Mutu Dengan Cara Penggabungan Dengan PTS Lain Pagu : 227.349.000 Realisasi : 225.490.000 Daya Serap : 99,18 %
IKK 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi Pagu : Rp. 743.623.000 Realisasi : Rp. 729.358.293 Daya Serap : 98,08 %	IKK 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menyalurkan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi Pagu : Rp. 77.850.000 Realisasi : Rp. 77.666.986 Daya Serap : 99,76 %
IKK 2.3. Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan anti intoleransi, anti kekerasan seksual, anti perundungan, anti narkoba, dan anti korupsi Pagu : Rp 40.300.000 Realisasi : Rp. 39.941.100 Daya Serap : 99,11 %	
IKK 3.1. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus Pagu : Rp. 50.821.000 Realisasi : Rp. 48.745.000 Daya Serap : 95,92 %	IKK 3.2. Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra Pagu : Rp. 130.832.000 Realisasi : Rp. 128.837.706 Daya Serap : 98,48 %
IK 4.1. Predikat SAKIP Pagu : Rp. 149.700.000 Realisasi : Rp. 147.325.000 Daya Serap : 98,41 %	IK 4.2. Nilai Kinerja Anggaran atau Pelaksanaan RKA-K/L Pagu : Rp. 49.944.776.000 Realisasi : Rp. 49.229.515.059 Daya Serap : 98,48 %

Sumber Data : Fa Detail : Tim Kerja Keuangan (Data Per 31 Desember 2025)

Gambar 3.42. Anggaran dan Realisasi Per Indikator Kegiatan Tahun 2025

2. Efisiensi Anggaran

Pada awal tahun 2025 LLDikti Wilayah XV mendapatkan total pagu sebesar Rp. 53.333.851.000 dan mengalami beberapa kali efisiensi sehingga total pagu akhir sebesar Rp. 49,944,766,000 dengan realisasi Rp 49.229.515.059 dengan persentase daya serap sebesar 98,57%, berdasarkan data pengelolaan anggaran dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran. Tergolong sangat baik tercermin dari persentase pemanfaatan pagu, realisasi belanja, realisasi kontrak, serta pengelolaan UP/TUP.

a. Pagu dan alokasi anggaran

Total alokasi anggaran sebesar Rp. 53.333.851.000 dengan pagu tersedia sebesar 49,944,766,000 atau 93,65%. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran yang relative kecil dan mencerminkan proses perencanaan dan cukup realistis serta selektif dalam menetapkan kebutuhan belanja. Efisiensi terlihat dari minimnya selisih antara alokasi dan pagu yang tersedia dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.575.442.000 yang menandakan tidak adanya pembengkakan anggaran yang signifikan.

b. Realisasi Belanja

Realisasi belanja mencapai Rp.49.229.515.059 atau sekitar 98,57% dari pagu tersedia. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tingkat penyerapan yang sangat tinggi ini mencerminkan:

- Perencanaan kegiatan yang matang.
- Pelaksanaan program yang tepat waktu.
- Minimnya sisa anggaran.

LLDikti Wilayah XV berhasil mencapai target pada perjanjian kinerja tahun 2025 dengan serapan anggaran sebesar 98,57 %. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan yang lebih prioritas dalam mendukung capaian kinerja dari LLDikti Wilayah XV sendiri seperti:

- Penghematan belanja barang (Optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dan paket meeting).
- Menyelenggarakan kegiatan kombinasi antara daring/luring/hybrid sesuai arahan dan kebutuhan.

Adapun efisiensi yang terjadi selama tahun 2025 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut:

1. Alokasi Efisiensi Anggaran (21 Februari 2025)

Alokasi Efisiensi Anggaran		
Jenis Alokasi	Alokasi	Efisiensi
Facilitasi Pembinaan Kelembagaan	Rp. 4.257.403.000	Rp. 2.128.702.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 3.591.937.000	Rp. 1.436.775.000
Tunjangan Provesi Dosen Non PNS	Rp. 38.001.013.000	Rp. 9.880.263.000
Tusi Lainnya (Selain gaji dan opsional pemeliharaan perkantoran)	Rp.1.162.496.000	Rp.760.430.000
Gaji dan Tunjangan	Rp.6.321.002.000	-
Total	Rp. 53.333.851.000	Rp. 14.206.170.000

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.43. Alokasi Efisiensi Anggaran

2. Rekomposisi Efisiensi Anggaran (10 Maret 2025)

Rekomposisi Efisiensi Anggaran			
Jenis Alokasi	Alokasi	Efisiensi Yang Sudah Disahkan	Rekomposisi Efisiensi
Facilitasi Pembinaan Kelembagaan	Rp. 4.257.403.000	Rp. 2.128.702.000	Rp. 2.128.702.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 3.591.937.000	Rp. 1.436.775.000	Rp. 1.436.775.000
Tunjangan Provesi Dosen Non PNS	Rp. 38.001.013.000	Rp. 9.880.263.000	Rp. 9.880.263.000
Tusi Lainnya (Selain gaji dan opsional pemeliharaan perkantoran)	Rp.1.162.496.000	Rp.760.430.000	Rp.760.430.000
Tunjangan Provesi Dosen Non PNS	Rp.6.321.002.000	-	-
Total	Rp. 53.333.851.000	Rp. 14.206.170.000	Rp. 11.926.170.000

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.44. Rekomposisi Efisiensi Anggaran

3. Relaksasi Efisiensi Anggaran (26 Maret 2025)

Relaksasi Efisiensi Anggaran			
Jenis Alokasi	Alokasi	Efisiensi Yang Sudah Disahkan	Rekomposisi Efisiensi
Facilities Pembinaan Kementrian	Rp. 4.257.405.000	Rp. 2.128.702.000	Rp. 2.128.702.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 3.591.937.000	Rp. 1.438.775.000	Rp. 255.000.000
Tunjangan Pensiun Dosen Non PNS	Rp. 38.001.013.000	Rp. 7.600.203.000	-
Tusi Lainnya (Selain gaji dan operasional pemeliharaan perkantoran)	Rp. 1.162.498.000	Rp. 760.430.000	Rp. 191.740.000
Gaji dan Tunjangan	Rp. 53.321.002.000	-	-
Total	Rp. 58.333.851.000	Rp. 11.926.110.000	Rp. 2.575.442.000

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.45. Relaksasi Efisiensi Anggaran

4. Penyampaian Alokasi Tunjangan Kinerja Dosen (12 Juni 2025)

Alokasi Tunjangan Kinerja Dosen	
Jenis Alokasi	
Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.423.186.000
Total	Rp. 1.423.186.000

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.46. Penyampaian Alokasi Tunjangan Kinerja Dosen

5. Permohonan Tambahan Alokasi Anggaran (09 September 2025)

Facilitasi dan Pembinaan lembaga (7733.BDB.001) Lembaga Pendidikan Tinggi Akademi dan Vokasi yang mendapatkan Layanan Pembinaan Peningkatan Mutu Rp.100.000.000,- dan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran (7735, EBA.994) Layanan Perkantoran Rp.500.000.000,-.

6. Penyampaian Tambahan Alokasi Belanja Pegawai BA BUN (01 Oktober 2025)

Penyampaian Tambahan Alokasi Belanja Pegawai BA BUN			
Jenis Alokasi	Alokasi Semula	Penyesuaian Alokasi	Relokasi Efisiensi
Gaji dan Tunjangan	Rp. 7.744.188.000	Rp. 1.163.181.000	Rp. 8.907.369.000
Tetap	Rp. 7.744.188.000	Rp. 1.163.181.000	Rp. 8.907.369.000

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.47. Penyampaian Tambahan Alokasi Belanja Pegawai BA BUN

7. Perhitungan Kebutuhan Riil Anggaran Belanja Pegawai (30 Oktober 2025)

Belanja Pegawai Reguler, Belanja Pegawai PNS, Belanja Tunjangan Sertifikasi Dosen PNS/Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS dan Non PNS Rp. 7.590.224.825. Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BA BUN, Belanja Tunjangan Sertifikasi Dosen PNS/Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS dan Non PNS Rp. 1.138.903.000 Belanja Tunjangan Sertifikasi Dosen Non PNS dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar Non PNS Rp. 34.001.013.000 (terdapat pengurangan sebesar Rp.4.000.000.000)

D. Inovasi, Penghargaan dan Program Crosscutting

1. Inovasi

Pada tahun 2025, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV melakukan inovasi sebagai berikut:

a. KKN Tematik “GENTASKIN”

Program KKN Tematik GENTASKIN (Gerakan NTT Tuntas Stunting dan Kemiskinan) merupakan program kolaboratif antara LLDikti Wilayah XV sebagai representatif pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dengan Perguruan Tinggi se-NTT serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah selesai dilaksanakan. Program kegiatan KKN-T GENTASKIN ini dirancang dan dilaksanakan sebagai bentuk inisiatif strategis dan kolaboratif berbasis Perguruan Tinggi di bawah koordinasi LLDIKTI XV untuk berkontribusi secara langsung pada upaya percepatan penurunan prevalensi stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur karena masuk dalam Provinsi tertinggal yang mana tingkat kemiskinan di NTT: 19,02% dengan daerah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem menunjukkan kebutuhan intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Daftar Desa/Kelurahan Lokus Prioritas Stunting Provinsi NTT telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 48/KEP/HK/2025. Kegiatan KKN-T GENTASKIN ini difokuskan pada program pengabdian masyarakat dalam rangka penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan tersebar di 3 (tiga) Kabupaten terkhususnya yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Manggarai Timur sebagai pilot project.

Pelaksanaan kegiatan di mulai sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 September 2025 tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah Desa Pelaksanaan KKN-T sebanyak 10 (sepuluh) Desa, Kabupaten Manggarai Timur dengan jumlah Desa Pelaksanaan KKN-T sebanyak 5 (lima) Desa, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah Desa Pelaksanaan KKN-T sebanyak 10 (sepuluh) Desa. Penanggung jawab kegiatan adalah LLDikti Wilayah XV yang berkolaborasi dengan 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur serta Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Peserta pelaksana KKN-T GENTASKIN berasal dari Perguruan Tinggi tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu :

Tabel 3.31. Jumlah Peserta KKN Tematik Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
1.	Universitas Stella Maris Sumba	50 Mahasiswa/wi
2.	Universitas Katolik Weetebula	10 Mahasiswa/wi
3.	UNKRIS Wira Wacana Sumba	22 Mahasiswa/wi
4.	Politeknik Kesehatan Bakti Sumba	26 Mahasiswa/wi
	T O T A L	108 Mahasiswa/wi

Sumber Data : Tim Kerja Kemahasiswaan

Tabel 3.32. Jumlah Dosen Pendamping Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Dosen Pendamping	NIDN/NUPTK	Asal PT
1.	Petrus Belarminus, S.Kep.Ns,M.Kep	196809111989021004/ 3411096801	POLTEKES Kemenkes Kupang
2.	Diana Reby Sabawaly	1511059501	Universitas Stella Maris Sumba
3.	Mariana Teresa Pega, S.Gz.,M.P.H	9558774675230180	Poltekes Bakti Sumba
4.	Stefyne Sonya Yohana Kura, S.Gz.,	4349769670230330	Poltekes Bakti Sumba
5.	Elfis Uumbu Kotongu Retang, S.TP.,M.Agb	0804029002	UNKRIS Wira Wacana Sumba
6.	Marten Uumbu Nganji, S.TP.,M.P	0818038903	UNKRIS Wira Wacana Sumba
7.	Dr. Heronimus Delu Pingge, M. Pd	0822098702	UNIKAWeetebula
8.	Sihang Gregorius Balimema, M.AP	1502019501	Universitas Stella Maris Sumba
9.	Yohanis Uumbu Kaleka, M.Si	818078902	Universitas Katolik Weetebula
10.	Herman Hukum Ratu	1520039101	Universitas Stella Maris Sumba

Sumber Data : Tim Kerja Kemahasiswaan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai program unggulan :

Bidang Kesehatan & Gizi

1. Pendampingan posyandu : Kegiatan yang dilakukan melalui observasi, pelatihan kepada kader mengenai cara pengukuran tinggi badan, panjang badan, berat badan dan Lila. Dilakukan disetiap Desa Sasaran. Kegiatan meliputi penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang balita, pemeriksaan ibu hamil, serta edukasi mengenai gizi seimbang dan pola asuh, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak stunting dan ibu hamil dengan kondisi KEK sebagai langkah awal perbaikan gizi. Pendampingan juga diarahkan pada kunjungan rumah bagi sasaran prioritas yang tidak hadir, koordinasi dengan petugas puskesmas dan pemerintah desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar keberlanjutan kegiatan posyandu dapat berjalan optimal;
2. Demonstrasi masak PMT (Pemberian makanan tambahan) juga dilakukan untuk anak stunting, gizi kurang, dan ibu hamil Kek. Melakukan praktik masak bersama ibu Kader, orang tua atau pengasuh anak. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga diintegrasikan dengan edukasi mengenai gizi seimbang dan pola asuh yang tepat bagi orang tua balita serta ibu hamil;
3. Kegiatan lain meliputi penyuluhan hygiene di sekolah, pemeriksaan malaria bersama kader, Mengikuti Kegiatan GEMAS (Gebrak Malaria Sehari) serta edukasi gizi dan pola asuh bagi keluarga sasaran stunting. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit.

Bidang Pertanian, Peternakan & Teknologi Pangan

1. Pembuatan kebun Gizi : Melakukan penyuluhan tanaman bergizi, demonstrasi cara penanaman, praktik bersama Masyarakat, serta pendampingan dalam perawatan kebun Gizi dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat desa setempat;
2. Kegiatan pembuatan pupuk bokasi dilakukan bersama Kelompok Tani. Tujuannya meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah limbah organik menjadi pupuk ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, serta mendukung pertanian berkelanjutan.

Bidang Ekonomi & Kewirausahaan

1. Pelatihan produk UMKM dari potensi pangan lokal : dilaksanakan melalui pelatihan praktik pengolahan pangan serta evaluasi hasil produk, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat setempat. Kegiatan pembuatan bubuk kopi, sajian tradisional Jakulawak, minyak kemiri, kripik singkong, dan kripik pisang berhasil meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian dan sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah

Bidang Pendidikan, Literasi Sosial & Budaya

1. *Edukasi dan sosialisasi* : Kegiatan literasi dan numerasi bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Program ini dilakukan melalui pembiasaan membaca, pojok baca, media pembelajaran menarik, dan metode belajar kreatif.



Sumber Gambar : Tim Kerja Kemahasiswaan

Gambar 3.48. Kegiatan KKN Tematik Kabupaten Sumba Barat Daya

Tabel 3.33. Jumlah Peserta KKN Tematik Kabupaten Manggarai Timur

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
1.	Universitas Nusa Nipa	22 orang Mahasiswa/wi
2.	UNIKA Santu Paulus Ruteng	18 orang Mahasiswa/wi
3.	Universitas Flores	25 orang Mahasiswa/wi
4.	STIPER Bajawa	10 orang Mahasiswa/wi
5.	STIKES St. Elisabeth Maumere	10 orang Mahasiswa/wi
	TOTAL	85 Orang Mahasiswa/wi

Sumber Data : Tim Kerja Kemahasiswaan

Tabel 3.34. Jumlah Dosen Pendamping Kabupaten Manggarai Timur

No	Nama Dosen Pendamping	NIDN/NUPTK	Asal PT
1.	Raimundus Beda, S.Fil., M.Hum	823016801	UNIKA Santu Paulus Ruteng
2.	Yohanes Paulus Pati Rangga, S.KM., M.P.H	082 707 8903	Universitas Nusa Nipa
3.	Lely Suryani, B.A.,M.A	0825 048 302	Universitas Flores
4.	Antonia Rensiana Reong, S.Kep, Ns.,M.Kep	1525018901	STIKES ST. Elisabeth Maumere
5.	David Januarius Djawapatty, S. Pt., M. Si	1502017801	STIPER Bajawa

Sumber Data : Tim Kerja Kemahasiswaan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai program unggulan :

Bidang Kesehatan & Gizi

1. Kegiatan Posyandu (pengukuran BB, TB, LILA, lingkaran kepala dan KPSP) dan penyuluhan Edukasi Gizi dilaksanakan setiap sebulan sekali tanggal 12-16 dengan tujuan Mendapatkan dan mengetahui hasil dari pengukuran sebagai acuan dalam melihat tumbuh kembang anak. Serta melalui edukasi gizi, dapat memberikan pengetahuan kepada orang tua akan pentingnya kebutuhan nutrisi bagi anak, terkhususnya saat 1000 hari pertama. Sasaran Kegiatan : ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak dibawah 5 tahun. Dengan Metode kegiatan meliputi : Penyuluhan interaktif menggunakan media visual (liflet), Sesi tanya jawab dan diskusi kelompok, Pengukuran terhadap tumbuh kembang anak.
2. Pelatihan Pembuatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) dengan tujuan Memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada orang tua dalam mempersiapkan kebutuhan nutrisi bagi anak, terkhususnya saat 1000 hari pertama. Sasaran Kegiatan : orang tua yang memiliki anak dengan masalah gizi. Metode yang digunakan : Sesi materi, tanya jawab dan diskusi, Demonstrasi pengolahan menu sehat berbasis pangan lokal

Bidang Ekonomi & Kewirausahaan

1. Pelatihan Kewirausahaan Produk Olahan Lokal dengan tujuan Kegiatan: Memberikan keterampilan praktis kepada Masyarakat untuk mengolah bahan lokal menjadi produk bernilai jual. Sasaran Kegiatan : ibu kelompok tani, guru, dan pemuda. Metode Pelaksanaan : Pelatihan teori dan praktik pembuatan produk olahan kemiri Materi pengemasan.

Bidang Pertanian, Peternakan & Teknologi Pangan

1. Pembuatan Kebun Gizi yang bekerja sama dengan kelompok tani dengan Tujuan Kegiatan : Sebagai lahan yang digunakan untuk pemenuhan gizi bagi anak-anak yang memiliki masalah gizi, dengan kolaborasi bersama kelompok Wanita tani. Selain bagi anak-anak yang memiliki masalah gizi, kolaborasi ini dapat meningkatkan nilai jual sayuran. Kerja sama ini, dapat menurunkan jumlah angka stunting dan meningkatkan perekonomian yang ada di Desa/Kelurahan. Sasaran Kegiatan: keluarga yang memiliki anak dengan masalah gizi dan kelompok tani. Metode Pelaksanaan berupa Sosialisasi tentang manfaat kebun gizi, Pemberian bibit tanaman sayuran (sawi, pokcoy, dan bayam), Pemantauan teknis melalui cara menanam dan merawat.

Bidang Pendidikan, Literasi Sosial & Budaya

1. Sosialisasi ke 3 tingkat sekolah mengenai PHBS (SD), Anemia dan Personal Hyegine (SMP), dan SMA (Pergaulan Bebas) dengan Tujuan Kegiatan: Pencegahan tingginya angka stunting dan kemiskinan extreme. Dalam materi PHBS yang diajarkan pada anak SD mengajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah invensi yang terjadi pada anak, seperti diare. Sehingga perilaku hidup bersih, merupakan Langkah awal dalam pencegahan masalah ini. Dalam materi yang Anemia dan Personal Hyegine pada anak SMP mengajarkan tentang pentingnya menjaga Kesehatan pada, terkhususnya pada anak Perempuan. Hal ini dikarenakan, Wanita remaja nantinya akan menjadi seorang ibu. Cara ibu menutrisi anaknya dari masa kehamilan, yaitu dengan perantara sel darah merah yang tugasnya menyebarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka kebutuhan anak dimasa mendatang akan menjadi ancaman. Sedangkan dalam materi Pergaulan Bebas untuk anak SMA mengajarkan mereka agar dapat membuat rencana dalam membangun keluarga. Remaja SMA cenderung belum memiliki kesiapan menjadi orang tua, mulai dari fisik, finansial, dan mental dalam bersosialisasi. Jika ini tetap

dipaksakan, maka kebutuhan nutrisi anak yang dihasilkan tidak terpenuhi secara total. Anak dengan nutrisi tidak terpenuhi dapat mengakibatkannya kekurangan gizi, sehingga dapat menyebabkan anak tersebut terkena stunting. Dari ketiga materi tersebut saling berkaitan dan sangat penting untuk diperhatikan. Sasaran Kegiatan: keluarga yang memiliki anak dengan masalah gizi.



Sumber Gambar : Tim Kerja Kemahasiswaan

Gambar 3.49. Kegiatan KKN Tematik Manggarai Timur

Tabel 3.35. Jumlah Peserta KKN Tematik Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Perguruan Tinggi	Jumlah Peserta
1.	Universitas Nusa Cendana	28 orang Mahasiswa/wi
2.	Universitas Timor	13 orang Mahasiswa/wi
3.	Poltekkes Kemenkes Kupang	15 orang Mahasiswa/wi
4.	Politeknik Pertanian Negeri Kupang	14 orang Mahasiswa/wi
5.	Univ Katolik Widya Mandira Kupang	12 orang Mahasiswa/wi
6.	Univ Muhammadiyah Kupang	6 orang Mahasiswa/wi
7.	Universitas Kristen Artha Wacana	8 orang Mahasiswa/wi
8.	Universitas Citra Bangsa	10 orang Mahasiswa/wi
9.	Institut Pendidikan SoE	8 orang Mahasiswa/wi
10.	STIKOM Uyelindo Kupang	15 orang Mahasiswa/wi
11.	STKIP Sinar Pancasila	19 orang Mahasiswa/wi
	T O T A L	148 Orang Mahasiswa/wi

Sumber Data : Tim Kerja Kemahasiswaan

Tabel 3.36. Jumlah Dosen Pendamping Kabupaten Timor Tengah Selatan

No.	Dosen Pendamping	NIP/NIDN	Asal PT
1.	Prof. Dr. Intje Picauly, S.Pi., M.Si	197207262000032001/ 0026077203	Universitas Nusa Cendana
2.	Indriati Andolita Tedju Hinga, S.KM., M.Sc	198208282006042001/ 0028088202	Universitas Nusa Cendana
3.	Tri Luchi Proklamita, S.P.,M.P	197608172010122001	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
4.	Viona Nainggolan, S.P.,M.Si	199312042022032014	Politeknik Pertanian Negeri Kupang
5.	Melkisedik Bukifan, S.P.,M.Si.	827128806	Universitas Timor
6.	Oktofianus Sila, S.Kep.Ns, M.Kep	197510142000031001/ 4014107501	POLTEKES Kemenkes Kupang
7.	Yohanes Pemandi Lian, S.Pd.,M.Hum	827128806	Universitas Katolik Widya Mandira
8.	Antonius Bere, S.Fil., M.H	0823038402	STKIP Sinar Pancasila
9.	Alfred G. O. Kase, S.Pi, M.Si, Ph.D	827056901	Universitas Kristen Artha Wacana
10.	Fazlur Rahman RM, S.Pd.I.,M.Pd	1502029001	Universitas Muhammadiyah Kupang
11.	Dr.Drs. Abdul Majid, M.Kes	196812311994031104/ 0831126825	Universitas Citra Bangsa
12.	Menhya Snae, M.Kom	0825057901	STIKOM Uyelindo Kupang
13.	Dyen Erni Lakapu, M.Pd	1645771672230360	Institut Pendidikan SOE

Sumber Data : Tim Kerja Kemahasiswaan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sebagai program unggulan :

Bidang Kesehatan & Gizi

1. Melaksanakan Penyuluhan dan Edukasi Kesehatan serta Sosialisasi dengan tujuan edukasi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkhususnya para ibu dan keluarga yang memiliki balita, mengenai pentingnya gizi keluarga, sanitasi lingkungan, pola pengasuhan anak yang tepat, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sasaran kegiatan adalah para ibu, ibu hamil, dan keluarga yang memiliki balita. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, serta demonstrasi cara.
2. Sosialisasi tentang Pergaulan Bebas, Penyakit Menular Seksual, Masalah Kesehatan Mental, Literasi Digital, Gizi Seimbang Remaja, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan tujuan Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terkait isu - isu pada remaja, seperti pergaulan bebas, penyakit menular seksual, kesehatan mental, rabies, literasi digital, gizi seimbang remaja, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Sasaran kegiatan adalah Siswa SMP dan SMA sederajat, yang sedang berada pada masa remaja awal hingga remaja menengah. Guru dan pihak sekolah juga menjadi sasaran pendukung, agar materi yang diberikan dapat berlanjut dan diperkuat dalam proses belajar mengajar. Metode yang digunakan berupa metode penyuluhan interaktif menggunakan presentasi visual seperti PPT, video edukasi untuk memudahkan pemahaman siswa. Selain itu, dilakukan diskusi dan tanya jawab sehingga siswa dapat menyampaikan pengalaman atau permasalahan yang mereka alami
3. Sosialisasi tentang Gizi Seimbang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat seperti Cara Mencuci

Tangan dan Sikat Gigi, Literasi Belajar, Menabung Sejak Dini dengan tujuan Memberikan pemahaman kepada siswa sekolah dasar tentang pentingnya gizi seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat seperti cara mencuci tangan yang benar dan menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta menumbuhkan minat literasi belajar dan budaya menabung sejak dini. Sasaran Kegiatan adalah Siswa Sekolah Dasar (SD). Guru juga menjadi sasaran tidak langsung, agar dapat membiasakan anak - anak menerapkan perilaku sehat di sekolah. Metode yang digunakan berupa materi melalui cerita bergambar, nyanyian, permainan edukatif, serta praktik langsung seperti cara mencuci tangan dengan sabun dan cara menyikat gigi yang benar.

Bidang Pertanian, Peternakan dan Teknologi Pangan

1. Pelatihan Pembuatan Kebun Gizi dan Kolam Ikan di Kebun Bersama Masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan menjadi kebun gizi keluarga, sehingga kebutuhan sayur, buah, dan tanaman obat sederhana dapat terpenuhi tanpa bergantung sepenuhnya pada pasar mengetahui proses pembuatan kolam ikan, penebaran bibit, pemberian pakan, hingga memelihara atau perawatan ikan untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan protein yang cukup dan mengurangi pengeluaran dan menambah pemasukan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Sasaran kegiatan Masyarakat terutama pada keluarga khususnya pada ibu hamil dan anak- anak untuk mendapatkan kecukupan gizi dan meningkatkan pemasukan ekonomi keluarga. Dengan Metode Kegiatan berupa adalah dengan melakukan praktik langsung kepada masyarakat. Mahasiswa bersama masyarakat melakukan pembuatan bedengan (*demplo*), pemanfaatan pupuk kandang dan penanaman sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, pakcoy, terong, dan juga tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, sereh, sereh merah, daun mint, lengkuas di lahan pekarangan dan Persiapan kolam dan sarana budidaya, penebaran bibit ikan nila, pemberian pakan serta pemeliharaan/perawatan secara rutin, dan pendampingan langsung kepada masyarakat dalam proses budidaya.
2. Membuat Variasi Cara Tanam dengan Polybag dengan tujuan Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan terbatas dengan metode tanam di polybag. Sasaran kegiatan adalah Masyarakat desa, khususnya keluarga yang memiliki pekarangan sempit, masyarakat, kelompok PKK, dasawisma, serta pemuda desa yang berpotensi menjadi penggerak kebun gizi sederhana. Metode yang digunakan berupa dilakukan dengan distribusi polybag pada warga sasaran kemudian praktik langsung bersama masyarakat. Mahasiswa KKN melatih cara menyiapkan media tanam, memilih bibit, menanam sayuran (sawi, pakcoy, bayam, kangkung) serta tanaman obat (jahe, kunyit, sereh, lengkuas) ke dalam polybag.
3. Melakukan Pengecekan Rutin untuk Melihat Perkembangan Kebun, Mengecek Pertumbuhan Tanaman, Pemeliharaan dan Penyiraman Rutin setiap Pagi dan Sore hari dengan tujuan untuk memastikan kebun gizi keluarga tetap terawat, tanaman tumbuh dengan baik, serta hasil panen dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan menambah penghasilan dengan melakukan pemasaran dari hasil panen sayur untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Metode Pelaksanaan dilakukan melalui monitoring lapangan oleh mahasiswa KKN mencakup pengecekan kondisi tanaman, pendampingan perawatan (penyiraman dan pengendalian hama).
4. Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal dan Pemasaran Sederhana Bersama Pemuda Desa antara lain Pembuatan Keripik Pisang, Pembuatan Minyak Kelapa Murni / *Virgin Coconut Oil* (VCO) dengan tujuan meningkatkan keterampilan pemuda dalam mengolah pisang menjadi keripik sebagai camilan sehat bergizi sekaligus bernilai ekonomi, serta mendorong kemandirian keluarga melalui pemanfaatan pangan lokal serta meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah kelapa menjadi minyak kelapa murni (VCO) yang lebih efisien yang bergizi tinggi dan memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk konsumsi keluarga maupun peluang usaha. Sasaran kegiatan adalah masyarakat desa seperti Ibu Rumah Tangga dan Pemuda Desa. Metode yang digunakan pelatihan praktik langsung pembuatan Keripik Pisang, Pembuatan Minyak Kelapa Murni (VCO).

Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan

1. Identifikasi Potensi Usaha dan Pemetaan UMKM Lokal dengan Survei dan Wawancara Bersama Masyarakat dan Aparat Desa. Terdapat cukup banyak tenaga kerja di bidang konstruksi, seperti 20 tukang kayu, 25 tukang batu, dan 3 tukang jahit, serta usaha tradisional berupa kerajinan anyaman dengan sekitar 50 pelaku usaha yang memproduksi tikar, bakul, dan perlengkapan rumah tangga. Produk-produk kerajinan ini menunjukkan adanya peluang besar dalam ekonomi kreatif, yang dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pelatihan, inovasi desain, maupun pemasaran. Dengan demikian, kekuatan UMKM di Desa Biloto terletak pada keterampilan masyarakat di bidang konstruksi dan kerajinan, sementara sektor perdagangan masih perlu diperkuat agar mampu menopang peningkatan ekonomi secara lebih luas. Desa Biloto juga memiliki potensi sumber daya alam yang beragam. Di bidang pertanian, lahan desa banyak dimanfaatkan untuk tanaman pangan, buah-buahan, serta tanaman biofarmaka seperti jahe, kunyit, lengkuas, kencur, temulawak, dan sereh yang bermanfaat untuk kesehatan dan berpotensi menjadi produk herbal rumah tangga. Pada sektor perkebunan, komoditas utama meliputi kelapa, pinang, kemiri, asam, sukun, meskipun produksinya masih terbatas dan memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Bidang peternakan cukup berkembang, dengan populasi ternak yang besar, di antaranya 550 ekor sapi, 1.227 ekor babi, 1.899 ekor ayam kampung, serta kambing dan bebek dalam jumlah lebih kecil. Produksi peternakan berupa daging, telur, madu, kulit, dan hasil olahan lainnya menunjukkan peluang ekonomi bagi masyarakat. Di sisi lain, usaha pengolahan hasil ternak seperti dendeng, abon, maupun biogas belum banyak dikelola, meskipun terdapat 11 pelaku usaha kerajinan tangan berbasis hasil ternak. Potensi perikanan air tawar masih terbatas pada empang atau kolam seluas 1.750 m², sedangkan potensi kehutanan cukup besar dengan hasil hutan berupa kayu, bambu, rotan, madu lebah, dan jati. Namun, terdapat ancaman kerusakan hutan berupa longsor, kebakaran, dan kekeringan. Desa Biloto juga memiliki potensi bahan galian berupa batu kali, batu gunung, pasir, batu cadas, dan batu kapur yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan. Dari sisi sumber daya air, Desa Biloto kaya akan mata air sebanyak 33, embung sebanyak 13, serta jaringan pipa dan sumur yang masih dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih. Namun, beberapa sungai dan embung mengalami pendangkalan serta penurunan kualitas air. Secara keseluruhan, Desa Biloto memiliki kekuatan pada UMKM berbasis keterampilan, potensi pertanian herbal, peternakan rakyat, serta kerajinan tradisional, sementara sektor perdagangan, perikanan, dan wisata masih perlu dikembangkan. Pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, apabila dikelola secara berkelanjutan, dapat menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi sekaligus mendukung program pembangunan desa, termasuk upaya menuntaskan masalah stunting dan kemiskinan.
2. Revitalisasi atau Pembentukan Koperasi Desa (Koperasi Merah Putih) bertujuan Menyediakan wadah ekonomi bersama di tingkat desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha kolektif. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi sarana pengelolaan simpan pinjam, penyediaan kebutuhan pokok, serta pemasaran produk lokal secara lebih teratur dan berkelanjutan. Sasaran kegiatan Seluruh masyarakat Desa Biloto, khususnya keluarga petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM

yang membutuhkan akses permodalan, sembako dengan harga terjangkau, serta layanan ekonomi desa. Metode yang digunakan berupa Kegiatan dilakukan dengan tahapan: Sosialisasi pentingnya koperasi desa kepada masyarakat, pembentukan pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, penyusunan AD/ART koperasi serta kesepakatan simpanan wajib dan iuran bulanan, peresmian koperasi dengan program kerja awal berupa simpan pinjam, penyediaan sembako melalui kios koperasi, dan pengadaan pupuk.

Bidang Pendidikan, Literasi Sosial & Budaya

1. Pendampingan Posyandu dan Penguatan Kapasitas Kader dengan Tujuan Kegiatan Meningkatkan kualitas layanan posyandu serta kapasitas kader dalam mendampingi tumbuh kembang anak dan kesehatan ibu. Dengan adanya pendampingan, kader diharapkan lebih terampil dalam melakukan penimbangan, pengukuran, pencatatan gizi, penyuluhan, serta mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gizi, sanitasi, pola asuh, PHBS, dan kesehatan ibu-anak. Sasaran Kegiatan adalah Kader posyandu, orang tua yang memiliki balita, ibu hamil, serta masyarakat yang menjadi peserta posyandu. Metode kegiatan yang dilakukan berupa dengan cara praktik langsung di posyandu, pendampingan kader dalam pelayanan rutin, praktik teknis penggunaan alat ukur gizi (timbangan, pengukur tinggi badan, KMS), serta diskusi dan penyuluhan kesehatan. Selain itu, mahasiswa KKN juga membuat media edukasi sederhana seperti leaflet untuk memudahkan pemahaman masyarakat.



Sumber Gambar : Tim Kerja Kemahasiswaan

Gambar 3.50. Kegiatan KKN Tematik Kabupaten Timor Tengah Selatan

b. Inovasi Presensi Online Dosen DPK

Pada tahun 2025 di bawah naungan LLDikti Wilayah XV terdapat 13 dosen PNS yang tersebar di berbagai perguruan tinggi swasta dan proses absensi masi manual yang mana melalui

kampus sehingga pada tahun 2025 LLDikti XV mencoba untuk berlangganan sebuah laman website presensi (<https://www.presensi.co.id/>) agar memudahkan dosen melakukan absensi. Presensi online mulai digunakkan di bulan oktober.



Sumber Gambar : Tim Kerja Perencanaan

Gambar 3.51. Presensi Online Dosen DPK

2. Penghargaan Komisi Informasi

LLDikti Wilayah XV menerima penghargaan sebagai badan publik yang informatif dalam imlementasi undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Melalui Pencapaian ini, LLDikti Wilayah XV berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi, memperkuat transparansi, serta menjadi teladan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan pendidikan tinggi.



Sumber Gambar : Tim Kerja Humas

Gambar 3.52. Penghargaan Komisi Informasi Provinsi NTT

3. Program Corsscuting

a. Talent Scouting

Peningkatan mutu pendidikan tinggi sangat bergantung pada kualitas dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Saat ini, jumlah dosen yang tersebar di PTS lingkup LLDIKTI XV yang berkualifikasi doktor (S3) masih sangat terbatas serta tenaga kependidikan yang belum memiliki kompetensi manajerial dan teknis masih sangat terbatas sesuai tuntutan era digital dan kebijakan Dikti Saintek Berdampak, Kampus Berdampak.

Kegiatan *Talent Scouting* difasilitasi oleh LLDIKTI XV sebagai upaya strategis untuk menjaring, membina, dan menyiapkan dosen serta tenaga kependidikan potensial agar siap mengikuti studi lanjut, memperoleh beasiswa, dan mengembangkan karier. Melalui program ini, peserta akan mendapatkan pembekalan akademik, bahasa, serta *soft skill* yang diperlukan, sekaligus memperkuat kapasitas SDM dan daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional maupun global.

Ruang lingkup kegiatan *Talent Scouting* Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan mencakup hal-hal berikut:

1. Identifikasi dan Penjaringan Peserta Potensial: Menjaring dan mempersiapkan dosen serta tenaga kependidikan yang memiliki potensi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi (S3), baik di dalam maupun luar negeri.
2. Peningkatan Kesiapan Akademik dan Bahasa Mendorong Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk difokuskan pada penguatan kemampuan akademik, penulisan ilmiah, serta keterampilan bahasa Inggris akademik sebagai bekal menghadapi seleksi beasiswa dan proses studi lanjut.
3. Pengembangan *Soft Skill* dan Kompetensi Profesional Pembinaan kemampuan komunikasi akademik, manajemen waktu, etika profesional, serta keterampilan presentasi dan negosiasi akademik untuk mendukung keberhasilan studi dan karier peserta.
4. Pendampingan Persiapan Beasiswa dan Studi Lanjut Peserta mendapatkan bimbingan teknis dalam penyusunan proposal penelitian.
5. Percepatan Peningkatan Kualifikasi dan Jabatan Fungsional Kegiatan ini diharapkan mendukung jenjang karir dosen agar tercipta kenaikan jabatan fungsional dosen.
6. Penguatan Daya Saing SDM Perguruan Tinggi Kegiatan juga mendorong peserta meningkatkan jejaring akademik dan kolaborasi riset antara peserta dengan lembaga pendidikan tinggi nasional maupun internasional untuk mendukung produktivitas akademik.

Pelaksanaan Kegiatan *Talent Scouting* berhasil mencapai sejumlah hasil penting yang sejalan dengan tujuan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Adapun hasil yang dicapai meliputi:

1. Peningkatan Pemahaman Peserta terhadap Program Beasiswa dan Kolaborasi Akademik dengan memperoleh informasi komprehensif mengenai berbagai program beasiswa, antara lain *Talent Scouting*, Bridging Program Pre-S3, dan kursus bahasa Inggris yang disampaikan oleh Direktorat Sumber Daya dan memahami strategi memperluas jejaring akademik dan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi luar negeri untuk memperkuat daya saing akademik nasional dan global.
2. Peningkatan Kesiapan Akademik dan Keterampilan Penelitian melalui pemaparan materi Teknik Penulisan Proposal Penelitian dan Tinjauan Literatur Sistematis, peserta mampu memahami struktur proposal penelitian, penerapan *Systematic Literature Review* (SLR) dan *Systematic Literature Network Analysis* (SLNA), serta pemanfaatan data bibliometrik untuk memperkuat dasar penelitian.
3. Peningkatan Kompetensi Komunikasi Akademik dan Etika Profesional dengan memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya komunikasi akademik yang efektif, profesional, serta menghormati keberagaman budaya. Materi Panduan Penulisan Email Akademik dan Etika Komunikasi Akademik dengan Supervisor memberikan bekal

praktis bagi peserta dalam menjalin komunikasi dengan calon pembimbing di universitas luar negeri.

4. Pemahaman Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Penulisan Akademik bahwa ada batas etis pemanfaatan AI sebagai alat bantu dalam proses penulisan ilmiah, termasuk pentingnya transparansi, sitasi yang benar, serta kewajiban melakukan penyuntingan dan tinjauan manual terhadap karya akademik.
5. Peningkatan Motivasi dan Kesiapan Studi Lanjut ke Jenjang Doktoral (S3) Dosen dan Tenaga kependidikan melalui materi Persiapan Doktor untuk Pendidikan Tinggi dan Panduan Proposal Penelitian S3 dengan membantu peserta memahami langkah-langkah penyusunan proposal doktoral yang baik, strategi pendekatan kepada calon supervisor, serta pentingnya orisinalitas dan kontribusi ilmiah dalam riset.

Kegiatan *Talent Scouting* yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XV telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesiapan akademik, bahasa, serta pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh wawasan terkait berbagai program beasiswa dan kolaborasi akademik, tetapi juga dibekali dengan keterampilan praktis dalam penulisan proposal, komunikasi akademik, serta penerapan etika penggunaan teknologi dan kecerdasan buatan dalam penelitian.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem akademik yang produktif, kompetitif, dan berdaya saing global, serta menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi perguruan tinggi di wilayah kerja LLDikti XV.



Sumber Gambar : Tim Kerja Sumber Daya

Gambar 3.53. Talent Scoting

b. Kegiatan Rembug Bersama Dalam Rangka Implementasi Nota Kesepakatan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Pemerintah Daerah

Kegiatan Rembug Bersama Dalam Rangka Implementasi Nota Kesepakatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dengan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan.

Rembug bersama ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani, dengan maksud dan tujuan untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi potensi kerja sama, serta merumuskan rencana aksi bersama dalam mengimplementasikan program-program prioritas di bidang pendidikan, riset, dan teknologi di tingkat daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang peranan vital dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rencana kerja bersama (joint action plan) implementasi Nota Kesepakatan, menentukan pembagian tugas dan peran antar pemangku kepentingan, menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, memperkuat komitmen kemitraan strategis berbasis sinergi program dan mengidentifikasi potensi pendanaan dan sumber daya kolaboratif.

Dari kegiatan ini tercapainya pembentukan Rencana Tindak Lanjut Bersama antara lain:

- Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Bersama (Joint Action Plan) untuk implementasi Nota Kesepakatan Kemendiktisaintek-Pemprov NTT.
- Pembentukan Tim Teknis Kolaboratif terdiri atas unsur: LLDikti wilayah XV, Pemprov NTT (Bappelitbangda & BRIDA), Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha/Industri
- Fokus Program untuk tahun 2026 antara lain Penguatan kapasitas riset terapan di bidang pangan, kesehatan, energi, dan digitalisasi, Implementasi program One Campus One Product dan hilirisasi hasil riset, Pemberdayaan desa melalui kolaborasi perguruan tinggi dan pemerintah kabupaten, Replikasi program KOSABANGSA sebagai model kerja kolaboratif kampus-desa
- Penyusunan mekanisme Monitoring & Evaluasi (Monev untuk setiap kegiatan kolaboratif.
- Penguatan jejaring kemitraan nasional dan internasional guna mendorong mobilitas akademik dan riset bersama.
- Serta berbagai pembahasan bersama mengenai Fokus kegiatan yaitu Penguatan sinergi hasil riset perguruan tinggi dengan kebijakan pembangunan daerah, Optimalisasi program KKN Tematik dan KOSABANGSA berbasis potensi local, Pemetaan sumber daya dan kebutuhan penelitian daerah, Kolaborasi dengan dunia usaha (KADIN, BI) untuk mendukung hilirisasi produk, dan Pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi kolaboratif





Sumber Data : Tim Kerja Kerjasama

Gambar 3.54. Kegiatan Rembug Bersama Dalam Rangka Implementasi Nota Kesepakatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikrisaintek) dengan Pemerintah Daerah

c. Konsorsium Trilateral Indonesia Timur Tahun 2025

Tantangan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia memerlukan pendekatan kolaboratif antar wilayah. Konsorsium trilateral ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama untuk memperkuat sinergi, berbagi praktik baik, serta mendorong program bersama seperti peningkatan akreditasi, penjaminan mutu, penelitian terapan, dan pengembangan SDM dosen.

Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung pembangunan nasional. Namun, tantangan dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi di wilayah Timur Indonesia masih signifikan, mencakup keterbatasan infrastruktur, tenaga pengajar berkualitas, serta akses ke sumber daya Pendidikan yang memadai. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pembentukan Konsorsium Pendidikan Tinggi dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi di kawasan tersebut.

Wilayah Timur Indonesia meliputi provinsi-provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, kawasan ini masih menghadapi kendala besar dalam sektor Pendidikan tinggi. Keterbatasan infrastruktur fisik, seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas teknologi, membatasi kemampuan perguruan tinggi untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal kepada mahasiswa. Selain itu, jumlah tenaga pengajar dengan kualifikasi doctoral dan kemampuan penelitian yang memadai masih sangat minim dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia. Tantangan ini diperparah oleh akses yang terbatas ke jejaring kolaborasi akademik, baik secara nasional maupun internasional. Perguruan tinggi di wilayah Timur Indonesia sering kali kurang terhubung dengan pusat-pusat penelitian dan inovasi, sehingga sulit untuk bersaing dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas adalah melalui wadah Konsorsium Pendidikan Tinggi. Melalui konsorsium, perguruan tinggi di wilayah Timur Indonesia dapat berbagi tenaga pengajar berkualitas, program pelatihan, dan materi pembelajaran. Misalnya, dosen-dosen dari perguruan tinggi yang lebih maju di Jawa atau Sulawesi dapat memberikan kuliah tamu atau bimbingan penelitian melalui skema kolaborasi daring maupun luring. Hal ini dapat membantu mengatasi keterbatasan tenaga pengajar berkualitas di perguruan tinggi daerah. Konsorsium juga memungkinkan perguruan tinggi berbagi fasilitas, seperti laboratorium dan perpustakaan digital. Misalnya, Universitas yang memiliki fasilitas laboratorium modern dapat membuka akses bagi mahasiswa dari Perguruan Tinggi mitra di wilayah Timur Indonesia. Selain itu, penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran dapat diperluas melalui kerja sama pengembangan platform daring. Kolaborasi penelitian dalam konsorsium juga dapat membantu perguruan tinggi di wilayah Timur Indonesia untuk lebih aktif dalam menghasilkan karya ilmiah yang relevan dengan isu-isu local. Contohnya, Penelitian tentang pengelolaan sumber daya alam atau pemberdayaan masyarakat adat dapat dilakukan secara Bersama-sama dengan dukungan pendanaan dari pemerintah atau donor internasional. Pada tanggal 12 November 2025, LLDIKTI Wilayah XV bersama dengan LLDIKTI Wilayah VIII dan LLDIKTI Wilayah XII melakukan Sinergi dan Kolaborasi Konsorsium Trilateral Indonesia Timur dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi.



Sumber Data : Tim Kerja Sumber Daya

Gambar 3.55. Konsorsium Trilateral Indonesia Timur Tahun 2025

d. Peran LLDikti Wilayah XV

Sebagai Fasilitator peningkatan mutu perguruan tinggi, peran LLDikti Wilayah XV adalah sebagai penyelenggara yang memfasilitasi koordinasi antara perguruan tinggi swasta untuk menjalankan program – program pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, LLDikti Wilayah XV juga berfungsi sebagai penghubung antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Desa KKN Tematik sebanyak 25 desa di kabupaten TTS, Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya dan juga sebagai penghubung perguruan tinggi swasta dengan pemerintah provinsi NTT untuk memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara sinergis dan memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat. Melalui peran tersebut, LLDikti wilayah XV turut mendukung tercapainya tujuan program diktisaintek berdampak dalam mewujudkan desa yang lebih maju, cerdas dan mandiri, dengan melibatkan seluruh elemen akademik dan masyarakat.

e. Dampak dari Program Crosscutting/Collaburative

Dampak dari program colaburative ini memberikan dampak strategis dalam penguatan ekosistem Pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia daerah terutama dalam pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan kualitas Pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal. Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat program ini berhasil meningkatkan partisipasi mahasiswa dan dosen dalam program pengembangan kompetensi, kewirausahaan, riset dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Terbangunnya sinergi antara perguruan

tinggi, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dalam pemetaan potensi sumber daya manusia lokal sebagai basis perencanaan program pengembangan talenta berkelanjutan.

4. Kegiatan Lain - Lain

a. Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2025 LLDikti Wilayah XV menyelenggarakan kegiatan Workshop Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM pada LLDikti Wilayah XV untuk menunjukkan konsistensi melanjutkan komitmen reformasi birokrasi. Sebagai upaya strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. Pencanangan ZI-WBK dilingkungan LLDikti XV menjadi tonggak penting dalam penguatan integritas organisasi, yang ditandai dengan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan perubahan secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam implementasinya LLDikti Wilayah XV menyelenggarakan berbagai program reformasi birokrasi yang berfokus pada 6 (enam) area perubahan, yaitu:

- Manajemen perubahan
- Penataan tata laksana
- Penataan sistem manajemen SDM aparatur
- Penguatan akuntabilitas kinerja
- Penguatan pengawasan
- Peningkatan kualitas layanan publik.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan ZI-WBK, LLDikti Wilayah XV melakukan penguatan sistem, pengendalian internal, optimalisasi SOP layanan, digitalisasi proses pelayanan, serta peningkatan transparansi dan akses informasi publik. Selain itu, dilakukan pula penguatan mekanisme pengaduan masyarakat dan pengelolaan gratifikasi sebagai langkah preventif dalam pencegahan korupsi. Dengan pencanangan dan penyelenggaraan rapat kegiatan program ZI-WBK tersebut, LLDikti Wilayah XV menegaskan komitmennya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan adaptif, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kinerja layanan Pendidikan tinggi di wilayah LLDikti XV

b. Kegiatan FGD Pembahasan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen, Guru Besar dan Lektor Kepala dan FGD Pembahasan Penilaian Angka Kredit Usulan Jafung Dosen LLDikti XV Tahun 2025

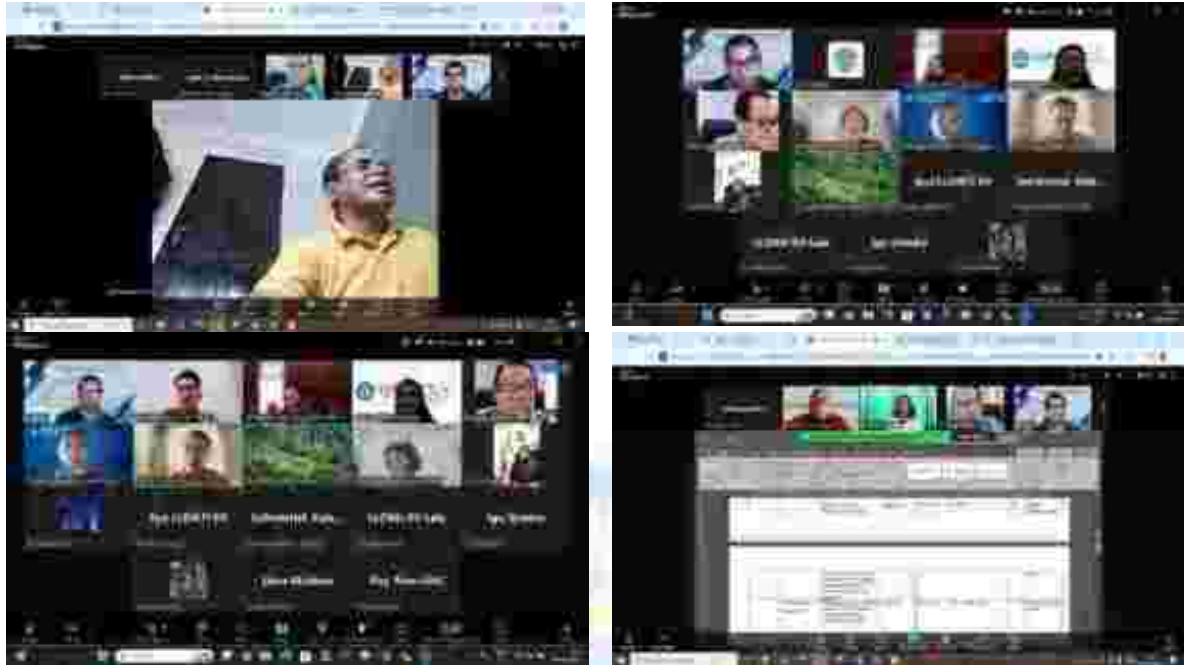
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Pendidikan Tinggi khususnya LLDikti Wilayah XV. Untuk mencapai tujuan tersebut, LLDIKTI berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap para dosen dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah melalui penilaian Angka Kredit Dosen, yang menjadi indikator penting dalam penetapan jabatan fungsional dosen serta pengembangan karier mereka.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penetapan angka kredit terhadap usulan Jabatan Fungsional (Jabfung), perlu dilaksanakan suatu proses penilaian yang objektif dan transparan. Focus Group Discussion (FGD) oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK). FGD ini bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap hasil penilaian Daftar Usulan jabatan fungsional yang telah diajukan oleh dosen. Proses ini tidak hanya memastikan bahwa penilaian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan transparan.

Melalui FGD Tim PAK, diharapkan dapat dihasilkan keputusan yang akurat dan adil, sehingga dosen yang telah memenuhi syarat dapat memperoleh jabatan fungsional yang sesuai, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi.

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini antar lain:

- Pemahaman Bersama tentang pedoman pengakuan angka kredit dosen sesuai Kepmendikisaintek Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan Dan Pengembangan Profesi Dan Karier Dosen;
- Penetapan hasil penilaian angka kredit dari Tim PAK untuk proses Penerbitan SK PAK dan SK Jabfung.



Sumber Data : Tim Kerja Sumber Daya

Gambar 3.56. Kegiatan FGD Pembahasan Penilaian Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen, Guru Besar dan Lektor Kepala dan FGD Pembahasan Penilaian Angka Kredit Usulan Jafung Dosen LLDikti XV Tahun 2025

c. FGD Verifikasi dan Validasi Laporan BKD Genap 2025/2026 LLDikti Wilayah XV

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Pendidikan Tinggi khususnya LLDikti Wilayah XV. LLDIKTI berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap para dosen dan tenaga kependidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut. Dosen merupakan komponen terpenting dalam melihat kualitas pendidik dan tenaga pendidik di lingkungan Pendidikan Tinggi. Tugas dan kewajiban dosen untuk mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai kegiatan pokok merupakan beban kerja dosen (BKD). Penyelenggaraan BKD sebagaimana dimaksud diatur dalam PO BKD dan dilaporkan setiap semester di perguruan tinggi melalui layanan SISTER.

Pelaporan BKD melalui SISTER bertujuan membantu dosen dalam melakukan pelaporan secara terarah, terukur, dan transparan sehingga memastikan dosen untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai dosen sehingga hak dosen dapat terpenuhi sesuai peraturan yang ada, pelaporan BKD melalui SISTER membutuhkan peranan unit BKD Internal yang ada untuk proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran data, kesesuaian dokumen dan akuntabilitas dosen maka LLDikti Wilayah XV melakukan kegiatan FGD Verifikasi dan Validasi Laporan BKD Genap 2025/2026 LLDikti Wilayah XV sesuai tujuan tersebut. Untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran laporan sesuai dengan ketentuan serta standar yang berlaku.



Sumber Data : Tim Kerja Sumber Daya

Gambar 3.57. FGD Verifikasi dan Validasi Laporan BKD Genap 2025/2026 LLDikti Wilayah XV

LLDIKTI WILAYAH XV



LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

BAB IV

Penutup

Lampiran



DIKTILAS JEMBER
BERDAMPAK

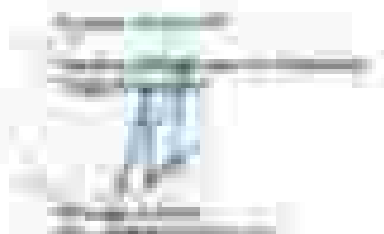
A. Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir

1. Perjanjian Kinerja Awal



Category	Item	Value
Administrative Expenses	Salaries and Wages	100
	Office Supplies	50
Manufacturing Expenses	Raw Materials	200
	Factory Overhead	150
Selling Expenses	Advertising	75
	Sales Commissions	125
General and Administrative Expenses	Depreciation	100
	Insurance	50
Interest Expenses	Interest on Notes Payable	100
	Interest on Accounts Payable	50
Income Tax Expenses	Income Tax Expense	100
	Deferred Tax Expense	50

By:	Date:
1.	2.
3.	4.
5.	6.



Page	Page	Page	Page
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

Page	Page	Page	Page
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200



- B. Pengukuran Kinerja TW I, TW II, TW III dan TW IV**
 1. Pengukuran Kinerja TW I



PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Divisi Telekomunikasi
Departemen Telekomunikasi
Unit Kerja

Formulir Pengukuran Kinerja

1. Data Diri

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

2. Data Kinerja

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

3. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

4. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

5. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

6. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

7. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

8. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

9. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

10. Data Tambahan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1			
2			
3			

1999

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

Project Manager:
The project manager is responsible for the overall management of the project, including planning, execution, and closure. They are responsible for ensuring that the project is completed on time, within budget, and to the satisfaction of the stakeholders.

¹ *Journal of Management Education* 25(10):1129-1140.

1. *Journal of Management Education*, 2000, 24(1), 10-12.

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 391–400

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

100

1. <http://www.fishbase.org>
2. <http://www.fishbase.org>
3. <http://www.fishbase.org>
4. <http://www.fishbase.org>

[illegible]

1. The authors are grateful to the referees for their valuable comments and suggestions. The authors are also grateful to the Department of Science and Technology, Government of India, for the financial support.

1. *Journal of Management Education*, 30(1), 10-20.



1. The authors have provided evidence that the use of a single, common method for measuring the same construct in different studies (e.g., self-reports) can lead to spurious correlations.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

1000

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the current market landscape, identify gaps, and determine the target audience. Key factors to consider include the size of the market, the level of competition, and the potential for growth.
2. Once a market need is identified, the next step is to develop a business plan. This document outlines the company's mission, vision, and financial goals. It also details the marketing strategy, operational plan, and management team. A business plan is essential for securing funding and guiding the company's growth.
3. The third step is to develop a prototype. This involves creating a small-scale model of the product to test its feasibility and gather feedback. Prototyping can be done using various methods, including 3D printing, CNC machining, and traditional manufacturing techniques. The goal is to identify any design flaws or manufacturing challenges early in the process.
4. After the prototype is developed, the next step is to conduct a pilot run. This involves producing a small batch of the product to test its performance in the market. A pilot run allows the company to gather real-world feedback from customers and make any necessary adjustments to the product or manufacturing process.
5. The final step is to launch the product. This involves marketing the product to the target audience, distributing it through various channels, and monitoring its performance. A successful launch requires a strong marketing strategy, effective distribution channels, and ongoing customer support.



- 1. ☐ **Identify the main purpose of the text.**
- 2. ☐ **Identify the main topic of the text.**
- 3. ☐ **Identify the main idea of the text.**
- 4. ☐ **Identify the main conclusion of the text.**

Section 2

- 1. ☐ **Identify the main purpose of the text.**
- 2. ☐ **Identify the main topic of the text.**
- 3. ☐ **Identify the main idea of the text.**
- 4. ☐ **Identify the main conclusion of the text.**

Section 3

Read the text and answer the questions.

The text is about the importance of the environment. It discusses the impact of human activities on the environment and the need to take action to protect it. The text also mentions the role of governments and individuals in protecting the environment.

- 1. ☐ **Identify the main purpose of the text.**
- 2. ☐ **Identify the main topic of the text.**
- 3. ☐ **Identify the main idea of the text.**
- 4. ☐ **Identify the main conclusion of the text.**

Section 4

- 1. ☐ **Identify the main purpose of the text.**
- 2. ☐ **Identify the main topic of the text.**
- 3. ☐ **Identify the main idea of the text.**
- 4. ☐ **Identify the main conclusion of the text.**

Section 5

- 1. ☐ **Identify the main purpose of the text.**
- 2. ☐ **Identify the main topic of the text.**
- 3. ☐ **Identify the main idea of the text.**
- 4. ☐ **Identify the main conclusion of the text.**

Section 6

Read the text and answer the questions.




Environmental Protection Agency (EPA) and the Clean Air Act

Background

The Clean Air Act (CAA) is the primary federal law that governs air quality in the United States. It was first passed in 1963 and has since been amended several times to address new environmental concerns.

- The CAA sets national air quality standards for various pollutants, including particulate matter, carbon monoxide, lead, and nitrogen dioxide.
- It also requires states to develop and implement air quality management plans to ensure compliance with these standards.

Key Provisions

- **National Ambient Air Quality Standards (NAAQS):** These are the maximum allowable concentrations of pollutants in the ambient air.
- **State Implementation Plans (SIPs):** States must develop and submit SIPs to the EPA to show how they will achieve and maintain the NAAQS.
- **Permitting Requirements:** The CAA requires certain sources of air pollution to obtain permits before they can begin operations.

Enforcement

The EPA is responsible for enforcing the CAA. It can take legal action against states or individuals who violate the law.

- The EPA can issue fines and penalties for violations of the CAA.
- It can also require violators to take corrective action to bring their emissions into compliance.
- In some cases, the EPA can shut down non-compliant facilities.

Public Participation in the CAA Process

The CAA includes several provisions that encourage public participation in the air quality management process. These provisions are designed to ensure that the public has a voice in decisions that affect their environment.

Key Provisions

The CAA requires the EPA to provide information to the public about air quality and the progress of the CAA process.

- The EPA must publish information about air quality in the United States, including data on air quality trends and the progress of the CAA process.
- It must also provide information about the progress of the CAA process to the public, including information about the progress of the SIP process.

The CAA also requires the EPA to hold public hearings on the progress of the CAA process. These hearings are held to allow the public to express their views on the progress of the CAA process.

- The EPA must also provide information to the public about the progress of the CAA process, including information about the progress of the SIP process.
- The EPA must also provide information to the public about the progress of the CAA process, including information about the progress of the SIP process.
- The EPA must also provide information to the public about the progress of the CAA process, including information about the progress of the SIP process.



1. The following information is available for the year ended 31 December 2019:

Required:

- Calculate the cost of sales for the year ended 31 December 2019.
- Calculate the gross profit for the year ended 31 December 2019.
- Calculate the net profit for the year ended 31 December 2019.

Answer:

- Cost of sales = Opening inventory + Purchases - Closing inventory
= 10,000 + 50,000 - 12,000 = 48,000
- Gross profit = Sales - Cost of sales
= 60,000 - 48,000 = 12,000
- Net profit = Gross profit - Expenses
= 12,000 - 8,000 = 4,000

2. The following information is available for the year ended 31 December 2019:

Required:

- Calculate the cost of sales for the year ended 31 December 2019.
- Calculate the gross profit for the year ended 31 December 2019.
- Calculate the net profit for the year ended 31 December 2019.

Answer:

- Cost of sales = Opening inventory + Purchases - Closing inventory
= 10,000 + 50,000 - 12,000 = 48,000
- Gross profit = Sales - Cost of sales
= 60,000 - 48,000 = 12,000
- Net profit = Gross profit - Expenses
= 12,000 - 8,000 = 4,000

Required:

- Calculate the cost of sales for the year ended 31 December 2019.
- Calculate the gross profit for the year ended 31 December 2019.
- Calculate the net profit for the year ended 31 December 2019.



1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market research. This involves identifying the target market, understanding the needs and preferences of the customers, and analyzing the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This involves determining the most effective ways to reach the target market, such as through advertising, public relations, or direct sales.

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market research. This involves identifying the target market, understanding the needs and preferences of the customers, and analyzing the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This involves determining the most effective ways to reach the target market, such as through advertising, public relations, or direct sales.

No.	Particulars	Debit		Credit		Balance
		Rs.	Paise	Rs.	Paise	
1	By Balance b/d					
2	To Cash					
3	To Bank					
4	To Sales					
5	To Other Income					
6	By Cash					
7	By Bank					
8	By Sales					
9	By Other Income					
10	By Balance c/d					





2. Pengukuran TW II

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jakarta
FAKULTAS PENDIDIKAN MIPA
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

Formulir Pengukuran TW II

A. Pengukuran TW II

No.	Nama Siswa	TW II			
		1	2	3	4
1. Kemampuan Berpikir Kritis					
1.	Menyebutkan definisi berpikir kritis				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir kritis				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir kritis				
2. Kemampuan Berpikir Kreatif					
1.	Menyebutkan definisi berpikir kreatif				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir kreatif				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir kreatif				
3. Kemampuan Berpikir Komputasi					
1.	Menyebutkan definisi berpikir komputasi				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir komputasi				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir komputasi				
4. Kemampuan Berpikir Matematis					
1.	Menyebutkan definisi berpikir matematis				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir matematis				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir matematis				
5. Kemampuan Berpikir Sains					
1.	Menyebutkan definisi berpikir sains				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir sains				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir sains				
6. Kemampuan Berpikir Sosial					
1.	Menyebutkan definisi berpikir sosial				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir sosial				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir sosial				
7. Kemampuan Berpikir Bahasa					
1.	Menyebutkan definisi berpikir bahasa				
2.	Menyebutkan jenis-jenis berpikir bahasa				
3.	Menyebutkan manfaat berpikir bahasa				

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jakarta
FAKULTAS PENDIDIKAN MIPA
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA

100

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

¹ *Journal of Management Education*, 2004, 28(1), 10-17.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1036.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 103–110

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

© 2003 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 253: 105–112

100

- **Prevalence:** the proportion of the population that has a disease at a specific point in time. It is a snapshot of the disease burden in a population at a given time.
- **Incidence:** the number of new cases of a disease that occur in a population over a specific period of time. It measures the risk of developing the disease.
- **Prevalence = Incidence x Duration:** This equation shows that prevalence is determined by the number of new cases (incidence) and the average duration of the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.

Prevalence vs. Incidence

- **Prevalence:** the proportion of the population that has a disease at a specific point in time. It is a snapshot of the disease burden in a population at a given time.
- **Incidence:** the number of new cases of a disease that occur in a population over a specific period of time. It measures the risk of developing the disease.
- **Prevalence = Incidence x Duration:** This equation shows that prevalence is determined by the number of new cases (incidence) and the average duration of the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.

Prevalence vs. Incidence vs. Duration

Prevalence = Incidence x Duration (This equation shows that prevalence is determined by the number of new cases (incidence) and the average duration of the disease.)

Prevalence vs. Incidence

Prevalence = Incidence x Duration (This equation shows that prevalence is determined by the number of new cases (incidence) and the average duration of the disease.)

- **Prevalence:** the proportion of the population that has a disease at a specific point in time. It is a snapshot of the disease burden in a population at a given time.
- **Incidence:** the number of new cases of a disease that occur in a population over a specific period of time. It measures the risk of developing the disease.
- **Prevalence = Incidence x Duration:** This equation shows that prevalence is determined by the number of new cases (incidence) and the average duration of the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.
- **Prevalence vs. Incidence:** Prevalence is a measure of the total burden of a disease, while incidence is a measure of the risk of developing the disease.



1. **Question:** What is the main purpose of the study?
2. **Answer:** The main purpose of the study is to investigate the effect of the intervention on the outcome.
3. **Question:** What is the research design?
4. **Answer:** The research design is a randomized controlled trial.
5. **Question:** What is the sample size?
6. **Answer:** The sample size is 100 participants.
7. **Question:** What is the intervention?
8. **Answer:** The intervention is a new treatment.
9. **Question:** What is the control?
10. **Answer:** The control is a standard treatment.
11. **Question:** What is the outcome?
12. **Answer:** The outcome is the improvement in symptoms.
13. **Question:** What is the conclusion?
14. **Answer:** The conclusion is that the intervention is effective.
15. **Question:** What are the limitations?
16. **Answer:** The limitations are the small sample size and the short follow-up period.
17. **Question:** What are the strengths?
18. **Answer:** The strengths are the randomized design and the use of a control group.
19. **Question:** What are the implications?
20. **Answer:** The implications are that the intervention may be useful in clinical practice.

References

1. Smith J, Jones K. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
2. Brown L, Green M. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
3. White N, Black P. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
4. Gray R, Hall S. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
5. King T, Lee U. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
6. Kim V, Kim W. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
7. Kim Y, Kim Z. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
8. Kim A, Kim B. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
9. Kim C, Kim D. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
10. Kim E, Kim F. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
11. Kim G, Kim H. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
12. Kim I, Kim J. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
13. Kim K, Kim L. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
14. Kim M, Kim O. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
15. Kim P, Kim Q. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
16. Kim R, Kim S. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
17. Kim T, Kim U. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
18. Kim V, Kim W. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
19. Kim Y, Kim Z. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.
20. Kim A, Kim B. The effect of the intervention on the outcome. *Journal of Clinical Medicine*. 2020;10(1):1-10.

Appendix

Table 1. Demographic characteristics of the participants.

1. **Question:** What is the mean age of the participants?
2. **Answer:** The mean age of the participants is 45.2 years.
3. **Question:** What is the standard deviation of the age?
4. **Answer:** The standard deviation of the age is 12.5 years.
5. **Question:** What is the range of the age?
6. **Answer:** The range of the age is 25 to 65 years.
7. **Question:** What is the mean weight of the participants?
8. **Answer:** The mean weight of the participants is 75.5 kg.
9. **Question:** What is the standard deviation of the weight?
10. **Answer:** The standard deviation of the weight is 15.2 kg.
11. **Question:** What is the range of the weight?
12. **Answer:** The range of the weight is 50 to 100 kg.
13. **Question:** What is the mean height of the participants?
14. **Answer:** The mean height of the participants is 1.75 m.
15. **Question:** What is the standard deviation of the height?
16. **Answer:** The standard deviation of the height is 0.08 m.
17. **Question:** What is the range of the height?
18. **Answer:** The range of the height is 1.60 to 1.90 m.
19. **Question:** What is the mean BMI of the participants?
20. **Answer:** The mean BMI of the participants is 24.5.

Table 2. Clinical characteristics of the participants.

Table 2. Clinical characteristics of the participants. The table shows the mean and standard deviation of the clinical characteristics of the participants.

Table 2. Clinical characteristics of the participants.

Table 2. Clinical characteristics of the participants. The table shows the mean and standard deviation of the clinical characteristics of the participants.

1. **Question:** What is the mean duration of the disease?
2. **Answer:** The mean duration of the disease is 5.2 years.
3. **Question:** What is the standard deviation of the duration?
4. **Answer:** The standard deviation of the duration is 2.5 years.
5. **Question:** What is the range of the duration?
6. **Answer:** The range of the duration is 1 to 10 years.
7. **Question:** What is the mean severity of the disease?
8. **Answer:** The mean severity of the disease is 3.5.
9. **Question:** What is the standard deviation of the severity?
10. **Answer:** The standard deviation of the severity is 1.2.
11. **Question:** What is the range of the severity?
12. **Answer:** The range of the severity is 1 to 5.
13. **Question:** What is the mean frequency of the symptoms?
14. **Answer:** The mean frequency of the symptoms is 2.5 times per week.
15. **Question:** What is the standard deviation of the frequency?
16. **Answer:** The standard deviation of the frequency is 1.0 times per week.
17. **Question:** What is the range of the frequency?
18. **Answer:** The range of the frequency is 1 to 4 times per week.
19. **Question:** What is the mean impact of the symptoms on daily life?
20. **Answer:** The mean impact of the symptoms on daily life is 4.5.

Table 3. Results of the intervention.

1. **Question:** What is the mean improvement in symptoms?
2. **Answer:** The mean improvement in symptoms is 1.5.
3. **Question:** What is the standard deviation of the improvement?
4. **Answer:** The standard deviation of the improvement is 0.8.
5. **Question:** What is the range of the improvement?
6. **Answer:** The range of the improvement is 0 to 3.
7. **Question:** What is the mean improvement in quality of life?
8. **Answer:** The mean improvement in quality of life is 2.5.
9. **Question:** What is the standard deviation of the improvement?
10. **Answer:** The standard deviation of the improvement is 1.0.
11. **Question:** What is the range of the improvement?
12. **Answer:** The range of the improvement is 1 to 4.
13. **Question:** What is the mean improvement in functional status?
14. **Answer:** The mean improvement in functional status is 3.5.
15. **Question:** What is the standard deviation of the improvement?
16. **Answer:** The standard deviation of the improvement is 1.2.
17. **Question:** What is the range of the improvement?
18. **Answer:** The range of the improvement is 2 to 5.
19. **Question:** What is the mean improvement in patient satisfaction?
20. **Answer:** The mean improvement in patient satisfaction is 4.5.



1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This includes determining how to reach potential customers, what promotional activities to undertake, and how to measure the effectiveness of the marketing efforts.
3. The third step is to develop a financial plan. This involves estimating the costs of the business, projecting revenue, and determining the break-even point.
4. The fourth step is to develop an operational plan. This includes identifying the resources needed to run the business, such as equipment, facilities, and personnel.
5. The fifth step is to develop a management plan. This involves identifying the key personnel who will be responsible for running the business and their roles and responsibilities.

Business Plan

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This includes determining how to reach potential customers, what promotional activities to undertake, and how to measure the effectiveness of the marketing efforts.
3. The third step is to develop a financial plan. This involves estimating the costs of the business, projecting revenue, and determining the break-even point.
4. The fourth step is to develop an operational plan. This includes identifying the resources needed to run the business, such as equipment, facilities, and personnel.
5. The fifth step is to develop a management plan. This involves identifying the key personnel who will be responsible for running the business and their roles and responsibilities.

Business Plan

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This includes determining how to reach potential customers, what promotional activities to undertake, and how to measure the effectiveness of the marketing efforts.
3. The third step is to develop a financial plan. This involves estimating the costs of the business, projecting revenue, and determining the break-even point.
4. The fourth step is to develop an operational plan. This includes identifying the resources needed to run the business, such as equipment, facilities, and personnel.
5. The fifth step is to develop a management plan. This involves identifying the key personnel who will be responsible for running the business and their roles and responsibilities.

Business Plan is a document that outlines the goals, objectives, and strategies of a business. It is a roadmap for the business, providing a clear direction for the future. The business plan is a critical tool for entrepreneurs, as it helps them to understand the market, identify potential customers, and develop a marketing strategy. It also helps them to estimate the costs of the business, project revenue, and determine the break-even point.

Business Plan

The business plan is a document that outlines the goals, objectives, and strategies of a business. It is a roadmap for the business, providing a clear direction for the future. The business plan is a critical tool for entrepreneurs, as it helps them to understand the market, identify potential customers, and develop a marketing strategy. It also helps them to estimate the costs of the business, project revenue, and determine the break-even point.

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This includes determining how to reach potential customers, what promotional activities to undertake, and how to measure the effectiveness of the marketing efforts.
3. The third step is to develop a financial plan. This involves estimating the costs of the business, projecting revenue, and determining the break-even point.
4. The fourth step is to develop an operational plan. This includes identifying the resources needed to run the business, such as equipment, facilities, and personnel.
5. The fifth step is to develop a management plan. This involves identifying the key personnel who will be responsible for running the business and their roles and responsibilities.

Business Plan

The business plan is a document that outlines the goals, objectives, and strategies of a business. It is a roadmap for the business, providing a clear direction for the future. The business plan is a critical tool for entrepreneurs, as it helps them to understand the market, identify potential customers, and develop a marketing strategy. It also helps them to estimate the costs of the business, project revenue, and determine the break-even point.

Business Plan

The business plan is a document that outlines the goals, objectives, and strategies of a business. It is a roadmap for the business, providing a clear direction for the future. The business plan is a critical tool for entrepreneurs, as it helps them to understand the market, identify potential customers, and develop a marketing strategy. It also helps them to estimate the costs of the business, project revenue, and determine the break-even point.

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape.



- **Explain the importance of the following:**
 - **Explain the importance of the following:**

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

- **Explain the importance of the following:**
 - **Explain the importance of the following:**

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

- **Explain the importance of the following:**
 - **Explain the importance of the following:**

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:

- **Explain the importance of the following:**
 - **Explain the importance of the following:**

Explain the importance of the following:

Explain the importance of the following:



- **Task 1:** Identify the three main components of the business model canvas and explain their importance.
- **Task 2:** Analyze the business model of a company of your choice and identify its strengths and weaknesses.
- **Task 3:** Develop a business model for a new product or service, considering the needs of the market and the capabilities of the organization.

Business Model Canvas

The Business Model Canvas is a strategic tool used to develop, test, and scale business models.

- **Customer Segments:** The target market or group of people the business aims to serve.
- **Value Proposition:** The unique benefit or solution the business offers to its customers.
- **Channels:** The methods through which the business reaches its customers.
- **Customer Relationships:** The type of relationship the business builds with its customers.
- **Revenue Streams:** The ways in which the business generates income.
- **Cost Structure:** The expenses the business incurs to operate.
- **Channels:** The methods through which the business reaches its customers.
- **Customer Relationships:** The type of relationship the business builds with its customers.
- **Revenue Streams:** The ways in which the business generates income.
- **Cost Structure:** The expenses the business incurs to operate.

Business Model Canvas: The Business Model Canvas (BMC)

The BMC is a strategic tool used to develop, test, and scale business models.

Components

The BMC is divided into nine sections, each representing a different aspect of the business model.

Business Model Canvas

- **Customer Segments:** The target market or group of people the business aims to serve.
- **Value Proposition:** The unique benefit or solution the business offers to its customers.
- **Channels:** The methods through which the business reaches its customers.
- **Customer Relationships:** The type of relationship the business builds with its customers.
- **Revenue Streams:** The ways in which the business generates income.
- **Cost Structure:** The expenses the business incurs to operate.
- **Channels:** The methods through which the business reaches its customers.
- **Customer Relationships:** The type of relationship the business builds with its customers.
- **Revenue Streams:** The ways in which the business generates income.
- **Cost Structure:** The expenses the business incurs to operate.

Business Model Canvas

- **Customer Segments:** The target market or group of people the business aims to serve.
- **Value Proposition:** The unique benefit or solution the business offers to its customers.
- **Channels:** The methods through which the business reaches its customers.
- **Customer Relationships:** The type of relationship the business builds with its customers.
- **Revenue Streams:** The ways in which the business generates income.
- **Cost Structure:** The expenses the business incurs to operate.
- **Channels:** The methods through which the business reaches its customers.
- **Customer Relationships:** The type of relationship the business builds with its customers.
- **Revenue Streams:** The ways in which the business generates income.
- **Cost Structure:** The expenses the business incurs to operate.



1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape. A thorough market analysis provides valuable insights into the opportunities and challenges of the market, which are essential for developing a realistic business plan.

2. The second step is to develop a business model. This involves determining how the business will generate revenue and how it will manage its costs. A clear business model is crucial for understanding the financial viability of the business and for attracting investors.

3. The third step is to create a marketing and sales strategy. This involves identifying the target market, developing a marketing mix, and establishing a sales process. A well-defined marketing and sales strategy is essential for reaching potential customers and generating revenue.

4. The fourth step is to develop a financial plan. This involves projecting the business's financial performance over a period of time, typically three to five years. A detailed financial plan provides a clear picture of the business's financial health and is essential for securing financing.

5. The final step is to write the business plan. This involves combining all the information gathered in the previous steps into a cohesive document. A well-written business plan is a critical tool for communicating the business's vision and strategy to stakeholders and for guiding the business's operations.

Table 1: Key components of a business plan

Section	Description	Financial Projections		Marketing & Sales Strategy		Overall Status
		Revenue	Expenses	Target Market	Marketing Mix	
Executive Summary	Overview of the business and its goals	\$1,000,000	\$500,000	100,000	Product, Price, Place, Promotion	Good
Market Analysis	Research on the industry and target market	\$1,200,000	\$600,000	120,000	Product, Price, Place, Promotion	Good
Business Model	How the business will generate revenue	\$1,500,000	\$750,000	150,000	Product, Price, Place, Promotion	Good
Marketing & Sales Strategy	How the business will reach its target market	\$1,800,000	\$900,000	180,000	Product, Price, Place, Promotion	Good
Financial Plan	Projections of the business's financial performance	\$2,000,000	\$1,000,000	200,000	Product, Price, Place, Promotion	Good
Conclusion	Summary of the business plan and its key findings	\$2,200,000	\$1,100,000	220,000	Product, Price, Place, Promotion	Good

Table 2: Key components of a business plan

1. Executive Summary: This section provides a high-level overview of the business and its goals. It is the first section that investors and lenders will read, so it is crucial to make a strong impression here.

2. Market Analysis: This section provides a detailed analysis of the industry and target market. It includes information on market size, growth, and competition. A thorough market analysis is essential for understanding the opportunities and challenges of the market.

The following table shows the results of the experiment. The first column shows the number of trials, the second column shows the number of correct responses, and the third column shows the percentage of correct responses. The data shows that the percentage of correct responses increases with the number of trials, indicating that the subjects are learning the task.

Trial	Correct	Percentage
1	1	100%
2	1	100%
3	1	100%
4	1	100%
5	1	100%
6	1	100%
7	1	100%
8	1	100%
9	1	100%
10	1	100%
11	1	100%
12	1	100%
13	1	100%
14	1	100%
15	1	100%
16	1	100%
17	1	100%
18	1	100%
19	1	100%
20	1	100%
21	1	100%
22	1	100%
23	1	100%
24	1	100%
25	1	100%
26	1	100%
27	1	100%
28	1	100%
29	1	100%
30	1	100%
31	1	100%
32	1	100%
33	1	100%
34	1	100%
35	1	100%
36	1	100%
37	1	100%
38	1	100%
39	1	100%
40	1	100%
41	1	100%
42	1	100%
43	1	100%
44	1	100%
45	1	100%
46	1	100%
47	1	100%
48	1	100%
49	1	100%
50	1	100%



3. Pengukuran TW III



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KULTUR REPUBLIK INDONESIA
KELOMPOK KERJA KEPENDIDIKAN
KELOMPOK KERJA KEPENDIDIKAN

Formulir Pengukuran Kemampuan Berpikir Kritis (KBBK) Siswa

A. Identifikasi Diri

No. Urut	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Kelas

B. Pengukuran Kemampuan Berpikir Kritis (KBBK) Siswa

No. Urut	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Kelas
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape. The market analysis should provide a clear picture of the opportunities and challenges facing the business.

2. The second step is to develop a business model. This involves determining how the business will generate revenue and how it will manage its costs. The business model should be realistic and scalable, and it should clearly define the value proposition of the business.

3. The third step is to create a financial plan. This involves projecting the business's financial performance over a period of time, typically three to five years. The financial plan should include a detailed budget, a cash flow statement, and a break-even analysis. It should also provide a clear picture of the business's funding requirements and its ability to generate a profit.

4. The fourth step is to develop a marketing plan. This involves identifying the target market, developing a marketing strategy, and creating a marketing budget. The marketing plan should clearly define the business's marketing objectives and the tactics it will use to achieve them. It should also provide a clear picture of the business's marketing costs and its expected return on investment.

5. The fifth step is to create an operational plan. This involves identifying the key operational processes of the business, such as production, distribution, and customer service. The operational plan should clearly define the business's operational goals and the tactics it will use to achieve them. It should also provide a clear picture of the business's operational costs and its expected return on investment.

6. The sixth step is to develop a management team. This involves identifying the key members of the business's management team, such as the CEO, CFO, and COO. The management team should have the necessary skills and experience to lead the business and achieve its goals. It should also have a clear understanding of the business's strategy and its operational processes.

7. The seventh step is to create a business plan. This involves combining all of the information gathered in the previous steps into a single, cohesive document. The business plan should be clear, concise, and easy to understand. It should provide a clear picture of the business's strategy, its operational processes, and its financial performance.

8. The eighth step is to pitch the business plan. This involves presenting the business plan to potential investors, lenders, and other stakeholders. The pitch should be clear, concise, and compelling. It should clearly define the business's value proposition and its potential for growth. It should also provide a clear picture of the business's financial performance and its ability to generate a profit.

9. The ninth step is to implement the business plan. This involves putting the business plan into action. The business should follow the strategy and operational processes outlined in the plan. It should also monitor its financial performance and make adjustments as needed. The business should be flexible and adaptable, and it should be prepared to make changes as the market evolves.

10. The tenth step is to evaluate the business plan. This involves reviewing the business plan and assessing its effectiveness. The business should evaluate its progress against its goals and objectives. It should also identify areas for improvement and make adjustments as needed. The business plan should be a living document, and it should be updated regularly as the business grows and evolves.



1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis.
2. The second step is to develop a marketing strategy.
3. The third step is to develop a financial plan.
4. The fourth step is to develop an operational plan.
5. The fifth step is to develop a human resources plan.
6. The sixth step is to develop a legal plan.
7. The seventh step is to develop a risk management plan.
8. The eighth step is to develop a sustainability plan.
9. The ninth step is to develop a social responsibility plan.
10. The tenth step is to develop a corporate governance plan.

Example Question 1

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis.
2. The second step is to develop a marketing strategy.
3. The third step is to develop a financial plan.
4. The fourth step is to develop an operational plan.

Example Question 2

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis.
2. The second step is to develop a marketing strategy.
3. The third step is to develop a financial plan.
4. The fourth step is to develop an operational plan.
5. The fifth step is to develop a human resources plan.
6. The sixth step is to develop a legal plan.
7. The seventh step is to develop a risk management plan.
8. The eighth step is to develop a sustainability plan.
9. The ninth step is to develop a social responsibility plan.
10. The tenth step is to develop a corporate governance plan.

Example Question 3

The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis.

The second step is to develop a marketing strategy.

Example Question 4

1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market analysis.
2. The second step is to develop a marketing strategy.
3. The third step is to develop a financial plan.
4. The fourth step is to develop an operational plan.
5. The fifth step is to develop a human resources plan.
6. The sixth step is to develop a legal plan.
7. The seventh step is to develop a risk management plan.
8. The eighth step is to develop a sustainability plan.
9. The ninth step is to develop a social responsibility plan.
10. The tenth step is to develop a corporate governance plan.



1. The following information is available for the year ended 31 December 2019:

Particulars

Revenue	1000
Cost of sales	(400)
Administrative expenses	(100)
Finance income	20
Finance costs	(10)

Particulars

Revenue	1000
Cost of sales	(400)
Administrative expenses	(100)
Finance income	20
Finance costs	(10)

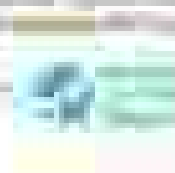
Particulars

1. The following information is available for the year ended 31 December 2019:

Particulars

Revenue	1000
Cost of sales	(400)
Administrative expenses	(100)
Finance income	20
Finance costs	(10)

1. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
2. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
3. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
4. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
5. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
6. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
7. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
8. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
9. The following information is available for the year ended 31 December 2019:
10. The following information is available for the year ended 31 December 2019:



- **Environmental assessment** is a study of how a project or plan will affect the environment (both in the short and long term).
- **Environmental impact assessment (EIA)** is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.

Environmental impact

- **Direct impact** is the immediate effect of a project or plan on the environment.
- **Indirect impact** is the effect of a project or plan on the environment that is caused by the direct impact.
- **Secondary impact** is the effect of a project or plan on the environment that is caused by the indirect impact.
- **Tertiary impact** is the effect of a project or plan on the environment that is caused by the secondary impact.

Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.

Environmental impact

Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.

- **Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.**
- **Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.**

Environmental impact

Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.

Environmental impact

Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.

- **Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.**
- **Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.**

Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.



Environmental impact assessment (EIA) is a process for identifying, predicting, evaluating, and mitigating the potential adverse effects of a project or plan on the environment.



Population

Population is the number of people living in a particular area. It is usually measured in millions or billions.

Population Density

Population density is the number of people living in a particular area, divided by the area of that region.

Population density is usually measured in people per square kilometre (sq km) or people per square mile (sq mi).

Population Growth

Population growth is the increase in the number of people living in a particular area over a period of time.

- 1. Population growth can be caused by a number of factors, including a high birth rate, a low death rate, and immigration.
- 2. Population growth can also be caused by a combination of these factors.

Population Growth Rate

Population Growth Rate

Population growth rate is the percentage increase in the number of people living in a particular area over a period of time.

Population growth rate is usually measured in percentage per year.

Population growth rate can be calculated using the following formula:

$$\text{Population Growth Rate} = \frac{\text{Population in Year 2} - \text{Population in Year 1}}{\text{Population in Year 1}} \times 100$$

Population Pyramid

A population pyramid is a graph that shows the distribution of a population by age and sex. It is usually used to show the age structure of a population.



1. **Explain the difference between a *strong* and a *weak* form of a verb.**

Answer:

There are two main forms of a verb: the *strong* and the *weak*.

- 1. **Strong verbs** are those that form their past tense and past participle by changing the vowel of the infinitive. Examples: *sing* (sing, sang, sung), *break* (break, broke, broken), *write* (write, wrote, written).
- 2. **Weak verbs** are those that form their past tense and past participle by adding *-d* or *-t* to the infinitive. Examples: *work* (work, worked, worked), *play* (play, played, played), *go* (go, went, gone).
- 3. **Irregular verbs** are those that do not follow the regular pattern of adding *-d* or *-t*. Examples: *be* (be, was, been), *have* (have, had, had), *do* (do, did, done).
- 4. **Regular verbs** are those that follow the regular pattern of adding *-d* or *-t*. Examples: *read* (read, read, read), *live* (live, lived, lived), *stop* (stop, stopped, stopped).
- 5. **Phrasal verbs** are those that consist of a verb and a preposition or adverb. Examples: *look up*, *run out*, *go on*.
- 6. **Idioms** are those that have a meaning that is not literal. Examples: *kick the bucket* (to die), *break the bank* (to spend a lot of money).

2. **Explain the difference between a *transitive* and a *intransitive* verb.**

Answer:

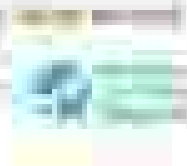
Transitive verbs are those that require a direct object to complete their meaning. Examples: *He kicked the ball.* **Intransitive verbs** are those that do not require a direct object. Examples: *He ran.*

Answer:

- 1. **Transitive verbs** are those that require a direct object to complete their meaning. Examples: *He kicked the ball.*
- 2. **Intransitive verbs** are those that do not require a direct object. Examples: *He ran.*
- 3. **Phrasal verbs** are those that consist of a verb and a preposition or adverb. Examples: *look up*, *run out*, *go on*.
- 4. **Idioms** are those that have a meaning that is not literal. Examples: *kick the bucket* (to die), *break the bank* (to spend a lot of money).

Answer:

- 1. **Transitive verbs** are those that require a direct object to complete their meaning. Examples: *He kicked the ball.*
- 2. **Intransitive verbs** are those that do not require a direct object. Examples: *He ran.*
- 3. **Phrasal verbs** are those that consist of a verb and a preposition or adverb. Examples: *look up*, *run out*, *go on*.
- 4. **Idioms** are those that have a meaning that is not literal. Examples: *kick the bucket* (to die), *break the bank* (to spend a lot of money).



...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

No.	Name of the ...	Age	Sex		Religion		Total
			Male	Female	Male	Female	
1	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...

...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...
 ...the ... of ...

The first step in the process of creating a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape. Once this information is gathered, the next step is to develop a marketing strategy. This includes determining how to reach target customers, what promotional activities to undertake, and how to measure the success of the marketing efforts.

After the marketing strategy is in place, the next step is to create a financial plan. This involves estimating the costs of the business, projecting revenue, and determining the break-even point. It is important to be realistic in these estimates, as they will serve as a guide for the business's financial health.

The final step in the process is to write the business plan itself. This document should clearly outline the business's goals, strategies, and financial projections. It should also include a management team and a list of key personnel. The business plan is a critical tool for securing financing and guiding the business's operations.



4. Pengukuran TW IV

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

Abstract

No.	Description	Unit			
		1	2	3	4
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...



1. The following information is available for the year ended 31st March 2020:
2. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
3. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
4. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
5. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
6. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
7. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
8. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
9. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.
10. The company has a number of employees who are entitled to a bonus of 10% of their basic salary. The bonus is calculated on the basis of the company's profit before tax and is payable in April 2020.

© 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

100

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Abstract

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

1. The first step in the process of creating a business plan is to conduct a market analysis. This involves researching the industry, identifying potential customers, and understanding the competitive landscape. A thorough market analysis helps to define the scope of the business and provides valuable insights into market trends and opportunities.

2. Once the market analysis is complete, the next step is to develop a business model. This involves determining how the business will generate revenue and how it will manage its costs. A clear business model is essential for understanding the financial viability of the business and for attracting investors.

3. The third step is to create a marketing and sales strategy. This involves identifying the target market, developing a brand identity, and outlining the tactics for reaching and converting potential customers. A well-defined marketing and sales strategy is crucial for the success of the business.

4. The fourth step is to develop a financial plan. This involves projecting the business's financial performance over a period of time, typically three to five years. A detailed financial plan provides a clear picture of the business's financial health and is a key component of any business plan.

5. Finally, the business plan should be reviewed and revised as needed. The business plan is a living document that should be updated regularly to reflect changes in the market, the business, and the owner's goals. Regular reviews ensure that the business plan remains relevant and effective.



- **Question 1 (1 point)** Which of the following is a characteristic of a good leader?
 - ☐ A leader should be a person who is always right.
 - ☐ A leader should be a person who is always popular.
 - ☐ A leader should be a person who is always confident.
 - ☐ A leader should be a person who is always honest.
- **Question 2 (1 point)** Which of the following is a characteristic of a good leader?
 - ☐ A leader should be a person who is always right.
 - ☐ A leader should be a person who is always popular.
 - ☐ A leader should be a person who is always confident.
 - ☐ A leader should be a person who is always honest.
- **Question 3 (1 point)** Which of the following is a characteristic of a good leader?
 - ☐ A leader should be a person who is always right.
 - ☐ A leader should be a person who is always popular.
 - ☐ A leader should be a person who is always confident.
 - ☐ A leader should be a person who is always honest.

Question 4 (1 point)

- ☐ A leader should be a person who is always right.
- ☐ A leader should be a person who is always popular.
- ☐ A leader should be a person who is always confident.
- ☐ A leader should be a person who is always honest.

Question 5 (1 point)

Which of the following is a characteristic of a good leader?

- ☐ A leader should be a person who is always right.
- ☐ A leader should be a person who is always popular.
- ☐ A leader should be a person who is always confident.
- ☐ A leader should be a person who is always honest.

Question 6 (1 point)

Which of the following is a characteristic of a good leader?

Question 6 (1 point)

Which of the following is a characteristic of a good leader?

Question 7 (1 point)

Question 8 (1 point)

Question 9 (1 point)

Question 10 (1 point)

Which of the following is a characteristic of a good leader?

- ☐ A leader should be a person who is always right.

Question 11 (1 point)

Question 12 (1 point)



1. The first step in the process of developing a business plan is to conduct a market research. This involves identifying the target market, understanding the needs and preferences of the customers, and analyzing the competitive landscape.
2. The second step is to develop a marketing strategy. This involves determining the most effective ways to reach the target market, such as through advertising, public relations, or direct sales.
3. The third step is to develop a financial plan. This involves estimating the costs of the business, determining the revenue streams, and projecting the overall financial performance.
4. The fourth step is to develop an operational plan. This involves determining the most efficient ways to produce and deliver the products or services.
5. The fifth step is to develop a management plan. This involves identifying the key personnel needed to run the business and determining their roles and responsibilities.

Conclusion

The business plan is a critical document for any entrepreneur. It provides a clear roadmap for the business, helping to identify potential challenges and opportunities. By following the steps outlined in this guide, entrepreneurs can develop a comprehensive business plan that increases their chances of success.

Appendix

1. Market Research Data: A detailed report on the findings of the market research, including demographic information, consumer behavior, and competitive analysis.
2. Marketing Strategy: A detailed plan for the marketing efforts, including the selection of advertising channels, the development of promotional materials, and the implementation of a sales strategy.
3. Financial Plan: A detailed report on the financial projections, including the estimated costs, the revenue streams, and the overall financial performance.
4. Operational Plan: A detailed plan for the operations, including the selection of suppliers, the development of production processes, and the implementation of a distribution strategy.
5. Management Plan: A detailed plan for the management, including the identification of key personnel, the determination of their roles and responsibilities, and the development of a performance evaluation system.

The business plan is a living document that should be updated regularly as the business evolves. It is important to review the plan periodically to ensure that it remains relevant and effective.

References

1. Smith, J. (2018). *Business Plan Development: A Step-by-Step Guide*. New York: Business Press.

2. Johnson, M. (2017). *Marketing Strategy: A Practical Approach*. London: Marketing Press.

3. Brown, K. (2016). *Financial Planning: A Comprehensive Guide*. Boston: Finance Press.

4. Davis, L. (2015). *Operational Management: A Practical Guide*. Chicago: Operations Press.

5. White, R. (2014). *Management: A Practical Guide*. New York: Management Press.

1. The business plan is a critical document for any entrepreneur. It provides a clear roadmap for the business, helping to identify potential challenges and opportunities.
2. By following the steps outlined in this guide, entrepreneurs can develop a comprehensive business plan that increases their chances of success.
3. The business plan is a living document that should be updated regularly as the business evolves.
4. It is important to review the plan periodically to ensure that it remains relevant and effective.
5. The business plan is a critical document for any entrepreneur. It provides a clear roadmap for the business, helping to identify potential challenges and opportunities.



1. Explain the difference between a **strong** and a **weak** password. Give examples of each.

Strong Password:

Example: **Qwerty123!@#** (contains uppercase, lowercase, numbers, and special characters)

Weak Password:

Example: **12345678** (only numbers, easy to guess, no special characters or mixed case)

- Passwords should be at least 12 characters long.
- Passwords should not contain common words or phrases.
- Passwords should not contain personal information like names or birthdays.

2. Explain the difference between a **strong** and a **weak** password. Give examples of each.

Strong Password:

Example: **Qwerty123!@#** (contains uppercase, lowercase, numbers, and special characters)

Weak Password: **12345678** (only numbers, easy to guess, no special characters or mixed case)

Strong Password:

Example: **Qwerty123!@#** (contains uppercase, lowercase, numbers, and special characters)

Weak Password: **12345678** (only numbers, easy to guess, no special characters or mixed case)

Strong Password:

Example: **Qwerty123!@#** (contains uppercase, lowercase, numbers, and special characters)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

2. Assessment Report

The purpose of this assessment report is to provide a comprehensive overview of the results of the assessment conducted on the project. The report is organized into several sections, each addressing a specific aspect of the assessment process and findings.

The first section, "Introduction," provides a brief overview of the project and the assessment process. It includes a statement of the project's purpose and objectives, a description of the assessment process, and a summary of the findings.

The second section, "Methodology," describes the methods used to collect and analyze data. It includes a description of the data sources, the data collection process, and the data analysis process.

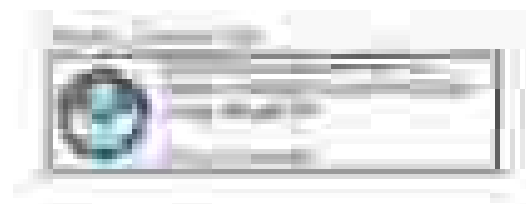
The third section, "Results," presents the findings of the assessment. It includes a description of the results for each of the assessment criteria, a summary of the overall findings, and a discussion of the implications of the findings.

The fourth section, "Conclusion," provides a summary of the findings and a recommendation for future action. It includes a statement of the project's overall status, a summary of the findings, and a recommendation for future action.

The fifth section, "Appendix," contains additional information related to the assessment. It includes a list of the assessment criteria, a list of the data sources, and a list of the data collection and analysis procedures.



- The following features are commonly found in the basic and intermediate versions of the software:
 - A simple, easy-to-use interface with a clear, logical layout.
 - A variety of data entry methods, including keyboard, mouse, and touch.
 - A range of data types, including text, numbers, dates, and times.
 - A variety of data storage options, including local storage, cloud storage, and hybrid storage.
 - A range of data analysis tools, including sorting, filtering, and grouping.
 - A variety of data visualization options, including charts, graphs, and tables.
 - A range of data security features, including user authentication, data encryption, and data backup.



C. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Di Reviu

Partisipan		Check List
Pemeran	1. Laporan kinerja telah menyajikan data yang akurat dan lengkap	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi tentang kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan indikator kinerja yang memadai	☒
	4. Tidak menyiratkan informasi yang bertentangan dengan data yang disajikan	☒
	5. Tidak menyajikan data yang tidak relevan	☒
	6. Tidak menyajikan informasi yang berlebihan	☒
Indikator Kinerja	1. Laporan kinerja menunjukkan indikator yang sesuai dengan misi dan visi organisasi	☒
	2. Indikator yang disajikan dalam laporan kinerja telah dijelaskan secara jelas dan lengkap	☒
	3. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	4. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	5. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
Sasaran	1. Laporan kinerja menunjukkan indikator yang sesuai dengan misi dan visi organisasi	☒
	2. Indikator yang disajikan dalam laporan kinerja telah dijelaskan secara jelas dan lengkap	☒
	3. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	4. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	5. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	6. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	7. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	8. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	9. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	10. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒
	11. Tidak menyajikan indikator yang berlebihan dan tidak relevan	☒

Pernyataan Telah Ditinjau
Lampiran Laporan Penelitian Tesis Wilayah IV Kupang
Tahun Anggaran 2023

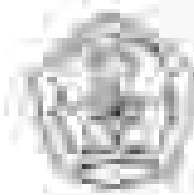
Kami telah membaca dan meninjau secara cermat Lampiran Laporan Penelitian Tesis Wilayah IV Kupang untuk tahun anggaran 2023, sesuai peraturan bahwa hasil laporan tersebut, baik secara administratif, yang meliputi dokumen laporan, maupun material lainnya yang merupakan Lampiran Laporan Penelitian Tesis Wilayah IV Kupang.

Sebagai pernyataan untuk memantapkan kepercayaan tersebut, dengan ini kami menerbitkan surat ini untuk, sebagai, dan untuk.

Ditandatangani oleh kami, Kepala Wilayah Kupang dan Kepala yang memelihara dan memelihara urusan keuangan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan di dalam peraturan tersebut.



D. SK Tim Penyusun Lakin



2024年11月20日 星期四
 2024年11月20日 星期四
 2024年11月20日 星期四

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Abstract

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 12, 2014

1000

100

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

100

- a. After operating for 20 years, Johnson Controls has developed a reputation for providing innovative solutions to its customers. In 1999, Johnson Controls was named one of the "Top 100" most innovative companies in the world by *Fortune* magazine.
- b. Johnson Controls has a long history of providing innovative solutions to its customers. In 1999, Johnson Controls was named one of the "Top 100" most innovative companies in the world by *Fortune* magazine.
- c. Johnson Controls has a long history of providing innovative solutions to its customers. In 1999, Johnson Controls was named one of the "Top 100" most innovative companies in the world by *Fortune* magazine.

100

- [illegible]





Ministry of Health and Family Welfare, Government of India Directorate of Health and Family Welfare, Government of India

For the purpose of the present survey, the following information is required to be furnished by the respondents.

Sl. No.	Name of the Respondent	Address	Telephone No.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

E. SK Tim Reviu Lakin Tahun 2025



KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV

NOMOR : 0145/1.1/SP/07.04/2026

TENTANG

**TIM PEREVIU LAPORAN KINERJA (LAKIN) DI LEMBAGA LAYANAN
PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV TAHUN 2025**

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV

- Menimbang :**
- 1. bahwa untuk penyajian informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV memerlukan yang namanya tim khusus dalam cara kerjanya ini sebagai Tim Pereviu LAKIN Tahun 2025 Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Tim Pereviu Laporan Kinerja (LAKIN);
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan PAN dan RB Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
 - 4. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 6. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 perubahan atas Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 7. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2017 tentang Sistem Pengawasan kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 8. DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kibang Nomor : SP/DIPA-159.03.2.093217.2026;



Jalan, Tasikorek RT.10/7 RW.003, Kelurahan Nauran, Kecamatan Mardifi Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
Laman: <http://blpt15.kemdiknas.go.id>

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV TENTANG TIM PERENCANA LAPORAN KINERJA (LAKIN) DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV TAHUN 2025. |
| PERTAMA | 2. Menetapkan nama – namanya sebagai Tim Perencanaan Laporan Kinerja (LAKIN) pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV. |
| KEDUA | 3. Menugaskan kepada Tim Perencanaan Laporan Kinerja (LAKIN) tersebut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sehari – hari Pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV. |
| KETIGA | 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani apabila ada kekecualan dalam pelaksanaannya maka akan ditinjau kembali dikemudian hari. |
| KEEMPAT | 5. Asli Keputusan ini ditandatangani Kepala yang bersangkutan untuk diikutsertakan. |

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Januari 2020

Kepala



Adrianus Ambela
NIP. 19800415 200501 3 001



Keputusan

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat orang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam keputusan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
 Nomor : 0145/LL.15/PR.07.04/2020
 Tanggal : 23 Januari 2020

Ditunjuk Nama Tim Penerimaan Peserta Karyawan (LAKIN) di Lingkungan
 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun 2020

No.	Nama	Gol	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	Basudikun Geyz	IV/b	Asisten Ahli Matematika	Ketua
2.	Sipriano Tuz	IV/a	Peneliti Teknis Kehutanan	Wakil Ketua
3.	Rat Hayati Rona	IV/a	Peneliti Teknis Kehutanan	Sekretaris
4.	Christina P. C. Beni Mau	III/d	Peneliti Teknis Kehutanan	Anggota
5.	Okello Darmaputra Madia	IX	Praktisi Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota



Keputusan
 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV
 Nomor : 0145/LL.15/PR.07.04/2020
 Tanggal : 23 Januari 2020

F. SK TIM SPI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XV

Atan Tazhema, RI 097/RW 003, Kelurahan Nauruta, Kecamatan Mualaf
Kota Rengas, Negeri Tenggara Timur
E-mail : AtanTazhema@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH IV

NOTICE: This is a U.S. Government work, and, as such, is in the public domain in the United States of America.

TESTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL (SPI)
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDPT) WILAYAH XV
TAHUN 2020

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV

- | | |
|---------------|--|
| Melampirkan : | <ul style="list-style-type: none"> a. Babwa dalam rangka pengurusan akreditasi dan akreditasi penyediaan layanan sains dan tinggi serta kegiatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV, perlu mendapat pengesahan secara sistematis agar terdapat, efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Babwa untuk mengoptimalkan pengawasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Pengawasan Internal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV; c. Babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV. |
| Mengingat : | <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266); b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255); d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800); e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2011 tentang Sistem Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional; f. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. |

- 18 DIPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Kupang
Nomor : SP/DIPA-179.03.2.693213/2026

MEMUTUSKAN:

- | | |
|---------------------|---|
| Mengemukakan | 1. SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XV KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN PENGAWASAN INTERNAL LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (LLDOKTI) WILAYAH XV 2026. |
| KESATU | 2. Membentuk Satuan Pengawasan Internal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun 2026, yang selanjutnya disebut SPI LLDOKTI Wilayah XV, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini; |
| KEDUA | 3. SPI LLDOKTI Wilayah XV bertugas melaksanakan fungsi sesuai Rancangan Kerja Tahun 2026, meliputi:
a. Menyusun program pengawasan internal;
b. Mengawasi pelaksanaan program;
c. Mengawasi pengalihan kewenangan, keuangan dan barang milik negara;
d. Memantau dan mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
e. Mendampingi dan membina Laporan Keuangan;
f. Memberi saran dan rekomendasi;
g. Menyusun laporan hasil pengawasannya; dan
h. Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan. |
| KETIGA | 4. SPI LLDOKTI Wilayah XV melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV; |
| KEEMPAT | 5. Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LLDOKTI Wilayah XV; |
| KELIMA | 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026. |

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 6 Januari 2026

Kepala,



Adrianus Ambeka
NIP.198064152005041001



Lampiran I : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)
Widyais XV Kupang

Daftar Nama Satuan Pengawasan Internal
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun 2025

No.	Nama	Ged	Jabatan	Jabatan dalam TIM
1.	Benediktus Gaya	IV/a	Asisten Ahli Madya	Ketua
2.	Sigitama Tim	IV/a	Pemula Teknis Kebijakan	Wakil Ketua
3.	Rex Hagen Rona	IV/a	Pemula Teknis Kebijakan	Secretary
4.	Floreritina P. C. Riza Mar	III/d	Pemula Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Oswald Darmayanti Malar	IS	Praktisi Hilangnya Masyarakat - Ahli Pertama	Anggota



Disusun

1. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 2. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 3. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 4. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 5. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 6. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 7. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 8. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 9. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang 10. 2025 No. 11 Tahun 2025 tentang

G. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XV Tahun 2025



Black & Veatch
Engineering, Architecture, Construction
Management, Program Management
Services

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1. Labor	Hour	100	10.00	1000.00
2. Material	kg	500	2.00	1000.00
3. Transport	km	200	5.00	1000.00
4. Overhead	%	10	10.00	100.00
5. Profit	%	10	10.00	100.00
Total				4000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1000

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

100

Figure 1. Effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of the monomer.





1. Problem 1

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function satisfying $f(x+y) = f(x) + f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. Show that $f(x) = cx$ for some constant $c \in \mathbb{R}$.

2. Problem 2

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function satisfying $f(x+y) = f(x)f(y)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$. Show that $f(x) = e^{cx}$ for some constant $c \in \mathbb{R}$.

3. Problem 3

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function satisfying $f(x+y) = f(x) + f(y) + f(xy)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$.

4. Problem 4

Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be a function satisfying $f(x+y) = f(x)f(y) + f(xy)$ for all $x, y \in \mathbb{R}$.

